



**IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM  
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT**

**(Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)**

*IMPLEMENTATION OF SOLUTIVE DIALOGUE PROGRAME TO  
INEREASE SOCIAL WELL BEING  
(Descriptive Study In Jember Regency)*

**SKRIPSI**

Oleh

**Farikhatul Mardhiyah  
NIM 110910301008**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM  
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT**

**(Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)**

***IMPLEMENTATION OF SOLUTIVE DIALOGUE PROGRAME TO  
INEREASE SOCIAL WELL BEING  
(Descriptive Study In Jember Regency)***

**SKRIPSI**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial  
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Farikhatul Mardhiyah  
NIM 110910301008**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada:

1. Ayahku Rohmad yang senantiasa memberikan semangat belajar dari mulai awal penulis lahir sampai saat ini. Harapanmu mempunyai anak yang sukses, berbakti kepada orangtua, agama dan negara akan menjadi semangat hidupku, perjuanganmu akan penulis teruskan sampai akhir hayat.
2. Ibundaku Ti'ulin Ni'mah yang selama ini telah memberikan kasih sayang, cinta dan doa serta kesabaran yang tulus kepada penulis sehingga penulis memiliki semangat hidup untuk terus berjuang dalam menjalani keseharian. Semua pengorbananmu akan penulis teruskan sampai akhir hayat.
3. Guru-guruku sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Alamamaterku Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang telah memberiku segudang ilmu.

**MOTO**

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, hingga mereka berusaha mengubah nasibnya sendiri”  
(QS:13 Ar’ rad ayat 11)\*)

Jadilah diri anda sendiri.  
Siapa lagi yang bisa melakukannya lebih baik ketimbang diri anda sendiri.  
(Frank Giblin)\*

“Belajar, berjuang dan bertaqwa”  
( Mars Ippnu)<sup>1</sup>

---

\*) Q.S : 13 (Ar’rad) Ayat 11.

\*)Lokakarya Nasional. 2004. *Motivasi Diri Anak Bangsa*. Bandung.

\*) Mars IPPNU

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhatul Mardhiyah

NIM : 110910301008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “implementasi program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi Deskriptif di Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 September 2015

Yang menyatakan,

Farikhatul Mardhiyah

NIM 110910301008

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PROGRAM DIALOG SOLUTIF DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

*(Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)*

Oleh

**Farikhatul Mardhiyah  
NIM 110910301008**

Pembimbing:

**Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos  
NIP 197802142005012002**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (*Studi Deskriptif di Kabupaten Jember*)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Rabu,  
Tanggal : 02 September 2015  
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim Penguji,**

Ketua,

Sekretaris,

Arif, S.Sos.,M.AP  
NIP. 19760310203121003

Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos  
NIP. 197802142005012002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Partono, M.Si  
NIP. 195608051986031003

Drs. Syech Hariyono, M.Si  
NIP. 195904151989021001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)”. Farikhatul Mardhiyah, 110910301008, 134 halaman, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**

Latar Belakang Salah satu kabupaten yang telah menerapkan Undang-Undang keterbukaan publik adalah Kabupaten Jember. Implementasi Undang-Undang kebutuhan publik di Kabupaten Jember yang dikemas dalam program dialog solutif dengan dua kegiatan yaitu Bedah potensi desa dan temu karya rakyat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jember, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang ditetapkan melalui SK Nomor : 188.4 /3/SEKKAB/012/2006 Tentang Petugas Penyebar Luasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Melalui Potret Membangun Desa Menata Kota Untuk Kemakmuran Bersama (Program Dialog solutif) Kabupaten Jember yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID yang terdiri dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas).

Tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan, Mendeskripsikan, menjelaskan tentang implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, Mendeskripsikan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, dan Mendeskripsikan menjelaskan dampak Dari Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Program Dialog Solutif di Pemerintah Daerah Bagian Hubungan

Masyarakat (Humas) Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis, dalam menguji keabsahan data, penelitian menggunakan tehnik triangulasi.

Hasil analisa yang didapat bahwa implementasi program dialog solutif yang dilaksanakan mulai tahun 2006 yang diikuti oleh MUSPIDA dan Masyarakat se-Kabupaten Jember. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa hambatan seperti Hambatan Teknis, Hambatan Politis dan Anggaran Yang tidak Tepat waktu.

**Kata Kunci:** Implementasi Program, Dialog Solutif. Humas Pemda Jember

## PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*implementasi program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi Deskriptif di Kabupaten Jember)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Ibu Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya terutama kepada mas Erwin yang telah sabar membantu kelancaran administrasi penulis.
6. Bapak Zainal Abidin selaku Kepala Bagian Humas Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jember.
7. Pihak SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember yang telah membantu penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
8. Keluarga yang memberikan seluruh kasih sayang dan kemampuan secara moril, materiil, dan spiritual untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Muhammad Nur Koyyin, SE yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terselesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku KS 11, agung, ana, Didit, Fani, Ratna, Ady, Rhici, Faris (*ngowos*) dan adik-adik angkatan Aqma, Zaqi (*Kriwol*), Risky, Awan (Bajul), Wildi, Ika, Elva, Yogi, Nenek

Greta, Aci, Dan Azizah KN, terima kasih atas masukan yang diberikan, terimakasih atas kebersamaannya yang telah memberikan warna dalam hidupku, dan terimakasih telah menjadi temanku selama di Jember.

11. Keluarga besar kosan jawa 6 no 17, MbK Pipit, MbK Titis, MbK Siti, dan MbK Lilis yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terselesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar PC IPNU-IPPNU Kabupaten Jember yang telah memberi wawasan baru kepada penulis, telah memberi pelajaran hidup yang berarti bagi penulis.
13. Seluruh pihak yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, oleh sebab itu andaikata terdapat kekurangan dalam skripsi ini mohon dimaklumi, di samping itu, untuk tujuan perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik akan penulis terima dengan tangan terbuka.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kesejahteraan Sosial.

Jember, 02 September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN .....	vii
PRAKATA .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Partisipasi Masyarakat.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Komunikasi Partisipatif .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui         Pembangunan.....</b>	<b>16</b>
<b>2.4 Peran Pelaku Perubahan (<i>agen Of Change</i>) Dalam Upaya         Pemberdayaan masyarakat .....</b>	<b>18</b>
<b>2.5 Program Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat.....</b>	<b>18</b>
<b>2.6 Konsep Implementasi .....</b>	<b>20</b>
2.6.1 Program Bagian Dari Kebijakan.....	20
2.6.2 Konsep Pembangunan Sosial .....	22

2.6.3	Implementasi Program .....	23
2.6.4	Model Implementasi Program.....	25
2.6.5	Tahap-Tahap Implementasi Program.....	27
2.6.6	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Implementasi Program.....	28
2.6.7	Dampak Keberhasilan Implementasi Program .....	30
<b>2.7</b>	<b>Kajian Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>31</b>
<b>2.8</b>	<b>Kerangka berfikir .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>3.3</b>	<b>Teknik Penentuan Lokasi.....</b>	<b>35</b>
<b>3.4</b>	<b>Teknik Penentuan Informan.....</b>	<b>36</b>
<b>3.5</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>40</b>
3.5.1	Observasi.....	40
3.5.2	Wawancara.....	46
3.5.3	Dokumentasi .....	53
<b>3.6</b>	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	<b>53</b>
<b>3.7</b>	<b>Teknik Keabsahan Data.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB 4.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Kabupaten Jember .....</b>	<b>61</b>
4.1.1	Deskripsi Penduduk .....	64
4.1.2	Gambaran Tentang Program Dialog Solutif .....	65
4.1.3	Karakteristik Informan.....	68
<b>4.2</b>	<b>Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....</b>	<b>70</b>
4.2.1	Tahap Persiapan .....	73
4.2.1.1	Persiapan Petugas.....	74
4.2.1.1.1	Rapat Koordinasi Humas .....	76
4.2.1.1.2	Pembagian Peran Dalam Pelaksanaan Program.....	78

4.2.1.2	Persiapan Lapangan .....	82
4.2.1.2.1	Lokasi Kegiatan .....	82
4.2.1.2.2	Keamanan Pada Waktu Pelaksanaan Program.....	83
4.2.2	Pelaksanaan.....	86
4.2.2.1	Bedah Potensi Desa.....	89
4.2.2.1.1	Penampilan Potensi-Potensi Desa .....	93
4.2.2.1.2	Serap Aspirasi.....	94
4.2.2.1.3	Penyampaian Program Desa .....	96
4.2.2.2	Kegiatan Temu Karya Rakyat .....	97
4.2.2.2.1	Evaluasi kegiatan Bedah Potensi Desa....	100
4.2.2.2.2	Pameran Produk masyarakat.....	101
4.2.2.2.3	Pelayanan Umum.....	102
4.2.3	Evaluasi.....	102
4.2.3.1	Evaluasi Program .....	104
4.2.3.2	Evaluasi Kegiatan .....	105
4.2.4	Terminasi .....	108
4.2.4.1	Terminasi Program.....	109
4.2.4.2	Terminasi Kegiatan.....	110
<b>4.3</b>	<b>Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Program.....</b>	<b>112</b>
4.3.1	Faktor Pendorong.....	112
4.3.1.1	Dukungan Penuh Dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jember.....	112
4.3.1.2	Sinergitas Antara Lembaga Pemerintah Atau SKPD Terkait .....	113
4.3.1.3	Partisipasi Masyarakat .....	114
4.3.1.4	Anggaran Tepat Waktu .....	117
4.3.2	Faktor Penghambat .....	118
4.3.2.1	Hambatan Teknis .....	118
4.3.2.2	Hambatan Politis .....	121
4.3.2.3	Anggaran Yang Tidak Tepat Waktu .....	122

<b>4.4 Dampak Pelaksanaan Program</b> .....	123
4.4.1 Meningkatkan Forum Silaturahmi Antara Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat .....	125
4.4.2 Terjangungnya Aspirasi Masyarakat untuk dijadikan Sebagai Bahan Untuk Penyusunan, Perencanaan Program Pembangunan Tahun Berikutnya .....	126
4.4.3 Mengetahui Permasalahan dan Kebutuhan Masyarakat.....	127
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	130
<b>1.1 Kesimpulan</b> .....	130
<b>1.2 Saran</b> .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Pelaksanaan Program .....	3
Gambar 1.2 Proses Tanya Jawab .....	7
Gambar 2.1 Rangkaian Dalam Implementasi Kebijakan.....	20
Gambar 2.2 Model kesesuaian Implementasi Program .....	23
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 3.1 Sosialogram Informan .....	37
Gambar 3.2 Alur Analisis Data.....	57
Gambar 3.3 Alur Keabsahan Data .....	60
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember .....	61
Gambar 4.2 Struktur Pelaksanaan Program Dialog Solutif .....	74
Gambar 4.3 Lokasi Kegiatan Dialog Solutif.....	81
Gambar 4.4 Keamanan Pada Waktu Program Dialog Solutif.....	83
Gambar 4.5 Pelaksanaan Kegiatan Dialog Solutif.....	86
Gambar 4.6 Pelaksanaan Bedah Potensi Desa .....	91
Gambar 4.7 Penampilan Potesi-Potensi Desa .....	92
Gambar 4.8 Serap Aspirasi .....	94
Gambar 4.9 Penyampaian Program Desa.....	95
Gambar 4.10 Kegiatan Temu Karya Rakyat .....	97
Gambar 4.11 Pameran Potensi Desa .....	99
Gambar 4.12 Partisipasi Masyarakat.....	113

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1 <i>Teoritical Sampling</i> .....	35
Tabel 3.2 Profil Informan.....	38
Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Jember .....	62
Tabel 4.2 Desa.....	63
Tabel 4.3 Karakteristik Informan .....	69
Tabel 4.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bedah Potensi Desa tahun 2006-2008..	88
Tabel 4.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bedah Potensi Desa tahun 2006-2008..	89
Tabel 4.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Rakyat tahun 2009-2012..	96

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Kajian terhadap penelitian terdahulu
- Lampiran 2. Taksonomi Penelitian Pelaksanaan Program Dialog Solutif
- Lampiran 3. Pedoman Wawancara Implementasi Program Dialog Solutif
- Lampiran 4. Transkrip Reduksi
- Lampiran 5. Dokumentasi
- Lampiran 6. Daftar Pertanyaan / Usulan Dan Jawaban Bedah Potensi Desa
- Lampiran 7. Daftar Pertanyaan / Usulan Bedah Potensi Desa
- Lampiran 8. Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lampiran 9. Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari Bakesbangpol Kabupaten Jember.
- Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember.

## **BAB.1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tanggal 30 april 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberi landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Secara normatif UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dikatakan sebagai produk regulasi yang cukup maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan Negara. Sebab, UU ini secara tegas memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Sebagaimana diketahui, tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), seperti tercantum dalam Pasal 3 UU KIP, antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu Transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Keterbukaan informasi publik tidak sekedar menjadi konsep, sehingga substansinya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. Sedangkan untuk tataran yang lebih implementatif, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang merupakan pelaksana utama pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana. Sama halnya di Kabupaten Jember, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi serta memiliki kompetensi dalam mengelola informasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu atau pejabat fungsional lainnya. Dalam mendukung percepatan pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah daerah perlu dilakukan pengorganisasian secara efektif, efisien, integrative dan komprehensif. Mengingat dalam pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah ini terkait dengan beberapa aspek, diantaranya aspek regulasi, aspek perencanaan, aspek kelembagaan, aspek pembinaan, aspek pengawasan dan aspek pertanggungjawaban pelaporan.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu untuk menentukan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program dialog solutif. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan rencana pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat *Button Up*. *Button Up* adalah

perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dari bawah ke atas (*bottom-up*) pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Pendekatan perencanaan pembangunan *Bottom-Up* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, *bottom-up* atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Salah satu kabupaten yang telah menerapkan Undang-Undang keterbukaan publik adalah Kabupaten Jember. Implementasi dari Undang-Undang kebutuhan publik di Kabupaten Jember yang dikemas dalam program dialog solutif. Program tersebut untuk menyerap aspirasi dari masyarakat untuk menentukan kebijakan dan meningkatkan pembangunan. Dalam pelaksanaannya program dialog solutif mempunyai dua kegiatan yaitu kegiatan Bedah potensi Desa dan temu karya rakyat. Kegiatan Bedah Potensi Desa mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2006 yang bertempat di Kecamatan Umbulsari. Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jember, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang ditetapkan melalui SK Nomor : 188.4 /3/SEKKAB/012/2006 Tentang Petugas Penyebar Luasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah Melalui Potret Membangun Desa Menata Kota Untuk Kemakmuran Bersama (Program Dialog

solutif) Kabupaten Jember yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID yang terdiri dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Dalam pelaksanaan program dialog solutif melibatkan Polisi Resort (Polres), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komando Daerah Militer (Kodim), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS), dan Istansi-istansi terkait, seperti Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi Dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Dinas PU (Pekerjaan Umum). Cipta Karya, Dinas PU (Pekerjaan Umum) Bina Marga. sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

**Gambar : 1.1 Pelaksanaan Dialog Solutif Kabupaten Jember**



Sumber: Dokumen Humas 2014

Dari gambar di atas terlihat beberapa Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember pada waktu program Dialog Solutif. Dalam kegiatan bedah potensi Desa, masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya. Lalu pada saat yang sama Bupati memberikan pertimbangan dan keputusan serta kebijakan. Kegiatan Bedah potensi Desa telah berjalan selama tiga tahun untuk putaran terakhir dilaksanakan pada 23 Agustus 2008 di Desa Arjasa Kecamatan

Arjasa. Untuk kegiatan selanjutnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melanjutkan dengan kegiatan Temu Karya Rakyat (TKR). Kegiatan tersebut menjadi media evaluasi bagi pembangunan di Jember yang mempertemukan Bupati dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan masyarakat jember secara langsung. Hasil observasi ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Indra salah satu SKPD Bagian Humas Pemda Jember yang menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan Temu Karya Rakyat akan membahas tentang keberhasilan kegiatan bedah potensi Desa dan kinerja pamong praja selama ini, yaitu mengenai hasil-hasil pembangunan yang terlaksana di peDesaan. dan Pada waktu kegiatan temu karya rakyat juga akan dibedah seluruh potensi Desa, sekaligus implementasi pembangunannya. Pada waktu kegiatan Temu Karya Rakyat Bupati Jember bersama para pejabat SKPD Jember dan kecamatan serta masyarakat Desa, duduk bersama dan bertatap muka secara langsung, antara aparat para pamong praja dan masyarakat akan melakukan evaluasi seputar pembangunan selama ini”.

Penjelasan di atas bahwa kegiatan temu karya rakyat akan membahas tentang keberhasilan kegiatan bedah potensi Desa dan kinerja pamong praja. Mengenai hasil-hasil pembangunan yang terlaksanan di perDesaan pada waktu kegiatan bedah potensi Desa. Pada waktu kegiatan temu karya rakyat ini juga akan dibedah kegiatan potensi Desa sekaligus implementasi pambangunan. pada waktu kegiatan temu karya rakyat, Bupati bersama para pejabat SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini diungkapkan oleh pak Zainal salah satu SKPD Bagian Humas Pemda Jember tersebut sebagai berikut:

“Kegiatan Temu Karya Rakyat pernah berhenti dilaksanakan selama satu tahun yaitu pada tahun 2011, setelah itu Temu Karya Rakyat kembali berjalan lagi pada tahun 2012, hal ini di karena dengan adanya hubungan kedekatan yang selama ini dibangun oleh Pemkab Jember dengan masyarakat melalui kegiatan sebelumnya yaitu Bedah Potensi Desa yang dinilai sebagai kegiatan yang sangat positif oleh beberapa kalangan. Bahkan program diskusi langsung dengan masyarakat yang digagas Bupati MZA Djalal itu, dinilai sebagai upaya jempot bola dari Pemkab untuk menyerap aspirasi dengan mendengar

langsung keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut tidak sedikit yang ditindak lanjuti oleh Pemkab Jember sebagai bagian dari pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Pemkab Jember guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti permasalahan infra struktur jalan, penerangan jalan umum, pertanian, pengairan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat”.

Berdasarkan wawancara informan di atas bahwa pelaksanaan program dialog solutif dengan kegiatan Temu Karya Rakyat pernah berhenti dilaksanakan selama satu tahun yaitu pada tahun 2011, kemudian pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat kembali dilaksanakan pada tahun 2012. Dengan adanya hubungan kedekatan yang selama ini dibangun oleh Pemkab Jember dengan masyarakat melalui kegiatan sebelumnya yaitu kegiatan bedah potensi Desa yang dinilai sangat positif oleh beberapa kalangan. Pelaksanaan program diskusi langsung dengan masyarakat yang digagas oleh Bupati MZA Djalal, yang dinilai sebagai upaya jemput bola dari Pemkab untuk menyerap aspirasi dengan mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Pemkab Jember guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti permasalahan infra struktur jalan, penerangan jalan umum, pertanian, pengairan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada program Dialog Solutif masyarakat dapat bertemu langsung dan berdialog dengan Bupati Jember, melalui kegiatan Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat yang dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat luas untuk mencari solusi atas apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Jember. Kegiatan Bedah Potensi Desa bersifat musyawarah dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sedangkan kegiatan temu karya rakyat untuk membahas keberhasilan kegiatan bedah potensi Desa dan pamong praja mengenai pembangunan Desa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dalam upaya menjalin komunikasi yang baik antara Bupati dan masyarakat Kabupaten Jember. Berdasarkan latar belakang yang ada penelitian

tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember.

## 1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah untuk mencapai hasil yang diharapkan. Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Masalah menurut Guba dalam Moleong (2010:93) adalah “suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban” dalam arti lain masalah adalah suatu keadaan kondisi labil yang bisa terjadi pada setiap individu, kelompok, dan komunitas.

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui potret “membangun Desa menata kota” untuk kemakmuran bersama yang dikemas dalam program Dialog Solutif Jember. Hal ini mencakup seluruh lapisan masyarakat dan telah terlaksana di beberapa kecamatan di wilayah Jember. Setelah berhasil meletakkan landasan yang kuat dan terbangunnya opini masyarakat yang positif untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan pembangunan “membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama” kegiatan bedah potensi Desa perlu ditingkatkan menjadi forum silaturahmi masyarakat antara pemerintah Kabupaten Jember dengan seluruh lapisan masyarakat, karena memiliki beberapa keunggulan antara lain: sebagai wahana yang efektif dan efisien dalam menampung, menjaring aspirasi pembangunan guna dijadikan bahan untuk penyusunan, perencanaan program pembangunan berikutnya.

Dalam penyebarluasan informasi pemerintah Kabupaten Jember mengimplementasi dengan program dialog solutif untuk meningkatkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan konsep *bottom-up* yaitu Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Dalam hal ini perencana memiliki peran sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Untuk

pelaksana program dialog solutif yaitu bagian hubungan masyarakat (humas) pemda Jember.

Implementasi dari program dialog solutif yaitu kegiatan bedah potensi desa dan kegiatan temu karya rakyat. Seperti gambar di bawah ini yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya dan memberi saran pada pemerintah Kabupaten Jember;

**Gambar : 1.2 Proses Tanya Jawab Antara Masyarakat dengan SKPD**



Sumber: Dokumentasi Humas 2014

Dari gambar di atas terlihat bawah beberapa masyarakat menyampaikan aspirasi pada waktu pelaksanaan Program Dialog Solutif. Output (hasil) dampak dari pelaksanaan program dialog solutif tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti Pembangunan sarana umum atau dengan adanya pelayanan umum. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember pada wawancara yang dilakukan penulis pada saat observasi sebagai berikut:

“Masyarakat banyak yang berpartisipasi pada waktu program dialog solutif karena pada waktu pelaksanaan itu banyak pelayanan administrasi gratis dan masyarakat juga bisa melihat Bupati secara langsung. Sedangkan untuk perangkat Desa bisa mengusulkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada diDesa baik itu berupa pembangunan sarana umum. Tidak lupa juga tiap-tiap Desa juga menampilkan potensi-potensi yang ada diDesanya”.

Berdasarkan informasi di atas diungkapkan oleh Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember bahwa masyarakat banyak yang ikut berpartisipasi pada waktu pelaksanaan program dialog solutif karena pada waktu pelaksanaan itu banyak pelayanan administrasi gratis dan masyarakat juga bisa melihat bupati secara langsung. Sedangkan untuk perangkat Desa bisa mengusulkan tentang permasalahan yang ada di Desa, baik itu berupa pembangunan sarana umum. Tidak lupa juga tiap-tiap Desa menampilkan potensi-potensi yang ada di Desanya.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dialog solutif adalah salah satu yang mendukung dari proses pelaksanaan program tersebut. Jadi kalau tidak ada partisipasi masyarakat maka pelaksanaan program dialog solutif tidak bisa dilaksanakan. seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas Pemda Jember tersebut sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu sangat penting karena masyarakat adalah sasaran program dialog solutif ini untuk menyampaikan aspirasi baik itu permasalahan-permasalahan yang ada diDesanya maupun potensi-potensi yang ada di Desanya masing-masing supaya bisa terekpos. dengan adanya program dialog solutif ini diharapkan masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dalam meningkatkan pembangunan daerah dan bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat”.

Berdasarkan wawancara di atas Partisipasi masyarakat pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu sangat penting, karena masyarakat sebagai sasaran program dialog solutif menyampaikan aspirasi baik itu permasalahan-permasalahan yang ada diDesanya maupun potensi-potensi yang ada diDesanya masing-masing supaya bisa terekpos. Dengan adanya program dialog solutif ini diharapkan masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dalam meningkatkan pembangunan daerah dan bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Setiap bulan Bupati Jember berkeliling ke seluruh penjuru Kab. Jember untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Berbagai keinginan, harapan, saran dan usulan disampaikan melalui forum Bedah potensi Desa. Dialog Solutip Bedah Potensi

Desa, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan demi membuka komunikasi secara intim dengan masyarakat. Memotret kondisi riil yang terjadi sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terjalannya komunikasi yang baik melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dari berbagai persoalan yang diusulkan maupun disarankan oleh peserta dialog, Bupati Jember MZA Jalal pun memberikan berbagai kebijakan salah satu diantaranya pada prioritas pertama adalah Pemerintah Kabupaten Jember akan memberikan biaya pengobatan bagi orang yang dianggap miskin, namun demikian tidak semua usulan dan saran dapat langsung dijawab oleh Bupati, akan tetapi memerlukan sebuah proses untuk dilakukan koordinasi dengan staf – staf yang terkait secara simultan. Sumber data (<http://www.korem083.mil.id/berita/kodim-0824-jember/dialog-solutif-bupati-bersama-forpimda-kab>) diakses pada tanggal 21 mei 2015.

Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi publik yang dikemas dalam program dialog solutif menggunakan konsep *bottom-up* yang mana peran pemerintah akan lebih ditekankan pada penyiapan pedoman, norma, standar dan peraturan, pengembangan informasi dan teknologi, perumusan kebijakan dan strategi nasional. Sementara disisi lain, masyarakat semakin dituntut untuk mengusulkan permasalahan yang ada di wilayah atau di Desanya masing-masing.

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dari Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghamabat yang mempengaruhi Implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Dampak Dari Implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai secara jelas dan tegas agar dapat mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian dengan baik serta menghindari penyimpangan arah penelitian dalam wujud apapun yang kemudian bisa membuat penelitian tidak relevan lagi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan, menjelaskan tentang implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember
2. Mendeskripsikan, menjelaskan faktor pendorong dan penghamabat yang mempengaruhi implementasi program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember
3. Mendeskripsikan, menjelaskan dampak dari implementasi program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

### 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Manfaat penelitian adalah memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi dan kajian bagi masyarakat khususnya tentang perlunya partisipasi masyarakat bagi suksesnya program dialog solutif.
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pelaksana Program terkait dengan pelaksanaan, faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program, serta dampak Program Dialog Solutif sehingga dapat menjadi masukan positif bagi pelaksana program selanjutnya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mendeskripsikan suatu realitas sosial diperlukan landasan yang sangat luas berupa konsep-konsep atau teori-teori mengenai fakta yang menjadi obyek dari penelitian. Hal itu dilakukan guna memberikan jawaban terkait dengan rumusan masalah. Jadi seorang penulis dituntut untuk dapat berfikir secara sistematis dan rasional dan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah yang telah disepakati bersama. Bila tanpa landasan teori yang kuat maka akan mengakibatkan adanya kekaburan dalam kegiatan pengumpulan data-data di lapangan, tinjauan pustaka selalu berpegangan dan berpusat pada konsep atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan fenomena pada Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember dalam implementasi program dialog solutif, faktor pendukung serta penghambat implementasi program dan dampak implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan teori dan konsep-konsep dasar yang dapat dijadikan acuan atau pegangan terhadap suatu penelitian untuk menjelaskan hal tersebut.

### 2.1 Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumarto dalam Sembodo (2006:21) bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi”.

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004(penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d)partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau

peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek.

Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Prinsip partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Partisipasi masyarakat merupakan control adanya kekuasaan yang berlebih agar lebih efektif ditujukan sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam konsep *good governance*. Adanya ruang keterlibatan warga dan kerangka kelembagaan yang sesuai dalam partisipasi turut mendorong pembangunan dan pemerataan.

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Conyers (1992:154) menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan

bahwa mereka pun mempunyai hak turut „urun rembug“ (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka.

Partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, Rusidi dalam Siregar (2001:21) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. dalam program dialog solutif Partisipasi masyarakat sangat antusias karena forum kegiatan tersebut adalah ajang silaturahmi antara Bupati, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarakat bertemu secara langsung.

## 2.2 Komunikasi Partisipatif

Komunikasi partisipatif adalah suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Rahim (2004), mengajukan empat konsep terkait komunikasi partisipatif akan mendorong terbangunnya pemberdayaan (*empowerment*) yaitu *heteroglasia*, *dialogis*, *poliponi* dan *karnaval*. Pertama, *Heteroglasia*: Konsep ini menunjukkan fakta bahwa sistem pembangunan selalu dilandasi oleh berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda-beda dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan faktor budaya yang saling mengisi satu sama lain. Kedua, Dialog adalah komunikasi transaksional dengan pengirim (*sender*) dan penerima

(*receiver*) pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna-makna yang saling berbagai. Ketiga, Poliponi adalah bentuk tertinggi dari suatu dialog dimana suara-suara yang tidak menyatu atau terpisah dan meningkat menjadi terbuka, memperjelas satu sama lain, dan tidak menutupi satu sama lain. Keempat, Karnaval: Konsep ini bagi komunikasi pembangunan membawa semua varian dari semua ritual seperti legenda, komik, festival, permainan, parody, dan hiburan secara bersama-sama. Proses ini dilakukan dengan tidak formal dan biasa juga diselingi oleh humor dan canda tawa.

Menurut Hamijoyo (2005), komunikasi partisipatif mengasumsikan adanya proses humanis yang menempatkan individu sebagai aktor aktif dalam merespons setiap stimulus yang muncul dalam lingkungan yang menjadi medan kehidupannya. Individu bukanlah wujud yang pasif yang hanya bergerak jika ada yang menggerakkan. Individu adalah wujud dinamis yang menjadi subyek dalam setiap perilaku yang diperankan termasuk perilaku komunikasi. Proses komunikasi pada dasarnya merupakan salah satu ekspresi dinamis individu dalam merespons setiap symbol yang diterimanya melalui mekanisme psikologis untuk memberikan makna sesuai dengan referensi yang dimilikinya. Melalui proses komunikasi symbol simbol itu kemudian diberi makna. Maka jadilah pesan yang bisa diterima dan digunakan untuk merumuskan pesan baru sehingga melahirkan situasi komunikasi dua arah (*two ways communication*). Dalam situasi interaktif inilah kemudian terbentuk norma sosial yang disepakati, sehingga semakin lama komunikasi itu berlangsung, maka semakin besar pula kesamaan-kesamaan yang terbangun dalam diri seseorang yang akan menjadi mediator penting aktivitas komunikasi.

Program Dialog Solutif merupakan sebuah bentuk komunikasi partisipatif antara pemerintah dan masyarakat, dimana menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan dijawab langsung oleh instansi-instansi terkait. Masyarakat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberi usulan tentang permasalahan dan potensi yang ada didesa masing-masing kepada pemerintah. Jadi pada waktu program dialog solutif tidak pasif dan akhirnya sama-sama aktif antara masyarakat dan pemerintah.

### 2.3 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Pembangunan

Kesejahteraan sosial dijelaskan didalam dalam UU Kesejahteraan sosial yang baru tahun 2009 pasal 1 yang berbunyi “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. (dalam Suud, 2006:4-5) yang mendefinisikan:

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”.

Dalam pengertian yang lebih luas, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. Suharto (2005:1) menyatakan bahwa:

“PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Menurut Suharto (2005:2) kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, area atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprahnya pekerja sosial. Pengertian kesejahteraan sosial juga

menunjuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas yang biasa disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial yang di Indonesia dikenal dengan nama pembangunan kesejahteraan sosial (PKS). Suharto (2005:4) menyatakan bahwa:

“Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Sehingga yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyerap aspirasi masyarakat pada program dialog solutif untuk pembangunan daerah.

Program dialog solutif adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serap aspirasi dengan kegiatan Bedah Potensi Desa dan kegiatan Temu Karya Rakyat. Dalam kegiatan tersebut melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah dengan tujuan;

1. Meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai sasaran, pelaksana dan pelaku pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur birokrasi Pamong Praja serta menciptakan suasana kompetitif bagi para pelaku pembangunan dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera, religius dan bermartabat.
3. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pelaksanaan program dialog solutif ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah dengan melalui serap

aspirasi. Dalam kegiatan Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat. Dalam pelaksanaan program tersebut diikuti oleh Pemerintah Dan Masyarakat Se-Kabupaten Jember.

#### **2.4 Peran Pelaku Perubahan ( *Agent Of Change*) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Peran pelaku perubahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dalam kaitan dengan para peran pelaku perubahan dalam dikursuskan komunitas. Peran dan Ketrampilan Memfasilitasi menurut Ife (2012:558) Berbagai peran praktik yang dikelompokkan sebagai peran memfasilitasi adalah yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjangan pengembangan masyarakat. Sang pengkerja masyarakat dapat memakai beragam teknik untuk memudahkan sebuah proses, secara efektif menjadi alat yang mempercepat aksi dan membantu kelancaran proses. Dalam kaegori ini, sejumlah peran spesifik ditemukan. Hal tersebut adalah animasi (semangat)sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemaanfaatan berbagai ketrampilan dan sumber daya mengatur pada komunikasi personal.

Peran perubah disini bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Karena juga Ada komunikasi aktif dari mayarakat. Ketika pemerintah memberikan program pro rakyat masyarakat langsung dapat merespon. Didalam program dialog solutif pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keinginan masyarakat, maka dukungan masyarakat akan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pemerintah dan masyarakat sama-sama berperan dalam program dialog solutif.

#### **2.5 Program Pembangunan Berbasis Partispasi Masyarakat**

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus

pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau CD ). Menurut Schilippe dalam buku (Adi 2011:204) pada mulanya teori tentang pembangunan masyarakat desa ini tidak ada. Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama pada situasi sosial yang dihadapi di dalam negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat. yaitu:

Secara teoritis agar suatu desa berkembang dengan baik maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan yaitu: 1. Desa (dalam bentuk wadah ) 2. Masyarakat desa dan 3. Pemerintah desa. Masyarakat adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal pada unit pemerintah yang terendah langsung dibawah camat. Sementara itu pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah kepala desa”.

Program-program pemerintah berbasis masyarakat yang telah berjalan memiliki kemasan yaitu mengedepankan partisipasi masyarakat baik itu dalam bentuk kelembagaan lokal yang sudah ada. Program berbasis masyarakat harus menfokus pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat, serta benar-benar memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program berbasis masyarakat merupakan program yang tidak hanya menfokus kebutuhan jangka pendek, namun lebih dari itu, harus berorientasi untuk jangka panjang dan hasil-hasil yang dicapai serta semua elemen yang mendukung untuk pengembangan program yang telah dilaksanakan.

Masyarakat bukan sekedar penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif dalam menentukan kebijakan. Program dialog solutif merupakan kegiatan yang mempertemukan antara masyarakat dan SKPD Jember dalam menyerap asirasi untuk pembangunan Kabupaten Jember. Dalam kegiatan tersebut partisipasi masyarakat merupakan hal yang utama dalam program dialog solutif ini untuk berjalanya program tersebut.

## **2.6 Konsep Implementasi Program**

### **2.6.1 Program Bagian Dari Kebijakan**

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

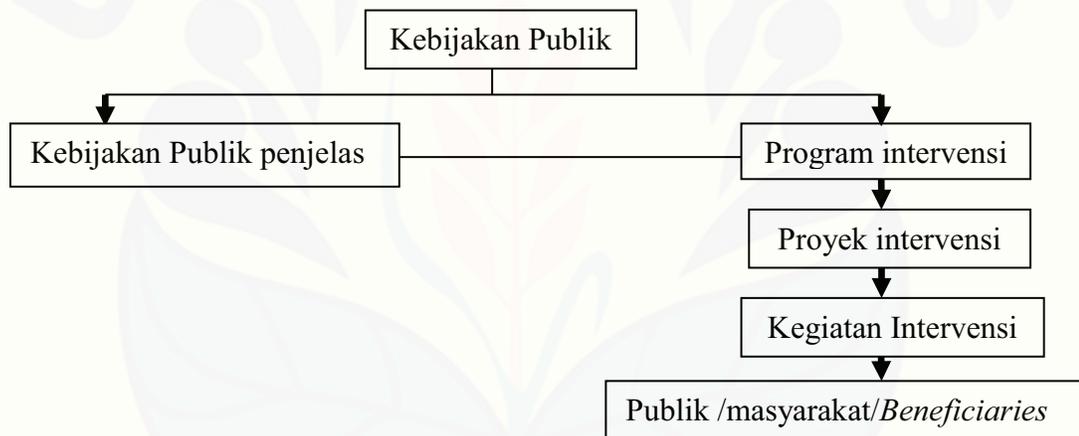
Dari sebuah tahapan kebijakan, pelaksanaan (implementasi) merupakan tahapan yang penting untuk dideskripsikan. Dari implementasi pada akhirnya dapat diketahui tingkat keberhasilan kebijakan yang bersangkutan. “Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi”. (Nugroho D, 2006:119).

Pendapat yang senada diungkap oleh Suharto (2008:191) “kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan”. Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan/ implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting untuk dikaji, dengan mengkaji implementasi kebijakan akan dapat diambil suatu kesimpulan (*conclusion*) apakah kebijakan sesuai dengan situasi

dan kondisi sasaran, tujuan kebijakan dapat tercapai, serta dampak yang muncul akibat dari kebijakan sehingga dapat dideskripsikan layak, tidak layak, atau perlunya perbaikan kebijakan sebagai kelanjutan dimasa yang akan datang.

Pembahasan tentang implementasi tidak terlepas dari konsep program, karena Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang berarti bahwa program merupakan ranah dimana kebijakan dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Nugroho D. (2006:141) bahwa “Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Alur yang lebih jelas dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

Gambar : 2.1 Rangkaian dalam implementasi kebijakan



Sumber: Nugroho D.(2006:141)

Kebijakan adalah merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang. Hal ini sebenarnya menyangkut suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat.

Dalam pembuatan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember melibatkan masyarakat supaya kebijakan yang dibuat pro rakyat.

Program dialog solutif ini merupakan salah satu program kebijakan dari pemerintah daerah. Maka dari itu pelaksana program dialog solutif di fasilitasi oleh bagian Humas Pemda Jember. Disitu Bupati sebagai moderator antara masyarakat dan instansi-istansi pemerintah yang terlibat.

### **2.6.2 Konsep Pembangunan Sosial**

Pembangunan Sosial bukanlah pembangunan “individual”: artinya pembangunan sosial adalah menyangkut perbaikan bagi orang banyak, bukan perorangan atau sekelompok kecil orang. Suatu program (sektor) pendidikan yang hanya bisa meningkatkan SDM dari individual atau sekelompok kecil orang tidak dapat disebut sebagai suatu pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Oleh karena itu masalah kesenjangan antar kelompok adalah suatu masalah sosial. Pembangunan sosial adalah suatu usaha untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Proses pembangunan terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik yang berlangsung pada tingkat nasional maupun wilayah/daerah. Karakteristik yang cukup penting dalam pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan, dan diversifikasi. Kemajuan misalnya, dapat diidentifikasi dari adanya peningkatan dalam rasionalisasi kehidupan masyarakat, teknologi dan efisiensi. Sedangkan pertumbuhan identik dengan kemajuan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan pendapatan masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan produktifitas dan diikuti oleh diversifikasi kegiatan ekonomi, baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, pembangunan memiliki tiga ciri dasar yaitu: pertumbuhan, diversifikasi/diferensiasi dan perbaikan (*progress*) yang terjadi pada semua aspek dan tingkat kehidupan masyarakat. Proses pembangunan dapat dibedakan menurut kecepatan (*rate*), arah (*direction*) dan level dimana proses tersebut berlangsung. Hal

ini terjadi karena variabel-variabel pembangunan berubah dengan *rates* (kecepatan) yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebuah bangsa yang baru membangun mungkin hanya dapat memusatkan usaha-usaha pembangunannya kepada aspek-aspek primer seperti *nation building*, penurunan angka kelahiran dan kematian, pendidikan dasar, dan infrastruktur seperti jalan/jembatan dan komunikasi. Blakely (2000).

Pembangunan sosial yang dimaksud dalam konsep ini yaitu pembangunan seperti sara prasana, tapi tidak cukup dengan cara fisik tapi dalam pembangunan tersebut dibangun pasar, sekolah, peningkatan Sumber Daya Masyarakat, pelayanan kesehatan, dan Pelayanan administrasi kependudukan melalui serap aspirasi dalam program dialog solutif.

### 2.6.3 Implementasi Program

Parsons (2008:472), menjelaskan bahwa implementasi yang efektif adalah sebuah kondisi yang dapat dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang-orang yang ada di garis depan pemberi layanan. Sedangkan Meier dan Horn dalam Parsons (2008:482), menyatakan bahwa studi implementasi perlu mempertimbangkan isi (content) atau tipe kebijakan. Artinya bahwa dalam melaksanakan dan menjalankan implementasi suatu program kebijakan harus melihat dan memperhatikan agar sejalan dengan isi dari kebijakan suatu program. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster dalam Wahab (2000:64) adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Menurut Wahab (2004:65) Pengertian Implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam penelitian ini adalah bagian hubungan masyarakat (Humas) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan dalam bentuk program Dialog solutif, akan tetapi dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi target sasaran. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Menurut Syukur Abdullah (1988;398) bahwa Pengertian dan unsure-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut :

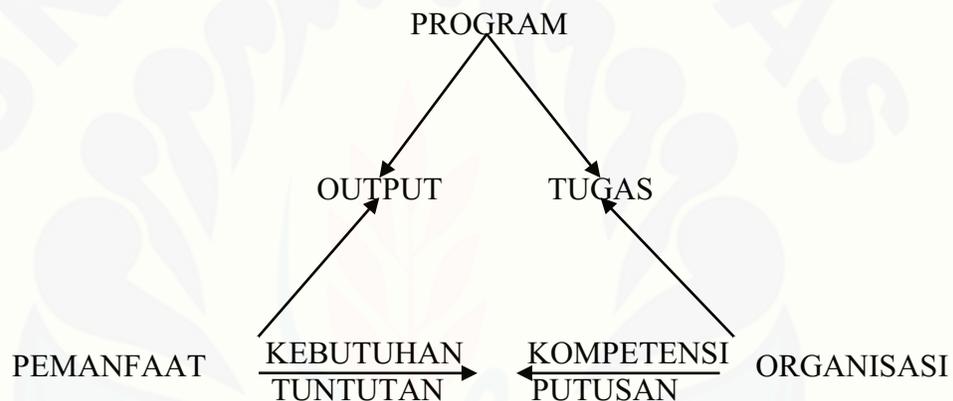
1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan , langkah-langkah yang strategis maupun operasinal yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
2. Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai atau “*outcomes*” unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung maupun menghambat sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :
  - a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu Faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program- program pembangunan pada umumnya.
  - b. Target groups yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
  - c. Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

- d. Strategi perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

#### 2.6.4 Model Implementasi program

Model implementasi program sebagaimana yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut;

Gambar : 2.2 Model Kesesuaian Implementasi Program



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk

dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program ( Akib dan Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsure implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Dengan memahami model-model Implementasi pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-model Implementasi dalam dua jenis pemilahan menurut Pulz dan Treib dalam Agung (2011:15) yaitu pertama adalah Implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*Top Down*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom up*), atau pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentives*). Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dalam Negara. Sebaliknya “*bottom up*” bermakna meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah atau swasta, namun pelaksanaannya oleh rakyat atau target sasaran. Diantara dua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah (pembuat kebijakan) dan masyarakat (target sasaran). Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Masih menurut Parsons

(2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Program pemerintah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yakni implementasi program dialog solutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2.6.5 Tahap-tahap Implementasi Program**

Tahapan implementasi program menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) melalui tujuh langkah sebagai berikut:

#### **1. Persiapan**

Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

#### **2. Pengembangan kontak dengan komunitas**

Tahapan ini sebagai upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pengembangan kontak yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian tujuan program.

#### **3. Pengumpulan data dan informasi**

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi dari pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dimana menggambarkan secara umum yang terkait dengan subjek pembahasan.

#### **4. Perencanaan dan analisis**

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan dibahas dimana melakukan perencanaan dalam memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada suatu masalah tertentu.

#### 5. Pelaksanaan

Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

#### 6. Evaluasi

Dengan evaluasi maka suatu program atau suatu kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### 7. Terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri.

Jadi dari penjelasan diatas implementasi program akan selalu berkaitan dengan tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan seperti yang diterapkan dalam bentuk program dialog solutif. Berdasarkan pengertian implementasi program, model implementasi program dan tahapan-tahapan implementasi yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program yang diteliti dalam penelitian ini adalah terfokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dalam konteks penelitian ini yaitu program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.6.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program**

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Pendapat yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang dikutip di buku Indiahono (2009;10) yang mengatakan bahwa ada empat faktor atau variabel yang merupakan syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Komunikasi, ini merupakan hal yang sangat penting karena seorang implemeter dengan menguasai informasi yang cukup/banyak, maka akan memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan program. misalnya Aparat pemerintah sebagai implemeter dengan menguasai informasi tentang program pembangunan pedesaan utamanya mengenai teknis perencanaannya maka dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.
2. Sumber daya (*Resources*), Sumberdaya ini meliputi empat komponen yaitu Staf yang cukup (jumlah dan mutu), Informasi yang memadai dalam memberikan informasi penjelasan pada sasaran program, Kewenangan (*Authority*) yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program.
3. Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari aparat pemerintah dalam pelaksanaan program, dengan semangat yang tinggi dan sikap/mental yang baik sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku, maka program akan berjalan sebagai mana mestinya.
4. Struktur birokrasi yaitu penanganan program sesuai dengan standard operating procedures (SOP) dengan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat. misalnya pemerintah, dengan aparatnya serta masyarakat.

Menurut P. Warwieck, (1988;17) implemetasi program mempunyai faktor penghambat yaitu Banyaknya pemain (*actor*) yang terlibat, Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilakukan berarti makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan proyek yang pengesahan design harus ditetapkan ditingkat nasional terlalu banyak menyita waktu. dan Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, maka makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan.

### 2.6.7 Dampak Keberhasilan Implementasi Program

Menurut G. Shabbir Cheema dan dennis A. Rondinelli yang dikutip dibuku Wahab (2004) ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak keberhasilan suatu program yaitu:

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Penjelasan tersebut menerangkan bahwa dampak dari keberhasilan implementasi program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Dimana dalam hal ini, karena keberhasilan dari implementasi program dialog solutif. Pada perspektif proses, program dialog solutif ini dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan seperti halnya meningkatkan pembangunan akibat implementasi program yang sesuai rencana dan terarah dengan baik. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Menurut Korten (dalam Tarigan, 2000:19) Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan

organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Demikian hasilnya dengan program dialog solutif yaitu untuk meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serap aspirasi. Dengan kegiatan bedah potensi desa dan kegiatan temu karya rakyat.

## **2.7 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan secara acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran diri sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah peneliti maka perlu dilakukan penelahan kepustakaan yang termasuk didalamnya ada tinjauan pustaka terdahulu oleh karena itu adanya tinjauan peneliti yang akan dilakukan. Sehingga diketahui perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang sedang dilakukan. Peneliti terdahulu diambil dari hasil peneliti yang berhubungan dengan Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

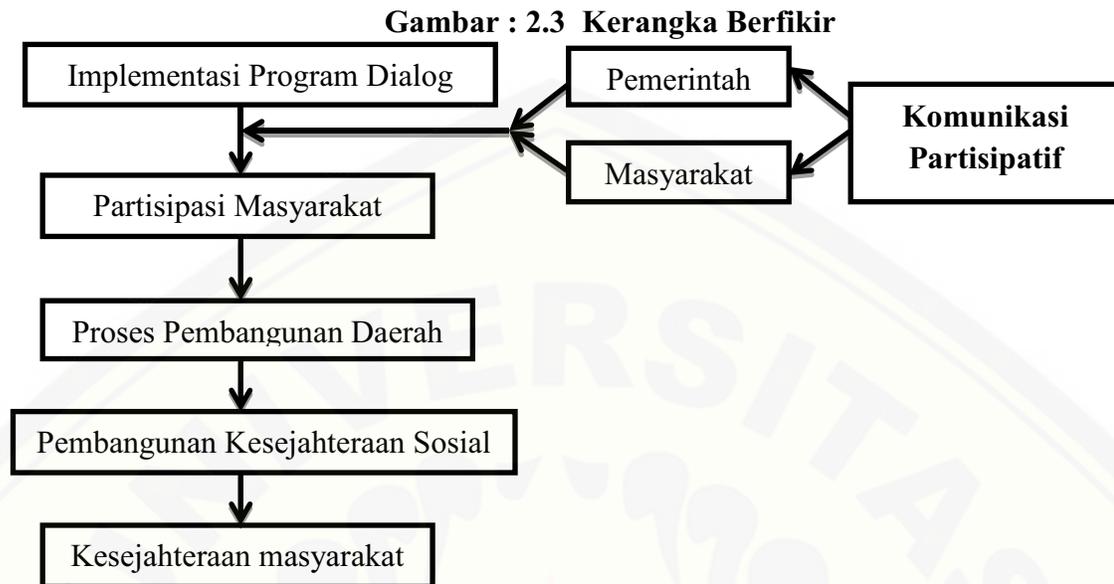
Dalam penelitian ini peneliti membandingkan dengan peneliti-peneliti yang berhubungan dengan program. Ajeng Anggi Yulianti (2010) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara yang berjudul. “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang Priode tahun 2009”. Temuan peneliti Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang priode tahun 2009 belum maksimal, hal ini dikarnakan faktor penghambat yaitu dana, kualitas sumber daya manusia yang tidak merata. Metode yang dipakai Kuantitatif Deskriptif. Keunggulan peneliti menggambarkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang Priode tahun 2009. Persamaan dengan peneliti ini adalah menggambarkan Implementasi Program .

Penelitian lainnya yaitu Novayanti Sopia Rukmana S (2013) Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang”. Temuan peneliti Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah yang diterapkan di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif. Keunggulan peneliti Mengambarkan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang. Persamaan dengan peneliti ini adalah Mengambarkan Implementasi Program dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian lainnya yaitu Hary Suryanto (2011). Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi yang berjudul. “Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa”. Temuan peneliti Implementasi program peningkatan kemandirian perempuan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa terkhusus di Desa Rantekamase berjalan dengan baik dan cukup berhasil. Metode yang dipakai kualitatif deskriptif. Keunggulan peneliti Mengambarkan Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa. Persamaan dengan peneliti ini adalah Mengambarkan Implementasi Program menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## **2.8 Kerangka Berfikir Konsep Penelitian**

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya berfikir kerangka fikiran yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian.



Sumber: diolah penulis 2014

Implementasi program dialog solutif yang bertujuan sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaannya perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor pendorong suksesnya pelaksanaan program ini. Masyarakat menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangunan daerah kepada pihak pemerintah secara langsung. Dengan adanya program ini pemerintah dapat melihat dan mendengar secara langsung kondisi riil masyarakat beserta masalah yang dihadapi masyarakat yang dapat dijadikan pijakan/pedoman Pemerintah Kabupaten Jember dalam proses pembangunan daerah dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada dasarnya tujuan utama dari program dialog solutif ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam penulisan memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian, diharapkan peneliti dapat mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan. Menurut Sugiono dalam buku memahami penelitian kualitatif (2008:2) “metode penelitian yakni cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Maka dari itu pengguna metode dalam sebuah penelitian adalah perihal penting dan dasar untuk mengawasi proses kegiatan penelitian yang telah dikonsepsikan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam menjelaskan fenomena dan permasalahan yang ada nantinya. Serta memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian dapat dirumuskan dan dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan. Menurut Arnold M. Rose dalam metode penelitian social (1965:1) “keberadaan metode penelitian itu mutlak diperlukan untuk membuka kulit bungkus fakta sosial yang sepi tanpa untuk diamati dalam suatu kerangka acuan yang spesifik”.

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Berangkat dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono dalam buku memahami penelitian kualitatif (2008:1) didefinisikan: “sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)”. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, posisi penelitian sebagai instrumen kunci.

Metode ini berfungsi sebagai pedoman penelitian yang dapat mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan (*transferability*). Selain itu, supaya penelitian ini mampu mendeskripsikan keadaan atau fenomena sosial yang sebenarnya (*naturalistik*) di lapangan. Salah satu alasan penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif, karena dalam metode ini tidak cukup hanya mengamati data yang di peroleh dari hasil pengamatan atau yang terlihat serta terucap. Jadi peneliti ini akan mengetahui apa yang dibalik fenomena didalamnya. Dengan informasi dari informanlah kemudian diamati dengan seksama dan sungguh-sungguh, kemudian ditafsirkan dan dianalisa.

Melalui pendekatan kualitatif ini nantinya akan diperoleh data yang mendalam serta memperoleh data yang terkandung dibalik fenomena tampak (*transferbility*). Selain itu, supaya penelitian ini mampu mendeskripsikan keadaan atau fenomena social yang sebenarnya (*naturalistik*) dilapangan. Salah satu alasan penelitian ini menggunakan pedekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak cukup hanya mengamati data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau yang terlihat serta terucap, jadi penelitian ini akan mengurai apa yang terdapat dibalik fenomena, walaupun terkadang sulit untuk memperoleh dan memahami nilai yang terkandung didalamnya. Dengan informasi dari informanlah kemudian diamati dengan seksama dan sungguh-sungguh, kemudian ditafsirkan dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran secara detail, tentang program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Searah pada tujuan penelitian maka jenis penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan ini adalah deskriptif sesuai dengan fokus penelitian karena berusaha menggambarkan fenomena sosial secara terperinci dari program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

Penelitian deskriptif menurut Neuman (2006:35) “*Descriptive research present a picture of spesific details of situation, social setting or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject*” (penelitian deskriptif memberikan gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, setting sosial atau hubungan sosial. Hasil dari studi deskriptif adalah gambaran subjek secara detail)

Searah dengan pendapat tersebut, Bungin (2007:68) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif akan mendiskripsikan program dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, dalam hal ini menjelaskan, memaparkan, menggambarkan tentang implementasi program dialog solutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program dialog solutif dan dampak dari program dialog solutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember.

### **3.3 Penentuan Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang penting, untuk memperoleh dan mempermudah dalam mencari data yang diperlukan serta untuk memperjelas fokus penelitian atau permasalahan yang akan diteliti.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan program dialog solutif mempunyai dua kegiatan yaitu bedah potensi desa dan temu karya rakyat. Untuk kegiatan bedah potensi desa mulai dilaksanakan tanggal 21 Februari 2006 sampai pada tanggal 23 Agustus 2008. Untuk kegiatan temu karya rakyat dilakukan mulai tanggal 22 Januari 2009 tapi pada tahun 2011 pernah berhenti kemudian pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 sampai pada tahun 2015 kembali dilakukan kegiatan bedah potesi Desa.

Dengan keberhasilan program ini dapat dirasakan masyarakat berupa pembangunan berupa sarana prasarana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi awal yang dilakukan terkait dengan kajian dalam penelitian ini bahwa akan menjelaskan tentang program dialog solutif diketahui bahwa implementor/pelaksana program ini ada pada bagian HUMAS

(Hubungan Masyarakat) pemerintah Kabupaten Jember. Karenanya proses penelitian ini juga akan berinteraksi dengan pihak Humas Pemkab disamping juga dengan penentu kebijakan Pemkab Jember (Bupati Jember) serta SKPD. Sehingga dengan mendeskripsikan hal tersebut maka lokasi penelitian ini, terkait dengan program dialog solutif baik implementasi, faktor yang menghambat dan faktor pendorong serta dampak program ditetapkan di wilayah Kabupaten Jember.

### 3.4 Teknik Penentuan Informan

Selanjutnya informan dalam penelitian ini mempunyai peranan yang sangat penting. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lokasi sehingga informan ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang obyek penelitian dan terlibat langsung dalam kejadian itu sehingga apabila penulis bertanya tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian maka penulis mendapatkan data yang *valid*. Hal ini sesuai apa yang diutarakan oleh Moleong (2007:90),

“Informan adalah orang yang mengetahui tentang suatu kejadian atau peristiwa di lapangan dan terlibat langsung dalam kejadian itu sehingga apabila peneliti bertanya tentang suatu keadaan, peristiwa atau kejadian maka peneliti mendapatkan data yang jelas.”.

Untuk menentukan informan salah satunya dapat dilakukan dengan melalui keterangan orang yang berwenang dan dipandang paling banyak mengetahui terhadap masalah yang dikaji, baik secara formal maupun informal. Maka penulis sajikan *theoretical sampling* dengan bentuk yang sederhana seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 *Theoretical Sampling*

Informasi Yang Didapat	Informan( <i>Bold</i> )	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi program,</li> <li>- Faktor yang mendukung dan menghambat,</li> <li>- Dampak program dialog solutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember</li> </ul>	Pelaksana Program	Pemerintah Kabupaten Jember
	Penerima Program	Masyarakat Kabupaten Jember ( <i>beneficiaries</i> )

Sumber : data diolah peneliti 2015

Dalam penentuan informan ini peneliti menggunakan metode teknik bola salju (*snowball*), sebagaimana menurut Moleong (2007:166) “teknik bola salju adalah suatu teknik yang dimulai dari suatu awal menjadi semakin lama semakin banyak dan senantiasa menggelinding dan mencair sesuai dengan situasi kondisi dan kebutuhan penulis.”

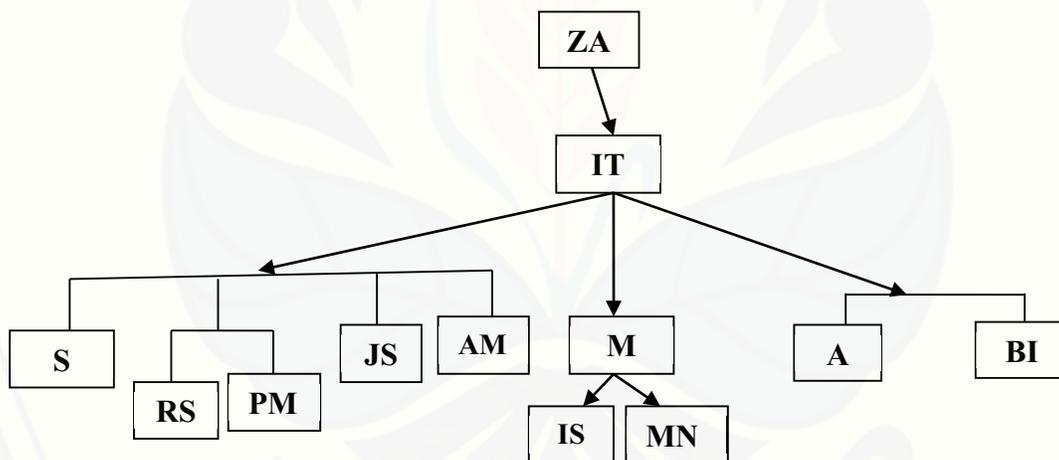
Penentuan informan menggunakan *snowball sampling* karena awalnya peneliti cuma mengetahui koordinator program dialog solutif. Setelah itu peneliti dikasih tahu kalau pelaksana program dialog solutif itu bukan cuma SKPD Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda saja, tetapi semua instansi-istansi dan dinas-dinas juga harus ada perwakilannya ketika pada waktu pelaksanaan program dialog solutif berlangsung.

Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampelnya tersebut, peneliti akan menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Sehingga dalam penentuan informan penulis menggunakan teknik tersebut karena data bersifat menyebar. Perlu ditegaskan pula, metode penentuan informan menggunakan *snowball sampling* dimaksudkan untuk

menjaring sebanyak mungkin informasi dan menggali informasi dari berbagai sumber.

Proses awal peneliti menentukan informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah dengan menemui ZA yang merupakan kepala bagian Humas. Pada pertemuan tersebut peneliti memberitahukan tujuan dan maksud peneliti dalam membutuhkan seseorang sebagai informan pokok yang terlibat kegiatan dialog solutif. Disebut dengan sumber utama atau informan karena dianggap dapat menyampaikan informasi mendalam tentang kegiatan dialog solutif, yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan informan adalah orang yang dianggap dapat menambahkan informasi yang diperlukan oleh peneliti, serta mengetahui tentang kegiatan dialog solutif. Dari ulasan informan di atas, maka penulis sajikan sosiogram sebagai alur dalam penentuan informan penelitian, seperti di bawah ini:

Gambar 3.1 Sosiogram Informan Penelitian



Sumber : data diolah peneliti 2015

Keterangan :

ZA : Informan Awal, Pelaksana Program

IT : Informan Kunci, Pelaksana Program

A : Pelaksana Program

BI : Pelaksana Program

AM : Pelaksana Program

JS : Pelaksana Program

PM : Pelaksana Program

RS : Pelaksana Program

S : Pelaksana Program

M : Penerima Program

IS : Penerima Program

MN : Penerima Program

Berdasarkan data sosiogram di atas, penulis menentukan informan ZA sebagai informan kunci dalam mencari data penelitian ini maka beliau menyarankan untuk menemui informan IT. Setelah menemui informan IT, informan menyarankan agar segera menemui informan A, BI, AM, PM, RS, S dan JS. Selanjutnya informan IT juga memberi saran untuk menemui informan M dalam mengkroscek data yang diperlukan penulis. Selanjutnya informan M memberikan jalan untuk menemui informan IS dan MN dalam mengkroscek data yang dibutuhkan penulis. sehingga data yang dibutuhkan penulis bisa valid dan bisa dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan kareakteristik yang telah ditentukan, untuk penentuan informan maka informan yang sesuai dengan kategori tersebut ada 12 orang yang terdiri dari pelaksana dan penerima program dialog solutif. seperti tabel di bawah ini;

Tabel : 3.2 Profil Informan

No	Nama	JK	Pekerjaan	Kedudukan	Lama Menjabat
1	ZA	L	PNS	Kepala Bagian Humas	1 Thn 1 Bulan
2	IT	L	PNS	Sub Bagian Kelembagaan	3 Thn 2 Bulan
3	BI	L	PNS	Subbag Dokumentasi dan Informasi	5 Tahun
4	A	L	PNS	Subbag Kerjasama Media	2 Tahun
5	JS	L	PNS	Kepala Bagian Kebersihan & PJU	5 Tahun
6	S	L	PNS	Sekertaris	10 Tahun
7	AM	L	PNS	Sekertaris	1 Tahun
8	RS	P	PNS	Kabit Kependudukan	3 Thn 3 Bulan
9	PM	L	PNS	Kabit Pencatatan Sipil	1 Tahun
10	M	L	Perangkat	Kepala Desa	2 Priode

Desa					
11	MN	L	Wiraswasta	Tokoh Pemuda	-
12	S	L	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat	-

Sumber: diolah penulis 2015

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sebuah keterangan dan penjelasan dari suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi peneliti, baik di perolehnya dari informan pokok ataupun informan tambahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah hal yang urgent sekali, untuk meminimalisir terhadap data yang tidak *valid* atau tidak berkualitas. teknik pengumpulan data untuk membantu kelancaran dalam memperoleh data. penulisan ini sebagaimana pendapat Sugiono (2010:62) menyatakan bahwa:

“teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan”.

Menarik kesimpulan dari sugiono diatas, bahwa dalam sebuah proses pengumpulan data perlu kiranya kita betul-betul memperhatikan sumber data, baik validitas data tersebut maupun *ke-orisinalan* data yang diperoleh oleh peneliti. Maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian, diantaranya:

#### 3.5.1 Observasi

Menurut pengertian yang diungkapkan oleh Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, observasi dilakukan untuk memperoleh lebih banyak keterangan dari masalah yang akan diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Observasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada obyek penelitian, yaitu pengamatan langsung pada sumber kegiatan program dialog solutif. Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi nonpartisipan dimana penulis tidak terlibat langsung dalam penelitian

tersebut dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada, yang dalam penelitian ini baik itu dokumen yang berasal dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Jember, Badan Pusat Statistik, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

Narbuko (2009:72) menjelaskan bahwa observasi nonpartisipan adalah jika unsur partisipan sama sekali ada pada *observer*. Sedangkan menurut Faisal (1990:78), observasi *nonpartisipan* adalah sekedar melakukan observasi, tetap “berdiri sebagai orang luar” dalam situasi sosial yang tengah diobservasinya.

Menurut Faisal (1990:78), terdapat sembilan *item* utama yang dapat diobservasi pada suatu situasi sosial, yaitu:

1. Menggambarkan keadaan tempat dan ruang tempat suatu situasi sosial yang berlangsung dengan mencatatnya pada catatan lapangan contohnya saat mengikuti pelaksanaan program dialog solutif.
2. Mencatat benda, peralatan, perlengkapan yang terdapat pada ruangan tersebut termasuk tata ruang dan penggunaannya misalnya perabotan rumah, meja kursi, dan tempat berlangsungnya observasi.
3. Mencatat para pelaku pada suatu situasi tersebut, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka seperti, status, jenis kelamin, dan usia misalnya pada pelaksana dan penerima program dialog solutif .
4. Mencatat kegiatan yang sedang berlangsung pada saat observasi namun sifatnya tersamar agar informan tidak merasa risih dan tetap bersifat normal.
5. Tingkah laku para pelaku dalam proses berlangsungnya aktivitas/kegiatan yang berhubungan juga tidak luput untuk dicatat.
6. Peristiwa yang berlangsung disaat dilakukannya observasi.
7. Waktu berlangsungnya peristiwa pagi, siang, sore atau malam.
8. Ekspresi perasaan yang tampak pada para pelaku disuatu situasi sosial misalnya marah, takut, gelisah, sedih, senang dan lain-lain.
9. Tujuan yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan yang ada disuatu situasi sosial

Observasi dilakukan dengan sengaja pada saat informan senggang atau dalam keadaan santai tanpa tekanan yaitu pada waktu informan istirahat atau selesai bekerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing informan. Dalam penelitian ini observasi berfokus pada situasi sosial yang terjadi dalam berbagai kegiatan masing-masing informan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Informan ZA**

Berdasarkan observasi yang dilakukan di ruang Kerja ZA di Kantor Bagian Humas Pemda Jember, dilihat dari ruangan informan terdapat banyak perlengkapan yang ada di ruang kerja saat itu adalah satu komputer, printer, meja, lemari tempat berkas-berkas, dua kursi plastik dan satu set sofa. Informan berusia 48 tahun merupakan kepala Bagian Humas kabupaten Jember. Saat dikunjungi informan terlihat agak sibuk karena pekerjaannya yang sangat padat. Namun informan dengan senang hati menerima dan mempersilahkan penulis untuk berbincang-bincang.

**b. Informan IT**

Berdasarkan Observasi dilakukan di ruang Kerja Kantor Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember. Pada waktu observasi penelitian situasi di dalam kantor saat itu bising karena dalam ruangan terdapat banyak karyawan. Perlengkapan yang ada di ruangan Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember adalah beberapa perangkat meja dan kursi kerja pegawai yang berjejer dan terkesan rapi. Di atas meja kerja informan terdapat beberapa tumpukan buku, kertas-kertas, komputer dan printer. Informan berusia 39 tahun bekerja Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember dengan jabatan sebagai Sub Bagian Kelembagaan.

**c. Informan BI**

Berdasarkan Observasi dilakukan di ruang Kerja Kantor Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember. Keadaan saat dilakukan penelitian situasi di dalam kantor saat itu bising karena dalam ruangan terdapat banyak karyawan. Perlengkapan yang ada di ruangan Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember

adalah beberapa perangkat meja dan kursi kerja pegawai yang berjejer dan terkesan rapi. Di atas meja kerja informan terdapat beberapa tumpukan buku, kertas-kertas, kamera, komputer dan printer. Informan berusia 42 tahun, bekerja di Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember dengan jabatan sebagai Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

**d. Informan A**

Observasi dilakukan di ruang Kerja Kantor Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember. Keadaan pada waktu penelitian sangat sepi kebetulan SKPD yang lain lagi ada kegiatan. Perlengkapan yang ada di ruangan Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember adalah beberapa perangkat meja dan kursi kerja pegawai yang berjejer dan terkesan rapi. Di atas meja kerja informan terdapat beberapa tumpukan buku, kertas-kertas, komputer dan printer. Informan berusia 30 tahun, bekerja di Bagian Humas Pemda Kabupaten Jember dengan jabatan sebagai Sub Bagian Kerjasama Media.

**e. Informan JS**

Observasi dilakukan di kantor PU Cipta Karya kabupaten Jember. Keadaan saat dilakukan penelitian situasi di dalam kantor sangat sepi karena mempunyai ruangan sendiri. Perlengkapan yang ada di ruangan kerja adalah beberapa perangkat seperti meja, kursi kerja, kursi sofa dan almari. Sedangkan di atas meja kerja informan terdapat beberapa tumpukan buku, kertas-kertas, komputer dan printer. Informan berusia 35 tahun bekerja Dinas PU Cipta Karya sebagai kepala bidang kebersihan dan PJU (Peneranangan Jalan Umum).

**f. Informan S**

Observasi dilakukan di kantor BAPEMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakatan) Kabupaten Jember. Keadaan saat dilakukan penelitian situasi di dalam kantor saat itu keadaanya sepi karean punya ruangan sendiri. Perlengkapan yang ada di ruang sekertaris BAPEMAS Kabupaten Jember ada beberapa perangkat, yaitu meja, kursi kerja, dan almari. Sedangkan diatas

meja kerja informan terdapat beberapa tumpukan buku dan ada perlengkapan yang lain juga seperti komputer dan printer. Informan berusia 46 tahun bekerja BAPEMAS sebagai Sekertaris BAPEMAS .

**g. Informan AM**

Observasi dilakukan di kantor DISPRINDAG kabupaten Jember. Keadaan saat dilakukan penelitian situasi di dalam kantor sangat ramai tapi informan mempunyai ruangan sendiri. Perlengkapan yang ada di ruangan kerja informan terdapat beberapa perangkat seperti almari, meja dan kursi. Sedangkan di atas meja kerja informan terdapat beberapa tumpukan buku, kertas-kertas, komputer dan printer. Informan berusia 32 tahun bekerja di DISPRINDAG sebagai Sekertaris.

**h. Informan PM**

Observasi dilakukan di kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan(DISPENDUK ) Kabupaten Jember. Keadaan saat dilakukan penelitian situasi di dalam kantor saat itu bising karena dalam ruangan terdapat banyak karyawan. Tapi informan mempunyai ruangan sendiri. Perlengkapan yang ada di dalam ruangan kerja informan seperti perangkat meja, kursi, kulkas, almari, dan kursi sofa. Sedangkan Di atas meja kerja informan terdapat beberapa peralatan kerja seperti kertas-kertas, computer dan printer. Informan berusia 49 tahun bekerja DISPENDUK sebagai Kepala Bagian Catatan Sipil.

**i. Informan RS**

Observasi dilakukan di kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan(DISPENDUK)Kabupaten Jember. Keadaan saat dilakukan penelitian situasi di dalam kantor saat itu bising karena dalam ruangan terdapat banyak karyawan. Tapi informan mempunyai ruangan sendiri. Perlengkapan yang ada di ruangan DISPENDUK Kabupaten Jember adalah beberapa perangkat meja dan kursi kerja pegawai yang berjejer dan terkesan rapi. Sedangkan perlengkapan yang ada didalam ruangan informan ada

beberapa perangkat seperti, kursi sofa, kulkas, kursi kerja dan meja. Di atas meja kerja informan terdapat beberapa perangkat lain, kertas-kertas, komputer dan printer. Informan berusia 42 tahun bekerja DISPENDUK Sebagai Kepala Bagian Kependudukan.

**j. Informan M**

Berdasarkan observasi yang dilakukan di ruang Kerja M dibalai Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dilihat dari ruangan informan terdapat banyak perlengkapan yang ada di ruang kerja saat itu adalah satu meja, tempat berkas-berkas, kursi Sofa dan dua kursi plastik informan berusia 39 tahun merupakan kepala Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Saat dikunjungi informan terlihat agak sibuk karena banyak pekerjaannya. Namun informan dengan senang hati menerima dan mempersilahkan penulis untuk berbincang-bincang. Saat berkunjung beliau lagi santai, sedangkan saat bicaraan tentang program dialog solutif informan selalu tampak ramah.

**k. Informan IS**

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Rumah IS Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Rumah informan berlantaikan kramik warna putih. Perlengkapan yang ada di ruang tamu informan antara lain dua kursi sofa. Informan berusia 40 tahun merupakan Tokoh Masyarakat Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Ketika berkunjung informan tidak tampak canggung, dan ramah. Informan juga selalu menunjukkan ekspresi senang dan bersemangat menceritakan seputar program dialog solutif. Observasi dilakukan pada siang hari.

**l. Informan MN**

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Rumah MN Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Rumah informan berlantaikan kramik warna merah. Perlengkapan yang ada di ruang tamu informan antara lain dua kursi sofa dan lemari kaca. Ciri-ciri informan berusia 24 tahun merupakan

Tokoh Pemuda Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, saat berkunjung informan sangat ramah. Informan juga selalu menunjukkan ekspresi senang dan bersemangat menceritakan seputar program dialog solutif. Observasi dilakukan pada sore hari.

### 3.5.2 Wawancara

Wawancara menurut Hadi (2002:192) adalah suatu proses tanya jawab secara fisik, dimana yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya dan merupakan alat pengumpul informasi yang langsung tentang berbagai jenis data yang terkait. Untuk itu penulis dalam hal ini bertindak sebagai pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan pada informan agar mendapatkan informasi dari informan tersebut. Teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara secara mendalam (*in depth interview*), sehingga wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh peneliti kepada informan. Namun lebih memberikan keleluasaan pada informan untuk memberikan informasi.

Bungin (2007:108) dijelaskan bahwa metode wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbedadengan wawancara pada umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan metodewawancara lainnya adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian, hal manakondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara pada umumnya.

Dalam penelitian terdapat pokok-pokok atau garis besar pertanyaan yang akan dilontarkan dan dijadikan pedoman dalam wawancara (*interview guide*), informan juga dapat memberikan asumsi dan menafsirkan sesuatu seputar permasalahan yang dihadirkan. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:56), "*interview guide* adalah semacam rambu-rambu yang dipergunakan untuk mengarahkan seorang peneliti agar tidak terjebak mencari data di luar permasalahan dan tujuan penelitiannya." *Interview guide* umumnya berisikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan ingin

memperoleh jawaban yang mendalam. Rangkaian pertanyaan yang tersusun dalam *interview guide* tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban yang sudah ditemukan terlebih dahulu, tetapi jawaban yang dikehendaki justru seluas, serinci, dan selengkap mungkin.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, wawancara dilakukan oleh peneliti secara terbuka dan terarah dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*), berhadap-hadapan, secara mendalam (*in-depth interview*) serta dalam keadaan suasana yang mendukung seperti waktu yang cukup untuk dilaksanakannya proses wawancara. Berdasarkan penjelasan mengenai teknik wawancara yang digunakan penulis berikut akan dijelaskan terkait dengan proses wawancara sebagai berikut:

**a. Informan ZA**

Wawancara dengan informan ZA dilakukan pada hari senin tanggal 02 Maret 2015 pada pukul 09.00 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan ZA menceritakan latar belakang program, gambaran awal program, peran kepala Humas dalam pelaksanaan program dialog solutif, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, upaya penanganan hambatan program, tanggapan masyarakat tentang program, hal yang sudah di capai pada waktu program dialog, dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, dampak program dalam peningkatan pembangunan. Wawancara berlangsung selama 2 jam.

**b. Informan IT**

Wawancara dengan informan IT dilakukan pada hari selasa tanggal 03 Maret 2015 pada pukul 09.10 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat

wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan IT menceritakan latar belakang program, gambaran awal program, sub bagian kelembagaan dalam pelaksanaan program dialog solutif, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, upaya penanganan hambatan program, tanggapan masyarakat tentang program, hal yang sudah di capai pada waktu program dialog, dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, dampak program dalam peningkatan pembangunan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

**c. Informan BI**

Wawancara dengan informan BI dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 pada pukul 09.10 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan BI menceritakan latar belakang program, gambaran awal program, Sub Bagan Dokumentasi Dan Informas dalam pelaksanaan program dialog solutif, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, upaya penanganan hambatan program, tanggapan masyarakat tentang program, hal yang sudah di capai pada waktu program dialog, dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, dampak program dalam peningkatan pembangunan. Wawancara berlangsung selama 1 jam lebih.

**d. Informan A**

Wawancara dengan informan A dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 pada pukul 11.45 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada

SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan BI menceritakan latar belakang program, gambaran awal program, peran Sub Bagian Kerjasama Media dalam pelaksanaan program dialog solutif, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program, upaya penanganan hambatan program, tanggapan masyarakat tentang program, hal yang sudah di capai pada waktu program dialog, dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, dampak program dalam peningkatan pembangunan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

**e. Informan JS**

Wawancara dengan informan JS dilakukan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 pada pukul 09.10 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan JS menceritakan peran pelaksanaan program, pertanyaan yang berhubungan dengan program, solusi yang sudah dilakukan, kendala pelaksanaan program dialog solutif, solusi terkait dengan kendala yang ada dalam pelaksanaan dialog, permasalahan yang muncul dari masyarakat, manfaat untuk lembaga dan kesejahteraan masyarakat, rencana kerja yang mendasari program, wawancara berlangsung selama 1 jam 45 menit.

**f. Informan AM**

Wawancara dengan informan AM dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 pada pukul 09.25 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan

santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan AM menceritakan peran pelaksanaan program, pertanyaan yang berhubungan dengan program, solusi yang sudah dilakukan, kendala pelaksanaan program dialog solutif, solusi terkait dengan kendala yang ada dalam pelaksanaan dialog, permasalahan yang muncul dari masyarakat, manfaat untuk lembaga dan kesejahteraan masyarakat, wawancara berlangsung selama 1 jam 30 menit.

**g. Informan S**

Wawancara dengan informan S dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 pada pukul 10.00 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan S menceritakan peran pelaksanaan program, pertanyaan yang berhubungan dengan program, solusi yang sudah dilakukan, kendala pelaksanaan program dialog solutif, solusi terkait dengan kendala yang ada dalam pelaksanaan dialog, permasalahan yang muncul dari masyarakat, manfaat untuk lembaga dan kesejahteraan masyarakat, wawancara berlangsung selama 1 jam 10 menit.

**h. Informan RS**

Wawancara dengan informan RS dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 pada pukul 09.00 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lainnya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan RS menceritakan peran pelaksanaan program, pertanyaan yang berhubungan dengan program, solusi yang sudah

dilakukan, kendala pelaksanaan program dialog solutif, solusi terkait dengan kendala yang ada dalam pelaksanaan dialog, permasalahan yang muncul dari masyarakat, manfaat untuk lembaga dan kesejahteraan masyarakat, wawancara berlangsung selama 2 jam.

**i. Informan PM**

Wawancara dengan informan PM dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 pada pukul 09.30 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada SKPD yang lain. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara terhadap informan S menceritakan peran pelaksanaan program, pertanyaan yang berhubungan dengan program, solusi yang sudah dilakukan, kendala pelaksanaan program dialog solutif, solusi terkait dengan kendala yang ada dalam pelaksanaan dialog, permasalahan yang muncul dari masyarakat, manfaat untuk lembaga dan kesejahteraan masyarakat, wawancara berlangsung selama 1 jam 30 menit.

**j. Informan M**

Wawancara dengan informan M dilakukan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 pada pukul 09.00 WIB, di ruang kerja informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada perangkat desa yang lain. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara menjelaskan program dialog solutif, berpartisipasi dalam kegiatan program, partisipasi yang diberikan, proses penyampaian partisipasi, pelaksanaan program dialog solutif, hambatan pada saat pelaksanaan, manfaat kegiatan, dampak kegiatan, sudah sesuai dengan keinginan apa belum,

harapan dengan adanya program ini. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

**k. Informan IS**

Wawancara dengan informan IS dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 pada pukul 13.00 WIB, di rumah informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada keluarganya yang lain. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara menjelaskan program dialog solutif, berpartisipasi dalam kegiatan program, partisipasi yang diberikan, proses penyampaian partisipasi, pelaksanaan program dialog solutif, hambatan pada saat pelaksanaan, manfaat kegiatan, dampak kegiatan, sudah sesuai dengan keinginan apa belum, harapan dengan adanya program ini. Wawancara berlangsung selama 2 jam.

**l. Informan MN**

Wawancara dengan informan S dilakukan pada hari Minggu 15 tanggal maret 2015 pada pukul 16.00 WIB, di rumah informan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Situasi pada saat wawancara saat itu sangat tenang karena informan hanya sendirian tidak ada keluarganya. Proses wawancara dengan informan berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan lancar oleh informan. Hasil wawancara menjelaskan program dialog solutif, berpartisipasi dalam kegiatan program, partisipasi yang diberikan, proses penyampaian partisipasi, pelaksanaan program dialog solutif, hambatan pada saat pelaksanaan, manfaat kegiatan, dampak kegiatan, sudah sesuai dengan keinginan apa belum, harapan dengan adanya program ini. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

### 3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini dengan menelaah berbagai literatur, dokumen-dokumen yang resmi, mencatat dan sebagainya yang sekiranya mampu menunjang dan menjelaskan data-data lapangan yang berhubungan dengan bahasa penelitian. Sebab pengambilan data tersebut melalui dokumen akan dikumpulkan oleh penulis dari tempat penelitian dan lembaga lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Menurut Faisal (1990:81), yang disebut dokumen (*documents*) ialah semua jenis rekaman/catatan sekunder lainnya, seperti surat-surat, memo/nota, pidato-pidato, buku harian, foto-foto, kliping berita koran, hasil-hasil penelitian, agenda kegiatan. Bungin (2007:122) menjelaskan, “Bahan dokumen secara eksplisit berbeda dengan literatur, tetapi kemudian perbedaan antara keduanya hanya dapat dibedakan secara gradual. Literatur adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala. Sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter”.

Dokumentasi untuk memperoleh data yang akan berguna dalam memberikan wawasan dan pemahaman dasar kerangka pemikiran ataupun definisi konseptual serta pendapat para pakar, baik diambil dari buku, internet, bahan elektronik dan lain sebagainya, khususnya tentang implementasi program, kesejahteraan sosial, kebijakan social, komunikasi partisipatif dan program dialog solutif , selain itu juga dilakukan telaah dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksana, dokumen, laporan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian serta foto-foto dimana menggambarkan atau membantu dalam melihat fenomena khususnya terkait dengan program dialog solutif di Kabupaten Jember pada saat observasi dan wawancara.

### 3.6 Teknik analisis data

Analisis data merupakan pemaknaan atau penafsiran data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, baik catatan lapangan, hasil wawancara dan data dokumentasi. Dalam Sugiono(2010:88) adalah:” Analisis data dalam proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain". Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiono (2010:91)" mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam penelitian ini menggunakan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data mentah yang diperoleh baik dari *study* keperpustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan. Analisis dilakukan dengan bersamaan proses data. Banyak cara untuk memproses data agar terdapat nilai validitas antara lain adalah transkrip data. Jadi hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di ubah menjadi tulisan verbatim, setelah itu penulis melakukan pembuatan *koding* dari transkrip yang telah dibuat. Untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh penulis akan mengkategorisasikan data dengan cara mengikat konsep-konsep kunci dalam suatu kategori yang sama. Dari data yang telah disederhanakan maka penulis menarik kesimpulan sementara, kesimpulan tersebut harus dijaga agar tidak tercampur aduk dengan pemikiran dan penafsiran penulis.

Sebelum mendapatkan kesimpulan akhir penulis akan melakukan *cross check* terlebih dahulu dari data-data yang telah diperoleh penulis, terakhir adalah penyimpulan data. Menurut Irawan (2006 :76-80), ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif yaitu:

- a. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Dalam melakukan tahapan ini, pengumpulan data mentah didapatkan penulis dari *field note*(catatan lapangan) mengenai informan dan informan tambahan, keadaan kantor informan, keadaan rumah informan. Selain itu pengumpulan data mentah juga didapatkan dari rekaman wawancara yang menggunakan

handphone dengan informan pokok maupun informan sekunder, serta hasil foto-foto yang diambil menggunakan camera *hand phone* yaitu foto dengan informan.

b. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan peneliti ke dalam bentuk tertulis (apakah itu berasal dari *recorder* yang ada didalam *handphone* atau catatan tulisan tangan) yang peneliti ketik pun persis seperti apa adanya (*verbatim*) dan tidak dicampur aduk dengan pendapat dan pikiran peneliti.

c. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, membaca pelan-pelan dengan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu peneliti nantinya akan menemukan hal-hal penting ini oleh peneliti akan diambil "kata kunci" nya. Dan kata kunci ini akan diberi kode.

d. Kategorisasi

Pada tahap kategorisasi data ini, penulis mulai mengkategorikan data-data yang sebelumnya diperoleh dari koding dari informan dengan menyederhanakan lagi data-data menurut kategorisasi masing-masing yang sudah ditentukan oleh penulis yaitu: tentang implementasi, faktor dan dampak program dialog solutif dalam peningkatan masyarakat kabupaten Jember.

e. Penyimpulan Data Awal

Pada tahap ini, penulisan membuat kesimpulan sementara mengenai berbagai data-data yang diperoleh dilapangan berupa program gambaran dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Jember.

f. Triangulasi

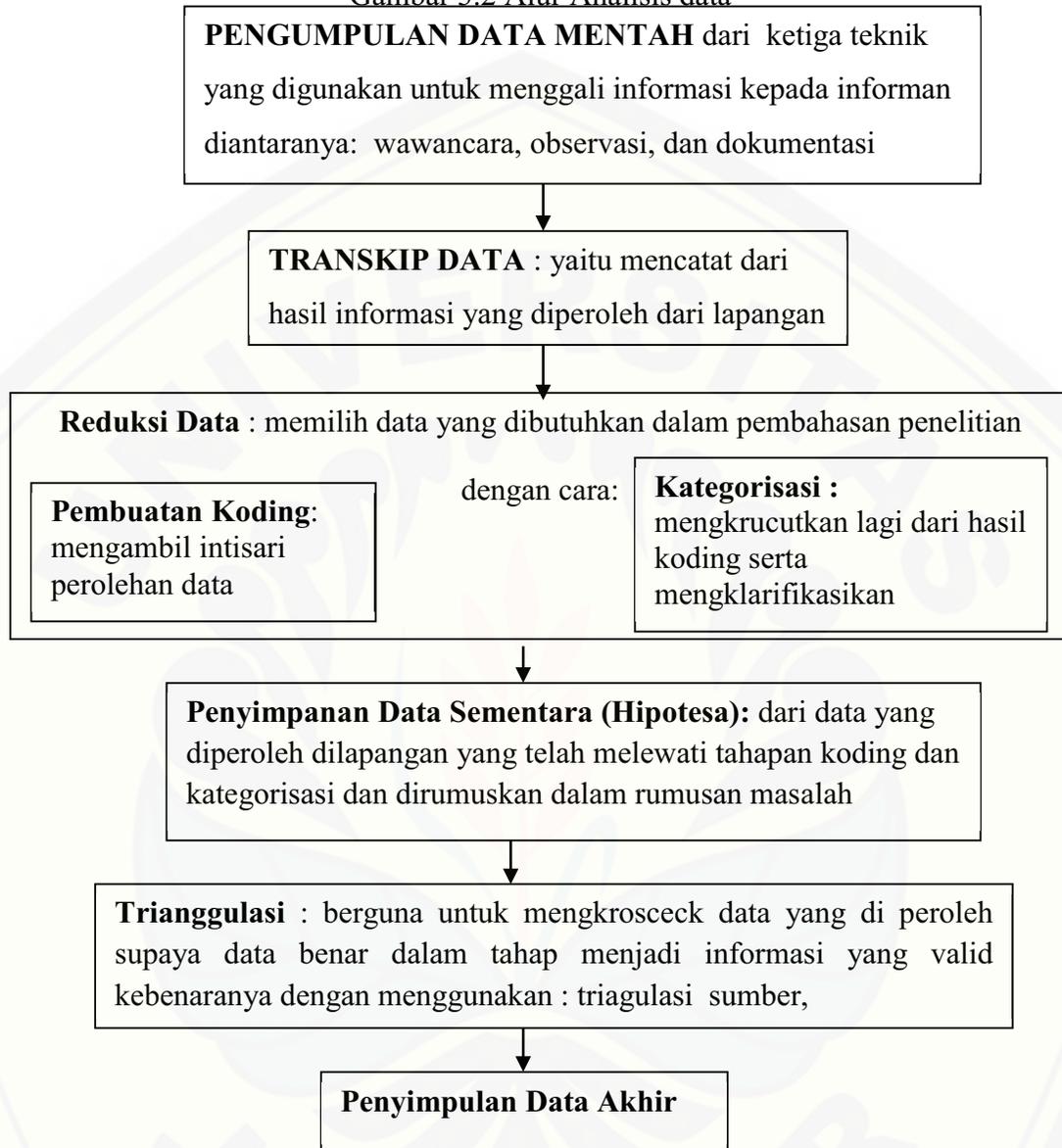
Triangulasi adalah proses *check* dan *rescek* antara satu sumber data dengan sumber lainya atau kroscek dari sat tekhnik pada tekhnik lainya.

Dalam proses ini beberapa kemungkinan terjadi, pertama satu sumber senada(*koheren*) dengan sumber lain, kedua sumber satu berbeda dengan sumber data lainnya, akan tetapi tidak harus bertentangan, ketiga satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya. Data yang diperoleh dari teknik wawancara dengan teknik observasi serta dokumentasi tidak koheren atau bahkan sebaliknya. Dalam proses triangulasi data, penulis mengkoscek sumber serta teknik yang diperoleh dari hasil wawancara antara masing-masing informan. Penulis juga mengkosceck data hasil perolehan dengan beberapa tekhnik diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi berupa pemahaman mereka terhadap program dialog solutif.

g. Penyimpulan Data Akhir

Ada kemungkinan peneliti akan mengulangi langkah satu sama langkah enam berkali-kali, sebelum peneliti mengambil kesimpulanakhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir diambil yakni ketika penulis merasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti tidaktumpang tindih data. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan akhir yang dirangkum dari proses keseluruhan analisis data, penulis membuat kesimpulan akhir dengan mengamati hasil data-data yang diperoleh dari informan serta data yang diperoleh dilapangan. Adapun penjelasan lengkapnya dapat dilihat dalam alur sekema pada gambar berikut ini.

Gambar 3.2 Alur Analisis data



Sumber : Irawan, 2006:7, diolah penulis 2015

### 3.7 Keabsahan Data

Metode keabsahan data diperlukan dalam penelitian social, karena dalam penelitian yang bersifat empiri, informan yang diberikan maupun prilaku masing-masing informan memiliki makna, sehingga tidak langsung diterima begitu saja.

Dalam penelitian keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keabsahan (*validitas*). Pengukuran keabsahan dalam peneliti ini menggunakan triangulasi, sumber, dan teori berarti membanding dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Setidak-tidaknya ada empat kriteria utama guna menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu standart kredibilitas, standart transferabilitas, standart dependabilitas dan standart konfirmabilitas. (dalam Sugiono 2010:121)

a. Standart kredibilitas

Diperlukan supaya hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh para pembaca, juga dapat setuju kebenarannya oleh partisipan yang diteliti. Adapun tehnik yang digunakan untuk mencapai kredibilitas diantara lain;

1. Memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian tidak dilakukan dengan waktu singkat atau tergesa-gesa, karena akan mempengaruhi terhadap perolehan data nantinya. Sebelumnya penelitian berlangsung peneliti menjalin relasi dengan implementor terlebih dahulu untuk menjalani relasi dengan Pemda bagian Humas Kabupaten Jember, guna mempermudah dalam memperoleh data serta mendapatkan informasi terkait implementor program;
2. Ketekunan pengamatan dengan sungguh dalam jangka waktu tertentu, sehingga informasi yang diperoleh dapat semakin natural dan mendalam. Observasi dilakukan dua kali dalam penelitian ini, pertama adalah melakukan observasi tidak langsung di pemda bagian humas Kabupaten Jember mengenai program dialog solutif, pada tahun 2012peneliti tertarik untuk meneliti program dialog solutif Bupati. Sehingga berlanjut pada tahun 2013 peneliti dengan mengangkat tema dengan lokasi penelitian di Pemda Kabupaten Jember khususnya bagian Humas. Setidaknya penulis melakukan observasi langsung yang dilakukan selama tiga kali, tahap pertama sebelum seminar proposal berlangsung, tepatnya pada tanggal 3

Desember 2014 tahap kedua pada masa penelitian mulai bulan Februari sampai bulan Maret 2015. Tahap terakhir yakni kroscek data yang telah disaji dalam uraian hasil penelitian bulan April 2015;

b. Melakukan triangulasi digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan atau pembanding terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi menurut Sugiono yang disebut triangulasi (2010:125) adalah:” pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan dan mengecek balik data, dan informasi yang diperoleh saat penelitian berlangsung ditempat penelitian yang telah ditentukan peneliti.

c. Standart tranferbilias

Standart ini sesungguhnya merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab selain oleh pembaca. Penentuan standart transferbilias tergantung dari pembaca dalam menilai kejelasan hasil. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti harus membuat hasil terutama menjadi sebuah narasi yang jelas, detail dan sistematis, sehingga pembaca mudah untuk memahami serta apa yang diinformasikan dalam narasi tersebut juga dapat dipercaya. Serta memperkaya kasus dalam mendeskripsikan latar belakang, dan mengecek kesesuaian teori yang digunakan.

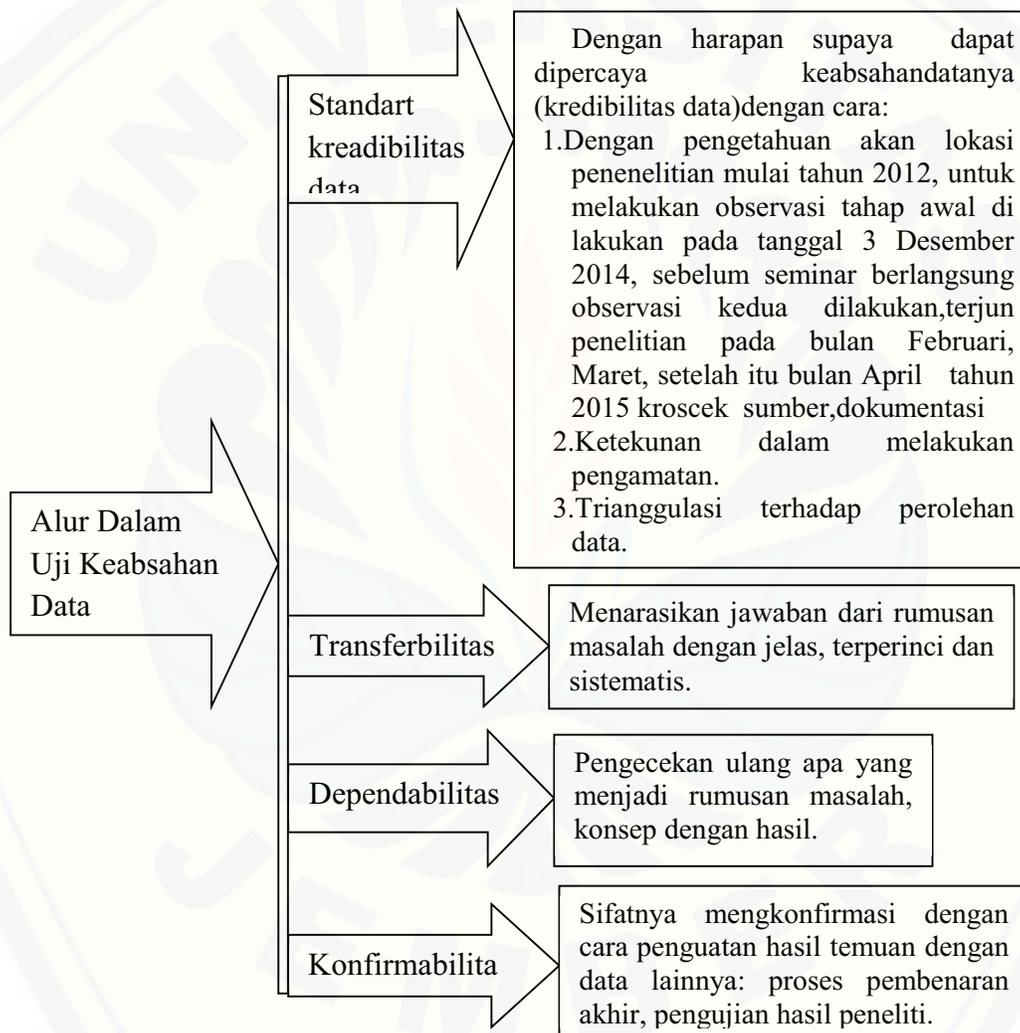
d. Standart dependabilitas

Dependabilitas dapat dipenuhi dengan cara melakukan pengecekan akan salah-benarnya dalam mengkonseptualisasi apa yang diteliti dilapangan yaitu proses pengumpulan data, menginterpretasikan temuan dan melaporkan hasil. Semakin konsisten dalam keseluruhan proses peneliti, maka semakin mereview segenap langkah aktifitas peneliti.

## e. Standart confirmabilitas

Standart ini tidak jauh dari berbeda dengan standart dependabilitas, jadi pelaksanaan dapat dilakukan bersama dalam pengujian hasil kajian. Adapun penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat dalam alur skema pada gambar berikut ini: gambar keabsahan data.

Gambar: 3.3 Alur Keabsahan Data



Sumber : Sugiono 2010, Diolah penulis 2015

## BAB IV. PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Kabupaten Jember

Berdasarkan BPS Kabupaten Jember, diketahui bahwa Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas-batas: Barat Laut-Kabupaten Probolinggo, Utara-Kabupaten Bondowoso, Timur-Kabupaten Banyuwangi, Selatan-Samudra Indonesia dan Barat-Kabupaten Lumajang. Secara administrative Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dan 248 Desa/ kelurahan. Data tersaji dalam luas wilayah (km<sup>2</sup>) yang dirinci menurut klasifikasi lereng dan ketinggian tempat yang di cantumkan pada tabel berikut ini:

Gambar : 4.1 Peta Kabupaten Jember



Sumber: Jember Dalam Angka 2014

Kabupaten Jember mempunyai 31 kecamatan dengan luas wilayah.

**Tabel 4.1 Wilayah Kabupaten Jember**

<b>Luas Wilayah Menurut Kecamatan</b>		
<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah(km2)</b>	<b>Persentase</b>
1. Kencong	65,92	2,00
2. Gumukmas	82,98	2,52
3. Puger	148,99	4,52
4. Wuluhan	137,18	4,17
5. Ambulu	104,56	3,17
6. Tempurejo	524,46	5,92
7. Silo	309,98	9,41
8. Mayang	63,78	1,94
9. Mumbulsari	95,13	2,89
10. Jenggawah	51,02	1,55
11. Ajung	56,61	1,72
12. Rambipuji	52,80	1,60
13. Balung	47,12	1,43
14. Umbulsari	70,52	2,14
15. Semboro	44,43	1,38
16. Jombang	54,30	1,65
17. Sumberbaru	166,37	5,05
18. Tanggul	199,99	6,07
19. Bangsalsari	175,28	5,32
20. Panti	160,71	4,88
21. Sukorambi	60,63	1,84
22. Arjasa	43,75	1,33
23. Pakusari	29,11	0,88
24. Kalisat	53,48	1,62
25. Ledokombo	146,92	4,46
26. Sumberjambe	138,24	4,20
27. Sukowono	44,04	1,34
28. Jelbuk	65,06	1,98
29. Kaliwates	24,94	0,76
30. Sumpalsari	37,05	1,12
31. Patrang	36,99	1,12
<b>Kabupaten Jember</b>	<b>3 293,34</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Jember Dalam Angka , 2013

Berdasarkan tabel 4.1 diatas bahwa Kabupaten Jember memiliki 31 kecamatan dengan luas wilayah Kabupaten Jember 3293,34 (km2). Pelaksanaan

program dialog solutif dilakukan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Sedangkan jumlah Desa/kelurahan/lingkungan, RT dan RW di tabel dibawah ini;

**Table 4.2 Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Dusun/Lingkungan</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
1. Kencong	5	24	123	526
2. Gumukmas	8	24	159	453
3. Puger	12	37	288	658
4. Wuluhan	7	25	126	719
5. Ambulu	7	27	200	641
6. Tempurejo	8	29	109	441
7. Silo	9	41	213	627
8. Mayang	7	24	109	347
9. Mumbulsari	7	26	86	463
10. Jenggawah	8	36	93	524
11. Ajung	7	33	113	491
12. Rambipuji	8	42	150	517
13. Balung	8	27	100	369
14. Umbulsari	10	28	153	450
15. Semboro	6	14	114	326
16. Jombang	6	17	132	393
17. Sumberbaru	10	36	166	599
18. Tanggul	8	24	140	507
19. Bangsalsari	11	41	253	570
20. Panti	7	29	91	423
21. Sukorambi	5	16	78	258
22. Arjasa	6	25	64	249
23. Pakusari	7	26	96	293
24. Kalisat	12	53	152	478
25. Ledokombo	10	38	147	422
26. Sumberjambe	9	58	103	426
27. Sukowono	12	27	142	403
28. Jelbuk	6	42	78	236
29. Kaliwates	7	32	152	490
30. Sumpersari	7	33	152	505
31. Patrang	8	38	119	404
Jumlah	248	972	4 201	14 208

Sumber : Jember Dalam Angka Tahun, 2014

Berdasarkan tabel 4.2 diatas terlihat bahwa Kabupaten Jember memiliki jumlah Desa/kelurahan sebanyak 248, dusun/lingkungan sebanyak 972, jumlah RW sebanyak 4201 dan jumlah RT sebanyak 14208 dalam sumber Jember dalam angka 2014. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Indra Sebagai Koordinator Program Dialog solutif dari Bagian Humas Pemda Jember bahwa, kegiatan bedah potensi Desa dilaksanakan disetiap kecamatan dengan memilih salah satu Desa untuk dijadikan lokasi kegiatan. Setiap Desa dalam satu kecamatan tersebut mendapat kesempatan untuk menyampaikan permasalahan atau potensi yang ada di Desanya masing-masing. Sedangkan dalam kegiatan Temu Karya Rakyat dilaksanakan gabungan tiga kecamatan dan ditempatkan di salah satu kecamatan dengan menyertakan seluruh Desa yang ada dikecamatan-kecamatan tersebut.

#### **4.1.1 Deskripsi penduduk**

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa, suku Madura, dan Pandalungan(JDA, BPS 2013). Sebagian besar beragama Islam selain itu terdapat warga Tionghoa. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pandalungan. Masyarakat Pandalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pandalungan yang masih bertahan sampai sekarang di kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.529.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### 4.1.2 Gambaran Tentang Program Dialog Solutif

Dasar hukum program dialog solutif adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama dikemas dalam program dialog solutif Bupati Jember dengan seluruh lapisan masyarakat yang telah dilaksanakan di beberapa kecamatan di wilayah Jember, telah berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi terbangunnya opini masyarakat yang positif untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan pembangunan “membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama”.

Program dialog solutif ditingkatkan menjadi forum silaturahmi masyarakat antara pemerintah Kabupaten Jember dengan seluruh lapisan masyarakat karena memiliki beberapa keunggulan antara lain, sebagai wahana yang efektif dan efisien dalam menampung, menjaring aspirasi pembangunan guna dijadikan bahan untuk penyusunan, perencanaan program pembangunan berikutnya. Sebagai wahana dan media yang efektif dalam pembinaan terhadap generasi muda serta penyampaian program pembangunan.

Tujuan Program:

1. meningkatkan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai sasaran, pelaksana dan pelaku pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur birokrasi Pamong Praja serta menciptakan suasana kompetitif bagi para pelaku pembangunan dalam rangka membangun masyarakat yang sejahtera, religius dan bermartabat.
3. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Visi Dan Misi Kabupaten Jember

a. Visi

Terwujudnya pemerintah daerah yang demokratis dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

b. Misi

1. Pemberdayaan Ormas, Orsospol, LSM;
2. Pemberdayaan kelompok miskin dan ekonomi daerah;
3. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berdaya tahan;
4. Penjamin kepastian hukum;
5. Mewujudkan aparatur daerah yang profesional.

Dalam program dialog solutif ini langsung dengan masyarakat yang digagas oleh Bupati MZA Djalal itu, dinilai sebagai upaya jemput bola dari Pemkab untuk menyerap aspirasi dengan mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut tidak sedikit yang ditindak lanjuti oleh Pemkab Jember sebagai bagian dari pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Pemkab Jember guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti permasalahan infra struktur jalan, penerangan jalan umum, pertanian, pengairan, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bersarkan pada dokumentasi menunjukkan bahwa penerima manfaat dari program ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember untuk menyalurkan aspirasi secara langsung dan mensukseskan kegiatan pembangunan. Pernyataan dari Informan IT dikuatkan oleh Informan ZA yang mengungkapkan bahwa;

“Kita bisa menyerap informasi dan aspirasi dari masyarakat secara cepat. Jadi otomatis pembangunan akan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran”.(IT Maret 2015)

“Gambaran pelaksanaan itu serap asiprasi, kalau cuma hanya bergantung Musrembang itu keterwakilan masyarakat kan cuma Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) jadi ini diharapkan munculnya dari semua elemen baik itu, dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, RT/RW dan Tim Penggerak PPK mulai tingkat Desa dan kecamatan itu berkumpul, Pak Bupati didampingi oleh Muspida, Muspika semua bersama SKBD terkait ini mendengar langsung apa sih keinginan masyarakat, kalau kebutuhan itu sudah harus ada dan selaku SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) telah mendengar langsung sehingga bisa merealisasikan

ketika anggaran di tahun ini sudah ada. Tapi ketika tidak ada baru anggaran untuk tahun berikutnya atau di masukkan pengajuan Anggaran Pemerintah Daerah APBD. Gambarnya seperti itu, jadi Pak Bupati ingin mengetahui secara langsung, ingin bertatap muka, sekaligus silaturahmi, dengan masyarakat Desa dan ingin berbicara langsung apa aspirasi-aspirasi yang muncul dimasyarakat. Termasuk keberhasilan-keberhasilan juga disitu mengadung unsur publikasikan terkait dengan apa-apa yang telah dihasilkan dialog solutif tidak hanya dialog suara tapi ada ruang-ruang pameran etalase. Jadi potensi-potensi unggulan di wilayah disekitar bisa terekspos, misalnya di wilayah utara ada setral batik di Sumberjambe, kalau di balung ada industry kreatif jadi bisa di siarkan langung lewat media”.(ZA Maret 2015)

Berdasarkan informan IT diatas bahwa pelaksanaan program dialog solutif ini bertujuan untuk menjaring aspirasi yang ada di masyarakat, jadi otomatis pembangunan akan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Dalam keterangan Informan ZA diatas juga di sebutkan alasan kenapa harus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, tidak hanya tergantung pada Musrembang yang dianggap kurang mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Pada dasarnya pembangunan Desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di Desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perDesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Program ini juga bertujuan sebagai wahana silaturahmi antara pihak pemerintah dan masyarakat. Bupati ingin mendekatkan diri pada masyarakat, supaya masyarakat bisa menanyakan dan menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam program dialog solutif ini partisipasi masyarakat sangat di utamakan seperti yang diungkapkan oleh informan BI sebagai berikut;

“Partisipasi masyarakat dalam program dialog solutif ini sangat penting untuk mendukung terselenggaranya program. Karena program ini merupakan forum antara pihak pemerintah dan

masyarakat Kabupaten Jember. Wujud dari partisipasi masyarakat bisa berupa pendapat atau ide, barang atau alat dan tenaga. (BI Maret 2015)

Berdasarkan informan BI diatas bahwa Partisipasi masyarakat berupa pendapat atau ide, barang atau alat dan tenaga. Dalam pelaksanaan program dialog solutif masyarakat bisa menyampaikan pendapat atau ide berupa permasalahan atau solusi mengenai tentang pembangunan yang ada didaerahnya. alat atau barang yang berasal dari masyarakat dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program seperti sound sistem, tenda dan alas tempat duduk. Hal ini sesuai dengan teori partisipasi masyarakat Menurut Rusidi dalam Siregar (2001:21) di (bab 2 hal 13) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:

1. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
4. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

#### **4.1.3 Karakteristik Informan**

Karakteristik Informan adalah identitas yang dimiliki oleh masing-masing informan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui siapa yang menjadi informan di dalam suatu penelitian guna mengetahui latar belakang informan. Penyajian karakteristik dan latar belakang informan diharapkan dapat membantu penulis dalam menjelaskan dan menggambarkan tentang Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember.

Untuk menjawab pertanyaan peneliti maka dilakukan in dept interview yang bertujuan menggali lebih dalam terkait fenomena yang akan diangkat diangkat dalam kajian ini. Informan yang akan dipilih dengan menggunakan *Snowball Sampling*. Berikut ini profil informan;

Tabel 4.3 Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama	JK	Usia	Pekerjaan	Jabatan	Istansi
1	ZA	L	48	PNS	Kepala Bagian Humas	HUMAS
2	IT	L	39	PNS	Sub Bagian Kelembagaan	HUMAS
3	BI	L	42	PNS	Subag Dokumentasi &Informasi	HUMAS
4	A	L	30	PNS	Subag Kerjasama Media	HUMAS
5	JS	L	35	PNS	Kepala Bagian Kebersihan&PJU	PU Cipta Karya
6	S	L	46	PNS	Sekertaris	BAPEMAS
7	AM	L	32	PNS	Sekertaris	DISPRINDAG
8	RS	P	42	PNS	Kabit Kependudukan	DISPENDUK
9	PM	L	49	PNS	Kabit Pencatatan Sipil	DISPENDUK
10	M	L	39	Perangkat Desa	Kepala Desa	Balai Desa
11	IS	L	40	Wiraswasta	Tokoh Masyarakat	-
12	MN	L	24	Wiraswasta	Tokoh Pemuda	-

Sumber: data primer, 2015

Pada saat pelaksanaan program dialog solutif ZA sebagai ketua pelaksana yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan bertanggung jawab secara umum atas pelaksana kegiatan. IT sebagai sekertaris bertugas membantu pelaksanaan tugas dilapangan dan administrasi serta melaporkan hasil kegiatan. BI dan A sebagai anggota yang mempunyai tugas membantu mempersiapkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan administrasi guna memperlancar terselenggaranya kegiatan, membantu secara teknis di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan membantu administrasi pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. JS, S, AM, RS, dan PM adalah perwakilan dari dinas-dinas dan instansi-istansi yang menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai program yang ada di instansi masing-masing. M, IS, dan MN adalah perwakilan dari masyarakat yang pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan dialog solutif.

#### **4.2 Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama, yang dikemas dalam Program Dialog solutif dalam hal ini mempunyai dua kegiatan yaitu bedah potensi Desa dan temu karya rakyat dengan tujuan untuk peningkatan pembangunan daerah. Kegiatan bedah potensi Desa dimulai pada tanggal 21 Februari 2006 yang bertempat dikecamatan Umbulsari. Dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa, masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya. Dalam kegiatan bedah potensi Desa tersebut beberapa Desa dalam satu kecamatan berkumpul jadi satu untuk menyampaikan permasalahan yang ada diDesanya maupun memamerkan potensi-potensi yang ada diDesanya masing-masing. Untuk putaran terakhir dilaksanakan di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa pada tanggal 22 Juli 2008. Dilanjutkan dengan kegiatan Temu Karya Rakyat (TKR) pada tanggal 22 Maret 2009 yang dimulai dari Kecamatan Tanggul. Kegiatan temu karya rakyat ini dilaksanakan 1 tahun 3 kali dengan gabungan 3 kecamatan. Temu karya rakyat pernah berhenti pada tahun 2011 dan mulai dilanjutkan lagi pada tahun 2012. Kegiatan tersebut menjadi media evaluasi bagi pembangunan di Kabupaten Jember yang mempertemukan Bupati, Pejabat Teras Pemkab dan masyarakat secara langsung. Untuk tahun 2013 -2014 kembali dilaksanakan kegiatan bedah potensi Desa dengan konsep kegiatan dilaksanakan gabungan tiga kecamatan. Pada Tahun 2015 ini akan dilakukan 3 priode dengan waktu 4 bulan sekali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan IT berikut:

“Ingin mempercepat proses penyerapan informasi ke masyarakat langsung, oleh bapak Bupati karena ingin mengetahui aspirasi tentang pembangunan daerah, mensinkronisasi informasi dari masyarakat dan jajaran pemerintah apakah benar informasi tersebut. Menyelaraskan informasi antara masyarakat dan pemerintah untuk

pembanguna masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam arti pembanguna masyarakat”.(IT 03 Maret 2015)  
Pernyataan dari Informan ZA dikuatkan oleh Informan BI yang mengungkapkan bahwa;

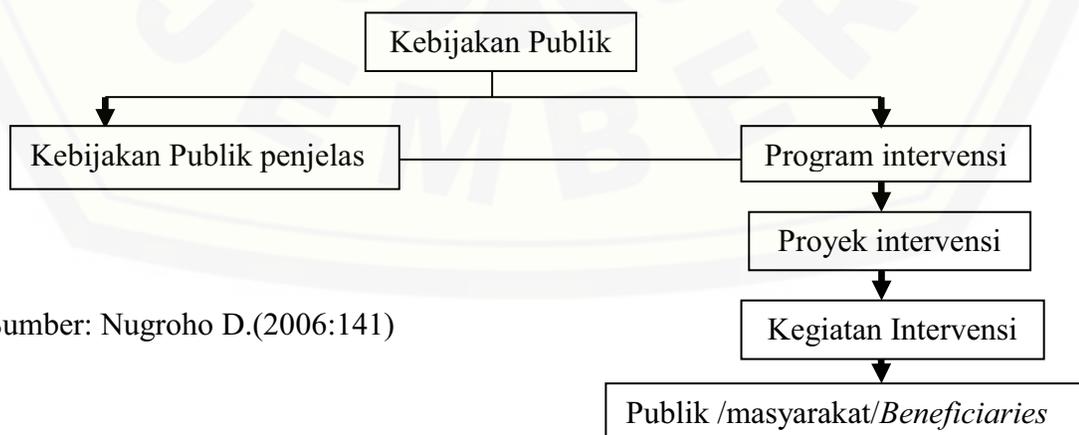
“Bupati dan SKPD duduk bersama untuk mendengarkan apa yang diaspirasi masyarakat. Dan memberikan solusi terkait dengan beberapa permasalahan yang berkembang di masyarakat”.

(ZA Maret 2015)

Penjelasan informan IT di atas bahwa program dialog solutif ini untuk mempercepat proses penyerapan informasi kemasyarakat langsung oleh pak Bupati karena ingin mengetahui aspirasi tentang pembangunan daerah. Diungkapkan juga oleh informan ZA diatas bahwa dalam program dialog solutif ini Bupati dan SKPD duduk bersama untuk mendengarkan apa yang diaspirasikan masyarakat. Dan memberikan solusi terkait dengan beberapa permasalahan berkembang dimasyarakat.

Pembahasan tentang implementasi tidak terlepas dari konsep program, karena Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang berarti bahwa program merupakan ranah dimana kebijakan dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Nugroho D. (2006:141) dalam (bab 2 hal 20) bahwa “Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Alur yang lebih jelas dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

Gambar : 2.1 Rangkaian dalam implementasi kebijakan



Sumber: Nugroho D.(2006:141)

Kebijakan adalah merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh personal/individu pejabat yang berwenang. Hal ini sebenarnya menyangkut suatu dimensi yang sangat luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu yang ada dalam suatu komunitas dalam masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember melibatkan masyarakat supaya kebijakan yang dibuat pro rakyat.

Menurut Akib dan Tarigan (2000: 12) dalam buku Korten (bab 2 hal 24) menggambarkan model ini berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Dengan memahami model-model Implementasi pada dasarnya dapat dibuat pemetaan model-model Implementasi dalam dua jenis pemilahan menurut Pulz dan Treib dalam Agung (2011:15) dalam (bab 2 hal 25) yaitu pertama adalah Implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*Top Down*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom up*), atau pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentives*). Model

mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa dalam Negara. Sebaliknya “*bottom up*” bermakna meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah atau swasta, namun pelaksanaannya oleh rakyat atau target sasaran. Diantara dua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah (pembuat kebijakan) dan masyarakat (target sasaran). Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*).

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan empat tahap yaitu tahap persiapan, Pelaksanaan, evaluasi dan terminasi yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan suatu program. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan program. sehingga program dapat berjalan lancar dan tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan program dialog solutif kita biasanya mempersiapkan petugas dan mempersiapkan lapangan. Untuk persiapan petugas biasa kita mengadakan rapat koordinasi bagian Humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Untuk persiapan lapangan yang dipersiapkan biasanya itu lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program”.

(ZA Maret 2015)

Senada dengan ungkapan IT sebagai berikut;

“Untuk persiapan pelaksanaan program dialog solutif ini pihak humas mempersiapkan petugas dan mempersiapkan lapangan supaya pelaksanaan program berjalan dengan lancar. karena kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dan SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah)di Kabupaten Jember”. (IT Maret 2015)

Dan diungkapkan juga oleh informan BI sebagai berikut;

“Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program dialog solutif biasanya mempersiapkan petugas dan mempersiapkan lapangan supaya pelaksanaan program dialog solutif ini bisa berjalan dengan lancar”. (BI Maret 2015)

Berdasarkan penjelasan informan ZA, IT dan BI diatas bahwa persiapan pelaksanaan program dialog solutif ini meliputi persiapan petugas dan persiapan dilapangan. Untuk persiapan persiapan pentugas yaitu dilakukannya rapat koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Sedangkan persiapan lapangan yaitu penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program. Supaya pelaksanaan program bisa berjalan lancar karena dalam pelaksanaan program ini diikuti oleh masyarakat dan SKPD di Kabupaten jember.

Persiapan Program menurut menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) di (bab 2 hal 26) bahwa Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas. Tahap persiapan meliputi persiapan petugas dan persiapan dilapangan.

#### **4.2.1.1 Persiapan Petugas**

Dalam melaksanakan kegiatan Petugas Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama yang dikemas dalam proram dialog solutif yang ditetapkan dalam surat salinan keputusan sekertaris Kabupaten Jember;

Memutuskan:

Kesatu: Petugas kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama (Program Dialog Solutif ) Kabupaten Jember 2006 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dalam keputusan ini

Kedua: Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum keputusan ini memiliki tugas :

1. Penanggung jawab mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dialog solutif.
2. Ketua mempunyai tugas:
  - a. Merencanakan, menkoordinasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program dialog solutif

- b. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan program
  3. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas lapangan administrasi serta melaporkan hasil pelaksanaan program.
  4. Anggota mempunyai bertugas:
    - a. Membantu persiapan pelaksanaan program lapangan dan administrasi guna memperlancar terselenggaranya pelaksanaan program dialog solutif;
    - b. Membantu secara teknis lapangan pada saat pelaksanaan program sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar;
    - c. Membantu administrasi pembuatan laporan hasil pelaksanaan program.
- Keempat: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jember pada Pos Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Kabupaten Jember.

**Gambar : 4.2 Struktur Pelaksana Program**



Sumber : Humas Pemda 2015

Penanggung jawab pelaksana program dialog solutif adalah Asisten Administrasi Sekretaris Kabupaten Jember. Ketua pelaksana program dialog solutif Kepala Bagian Humas Kabupaten Jember. Sekretaris pelaksana program dialog solutif Kasubbag, Hubungan Kelembagaan bagian Humas Kabupaten Jember. Anggota pelaksana program dialog solutif meliputi; Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Kasubbag Kerjasama Media, 4 orang staf Hubungan Kelembagaan, 2 orang staf kerjasama media dan 2 orang staf dokumentasi dan informasi bagian Humas Sekretaris Kabupaten Jember.

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari salinan keputusan sekretaris Kabupaten Jember nomor 188.4/13/SEKKAB/012/2006. Tentang petugas penyebar

luasan informasi penyelenggara pemerintah daerah melalui potret membangun Desa menata kota untuk kemakmuran bersama (Program Dialog Solutif). Seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut;

“Dalam persiapan petugas biasanya kami mengadakan rapat koordinasi bagian humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif bisa mempersiapkan tugasnya masing-masing”.(ZA Maret 2015)

Begitu juga diungkapkan oleh informan BI sebagai berikut;

“Persiapan yang dilakukan oleh petugas sebelum dilaksanakan program dialog solutif biasanya rapat koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif sudah tahu tugas masing-masing dan dalam pelaksanaan program berjalan dengan lancar”.

( BI Maret 2015)

Dan senada diungkapkan oleh informan A sebagai berikut;

“Sebelum Pelaksanaan program kami diajak kepala bagian Humas rapat dan pembagian peran dalam pelaksanaan program dialog solutif. Supaya pada waktu pelaksanaan program bisa berjalan dengan lancar dan semua petugas bisa memposisikan tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan program dialog solutif”.

(A maret 2015)

Berdasarkan informan ZA, BI da A diatas bahwa persiapan petugas dilakukan oleh bagian humas yang meliputi rapat koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program dialog solutif. Jadi pada waktu pelaksanaan program sudah tahu tugas masing-masing. Supaya untuk kelancaran pelaksanaan program dialog solutif. Persiapan sebelum melaksanakan program dialog solutif yaitu rapat koordinasi bagian humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program dialog solutif seperti yang dijelaskan sebagai berikut;

#### **4.2.1.1.1 Rapat Koordinasi Bagian Humas**

Sebelum jalannya implementasi program, Persiapan sangat diperlukan bagi kelancaran program. Dengan kegiatan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan perencanaan. Ungkapan informan ZA sebagai berikut:

“Dari pihak Humas mengadakan rapat koordinasi dengan Kasubbag (kepala Sub Bagian) yang ada di Humas. Setelah diadakannya rapat

saya selaku kepala Humas memberikan mandat kepada Bidang dokumentasi dan informasi untuk menginformasikan kepada kepala dinas-dinas supaya mendukung pelaksanaan program dialog solutif “(ZA Maret 2015)

Penjelasan serupa diungkapkan juga oleh informan IT dan dikuatkan oleh BI sebagai berikut:

“Jadi sebelum pelaksanaan program dialog solutif kami bagian Humas melakukan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. Dan untuk menginformasikan bahwa pelaksanaan program dialog solutif akan segera dilaksanakan karena anggaran yang kita tetapkan sudah turun. Setelah itu kasubbag dokumentasi dan Informasi Humas memberikan informasi kepada pihak dinas-dinas untuk persiapan petugas yang nantinya akan ikut atau berpartisipasi dalam program dialog solutif kalau kepala instansi tidak bisa mengikuti. (IT Maret 2015)

“Biasanya sebelum pelaksanaan program saya mewakili kasubbag dokumentasi dan informasi mengikuti rapat persiapan program dialog solutif. Setelah itu saya memberi tahu kepada anggota saya untuk menginformasikan kepada kepala dinas-dinas dan kepala instansi-instansi bahwa pelaksanaan program dialog solutif akan segera dilaksanakan. Jadi semua pihak yang terkait mempersiapkan diri baik itu kepala dinas dan kepala instansi ataupun perwakilannya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat”.

( BI MAret 2015)

Seperti juga yang diungkapkan oleh informan JS sebagai berikut;

“Sebelum pelaksanaan program dialog solutif biasanya diadakan rapat koordinasi di Humas dan saya mewakili Kasubbag kerjasama media. Setelah saya mengikuti rapat koordinasi tersebut biasanya langsung memberi tahu kepada anggota saya bahwa akan ada pelaksanaan program dialog solutif jadi kami langsung mempersiapkan untuk menghubungkan kedia-media atau berita yang ada di kabupaten Jember untuk memberitahu masyarakat kalau akan diadakan pelaksanaan program dialog solutif sekaligus untuk meliput ”. (A Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA diatas dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan rapat koordinasi bagian Humas Pemda Jember. Setelah diadakannya rapat Kepala Bagian Humas menugaskan kasubbag dokumentasi dan informasi untuk memberikan informasi kepada seluruh kepala dinas-dinas yang ada di kabupaten Jember untuk mendukung pelaksanaan program dialog solutif.

Ditambahkan oleh informan IT diatas dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan menginformasikan bahwa pelaksanaan pelaksanaan program dialog solutif akan segera dilaksanakan karena anggaran untuk program dialog solutif sudah turun. Dan dijelaskan oleh informan BI diatas bahwa sebelum pelaksanaan program dialog solutif kasubbag dokumentasi dan informasi untuk memberi tahu kepada kepala dinas dan kepala instansi untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan perwakilannya untuk yang akan mengikuti pelaksanaan program dialog solutif dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau usulan dari masyarakat. Serta dijelaskan oleh informan A diatas bahwa sebelum pelaksanaan program dialog solutif dilakukan rapat koordinasi dan kasubbag kerjasama media untuk menghubungkan kedia-media atau berita yang ada di Kabupaten Jember untuk menginformasikan kepada masyarakat. Sekaligus meliputi pada waktu pelaksanaan program dialog solutif.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pada tahap persiapan program dialog solutif sebagaimana dalam hal ini sebelum pelaksanaan terlebih dahulu adanya Rapat koordinasi di Humas Pemda Kabupaten Jember tersebut karena dalam mempersiapkan suatu program sebelum program itu dilaksanakan selalu ada sebuah kebijakan yang dibuat agar jalannya program bisa terarah dengan baik. Hal ini dapat dimaknai dengan menggunakan teori Meier dan Horn (dalam bab 2 hal 22) mengenai implementasi yang mana selalu memperhatikan isi dan kebijakan. Artinya bahwa dalam melaksanakan dan menjalankan implementasi suatu program kebijakan harus melihat dan memperhatikan agar sejalan dengan isi dari kebijakan suatu program.

#### **4.2.1.1.2 Pembagian Peran Dalam Pelaksanaan Program**

Dalam pelaksanaan program dialog solutif bagian Humas Pemda Jember serta dinas-dinas atau instansi-instansi mempunyai peran dan tugas masing-masing serta

dibantu juga oleh panitia dari tempat pelaksanaan kegiatan atau panitia lokal. Seperti yang di ungkapkan informan ZA:

“Peran Humas yaitu karena anggaran itu ada di Humas, jadi Humas sebagai penyedia fasilitas penyelenggaraan dan apa saja yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan harus disediakan oleh Humas, termasuk masalah penjadwalan dan penggabungan tempat untuk program dialog Solutif Bupati. Maka dari itu bagian humas menjadwalkan pertemuan koordinator kecamatan bahwa akan di adakanya kegiatan dialog solutif gabungan antara kecamatan Ledokombo, Sukowono, dan Sumberjambe”. ( ZA Maret 2015)

Pernyataan dari Informan IT dikuatkan oleh Infoman BI dan A yang mengungkapkan bahwa;

“Pelaksanaan program dialog solutif tersebut sesuai yang di mandatkan atau yang direkomendasi kepada Kabag Humas,yaitu sebagai koordinator program dialog solutif. ( IT Maret 2015)

“Peran saya pribadi dan sub bagian saya, yaitu ikut mensosialisasikan program dialog solutif agar lebih dikenal sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan Bupati dan Muspida.  
( BI Maret 2015)

“Peran saya pribadi dan sub bagian saya adalah menyalurkan ke media-media dan membuat berita”. (A Maret 2015)

Penjelasan informan ZA diatas bahwa peran bagian Humas Pemda Jember pada waktu program dialog solutif adalah sebagai pelaksana program, memfasilitasi kegiatan dialog solutif dan menjadwal waktu pelaksanaan program. Diungkapkan juga oleh IT diatas bahwa peran sub bagian kelembagaan pada waktu dialog solutif adalah sebagai koordinator program dialog solutif. Sedangkan peran BI sebagai Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi bertugas mensosialisasikan program dialog solutif kepada masyarakat dan Muspida Kabupaten Jember dengan tujuan agar masyarakat ikut berpartispasi dalam kegiatan dialog solutif tersebut. Di ungkapkan juga oleh A di atas bahwa peran sub bagian kerjasama media pada waktu pelaksanaan program dialog solutif menghubungkan ke media-media dan membuat berita. Seperti yang diungkapkan oleh Informan AM sebagai berikut;

“Peran kepala Disperidag atau perakilannya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu, menjawab pertanyaan yang di

ajukan oleh masyarakat yang mengarah atau yang berhubungan tentang Disperdag. itu menghimpun atau memfasilitasi semua kepentingan masyarakat”.(AM Maret 2015)

Senada yang diungkapkan oleh informan JS sebagai berikut;

“Peran kepala Dinas PU Cipta Karya atau yang mewakili pada waktu pelaksanaan program dialog solutif. Kami aktif dalam menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tugas kami. Biasanya dalam program dialog itu di hadiri Kepala Dinas atau perwakilanya secara langsung. Jadi kalau saya sebatas mendampingi Kepala Dinas, tetapi jawaban dari Kepala Dinas itu sudah sesuai dengan fungsi kami yang di dinas PU Cipta Karya”.(JS maret 2015)

Dan juga yang diungkapkan dari Informan RS dan dikuatkan oleh Infoman PM bahwa;

“Peran Kepala Bidang Kependudukan pada waktu program dialog solutif yaitu, menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai tentang administrasi kependudukan”(RS Maret 2015)

“Peran kepala bidang pencatatan sipil pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu, Menampung atau menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai permasalahan tentang administrasi pencatatan sipil”.( PM Maret 2015)

Begitu juga yang diungkapkan oleh informan S sebagai berikut;

“Peran Kepala BAPEMAS atau perwakilanya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu, Menjawab pertanyaan dari masyarakat yang berhubungan dengan BAPEMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat)”.(S Maret 2015)

Berdasarkan informan AM, JS, RS, PM dan S diatas bahwa peran kepala instansi-instansi atau Kepala dinas-dinas serta perwakilannya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu menjawab pertanyaan atau usulan dari masyarakat yang sesuai dengan instansi-instansi atau dinas-dinas masing-masing.

Seperti yang diungkapkan dari Informan M dan dikuatkan oleh Infoman S bahwa;

“Pelaksanaan Program dialog solutif pernah di laksanakan di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu dan kebetulan saya pada waktu itu jadi panitia bagian pelaksanaan program dialog solutif perwakilan dari Desa”.(M Maret 2015)

“Pada waktu program dialog solutif saya menjadi panitia bagian perlengkapan yang ditunjuk dari Desa”. (S Maret 2015)

Berdasarkan penjelasan M diatas bahwa pada waktu pelaksanaan program dialog solutif menjadi panitia pelaksana program yang mewakili dari Desanya yang kebetulan dijadikan lokasi program dialog solutif. Diungkapkan oleh S juga yang pernah menjadi panitia bagian perlengkapan yang mewakili dari Desanya.

Dalam persiapan petugas pelaksanaan program dialog solutif Humas serta instansi-istansi atau perwakilannya bekerjasama dengan panitia lokal. Karena tidak mungkin Humas menyiapkan semua petugas yang ada dari bagian Humas. Panitia lokal yang berasal dari daerah sekitar tempat pelaksanaan program akan dapat mempermudah persiapan pelaksanaan program. Jadi Humas juga perlu memfasilitasi panitia lokal dalam hal kebutuhan dan hal-hal lain yang di perlukan dalam persiapan pelaksanaan program. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan panitia lokal, bagian Humas dapat lebih memaksimalkan persiapan pelaksanaan program Sebelum pelaksanaan program dialog solutif biasanya pihak Humas menghadirkan koordinator kecamatan untuk rapat membahas panitia lokal yang akan disiapkan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran petugas dalam pelaksanaan program. Peran dan Ketrampilan Memfasilitasi menurut Iff (2012:558) dalam ( Bab 2 hal 17) bahwa Berbagai peran praktik yang dikelompokkan sebagai peran memfasilitasi adalah yang berkaitan dengan stimulasi dan penunangan pengembangan masyarakat. Sang pengkerja masyarakat dapat memakai beragam teknik untuk memudahkan sebuah proses, secara efektif menjadi alat yang mempercepat aksi dan membantu kelancaran proses. Dalam kaegori ini, sejumlah peran spesifik ditemukan. Hal tersebut adalah animasi (semangat)sosial, mediasi dan negosiasi, dukungan membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemaanfaatan berbagai ketrampilan dan sumber daya mengatur pada komunikasi personal.

#### 4.2.1.2 Persiapan Lapangan

Persiapan lapangan yang dimaksud terkait dengan penentuan lokasi dan keamanan pelaksanaan program seperti yang diungkapkan oleh ZA sebagai berikut;

“Persiapan dilapangan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan SKPD diKabupaten Jember”. (ZA Maret 2015)

Senada dengan informan IT sebagai berikut;

“Sebelum pelaksanaan program dialog solutif ini kita biasanya ada persiapan lapangan yang mana persiapan ini meliputi penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif bisa berjalan dengan lancar”. (IT Maret 2015)

Dan diungkapkan juga oleh informan BI sebagai berikut;

“Dalam persiapan lapangan sebelum pelaksanaan program dialog solutif yaitu kita menentukan lokasi kegiatan dan persiapan keamanan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif karena dalam kegiatan ini melibatkan Bupati, SKPD dan masyarakat di Kabupaten Jember”.(BI Maret 2015)

Penjelasan informan ZA, IT dan BI diatas bahwa dalam persiapan lapangan meliputi penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program. Karena pada waktu kegiatan dialog solutif ini melibatkan Bupati, SKPD dan masyarakat diKabupaten Jember.

##### 4.2.1.2.1 Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan program dialog solutif dipilih dengan mendasarkan pada peletakan yang strategis serta akses jalannya mudah dijangkau. Sebagaimana terlihat seperti gambar dibawah ini;

Gambar: 4.3 Lokasi Kegiatan dialog Solutif



Berdasarkan gambar diatas bahwa pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan dilapangan dan aksesnya mudah untuk dijangkau. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan program dialog solutif kita biasanya melaksanakan ditempat yang strategis dan aksesnya mudah untuk dijangkau. Karena pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu pasti diadakan ditempat yang terbuka supaya Bupati bisa bertatap muka muka secara langsung sama masyarakat”. ( ZA Maret 2015)

Pernyataan dari Informan IT dikuatkan oleh Infoman BI yang mengungkapkan bahwa;

“Pada waktu pelaksanaan program dialog solutif biasanya kita menentukan lokasi yang sangat strategis, karena kegiatan ini melibatkan Bupati beserta Satua Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarkat berkumpul. Contohnya kegiatan gabungan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Wuluhan, Ambulu dan Tempurejo yang ditempati kegiatan adalah Kecamatan Ambulu karena aksesnya terjangkau”. (IT Maret 2015)

“Pelaksanaan program dialog solutif biasanya dilakukan dilapangan atau tempat terbuka. Karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)”.( BIMaret 2015)

Berdasarkan informan ZA, IT dan BI diatas bahwa penentuan lokasi kegiatan adalah harus strategis dan aksesnya mudah karena kegiatan dialog solutif ini melibatkan masyarakat dan SKPD Kabupaten Jember untuk meningkatkan pembangunan. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan dialog solutif dilaksanakan ditempat terbuka.

#### **4.2.1.2.2 Keamanan Pelaksanaan Kegiatan**

Mengingat bahwa kegiatan dialog solutif juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Jember yaitu Bupati beserta jajarannya, maka persiapan keamanan pada saat pelaksanaan program juga menjadi salah satu hal terpenting yang akan dipersiapkan oleh pelaksana program. Persiapan kemanaan

menyangkut kegiatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Keamanan pelaksanaan program dialog solutif sangat penting karena kegiatan dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka. Karena kegiatan diikuti oleh Bupati, SKPD dan masyarakat. Keamanan kegiatan melibatkan Polres, polsek dan Satpol PP untuk menjaga keamanannya. (ZA Maret 2015)

Pernyataan dari Informan IT dikuatkan oleh Informan BI yang mengungkapkan bahwa;

“Dalam program dialog solutif sangat memerlukan keamanan karena dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan ditempat terbuka. Dalam kegiatan tersebut Bupati bertemu langsung sama masyarakat. Maka dari itu penjaga keamanan kegiatan melibatkan jajaran Polres, Polsek dan Satpol PP untuk menjaga lokasi kegiatan”. (IT Maret 2015)

“Biasanya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu keamanannya sangat ketat. karena kegiatan dilaksanakan dilapangan. untuk keamanan lokasi petugas melibatkan Polres, Polsek dan Satpol PP untuk menjaga lokasi. Karena acara dialog solutif ini dihadiri Bupati”.( BI Maret 2015)

Seperti juga yang diungkapkan oleh informan A sebagai berikut;

“Pada waktu pelaksanaan program dialog solutif biasanya banyak keamanan karena program ini melibatkan masyarakat dan SKPD se Kabupaten Jember yang duduk bersama dalam satu lokasi. Keamanan yang dilibatkan dalam pelaksanaan program dialog solutif yaitu Polres, Polsek dan Satpol PP. (A Maret 2015)

Penjelasan informan ZA, IT, BI dan A diatas bahwa keamanan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu sangat penting karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di lapangan. Dan yang menghadiri pelaksanaan program ini adalah Bupati dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah(SKPD) Kabupaten Jember. Sebagaimana terlihat seperti gambar dibawah ini;

Gambar : 4.4 Keamanan Pada Waktu Program Dialog Solutif



Sumber : Humas 2015

Berdasarkan gambar diatas bahwa keamana pada waktu pelaksanaan program dialog solutif. Untuk keamanan pelaksanaan melibatkan petugas dari Polres, Polsek dan Satpol PP untuk menjaga keamanan lokasi pelaksanaan program dialog solutif. seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Untuk tugas kemanan masing-masing yaitu Satpol PP menjaga keamanan bagian turunya Bupati dari kendaraan yang dinaiki Bupati beserta rombonganya untuk memasuki lokasi kegiatan. Serta mengamankan *stand* pada saat Bupati dan rombongan akan menggujugi *stand-stand* yang dipamerkan oleh masyarakat. Untuk Porles bertugas menggiringi kemanan kendaran yang dinaiki Bupati dan SKPD mulai dari kantor Bupati sampai lokasi kegiatan. Dan Polsek mengarahkan kendaraan yang datang untuk parkir yang rapi. Dan saat berjalanya kegiatan semua jajaran keamanan mengambil posis disamping kanan, kiri dan belakang masyarakat untuk mengamankan pelaksanaan program dialog solutif”.(ZA Maret 2015)

Pernyataan dari Informan IT dikuatkan oleh Infoman BI yang mengungkapkan bahwa;

“Tugas Satpol PP pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu mengamankan Bupati dan rombongan setelah turun dari kendaraan yang dinaiki dan mengantarkan menuju tenda tempat pelaksanaan program. Untuk Polres mengawal perjalanan Bupati dan Rombongannya kelokasi kegiatan. Sedangkan Polsek bertugas mengamankan kendaraan masyarakat dan SKPD yang berpartisipasi dalam kprogram dialog solutif. Tapi kalau pelaksanaan

program dialog solutif dimulai semuanya petugas mendampingi proses pelaksanaan program”.(IT Maret 2015)

“Pada waktu pelaksanaan program dialog solutif Satpol PP bertugas mengamankan jalan akan dilewati Bupati pada saat turun dari kendaraanya. sedangkan Polres bertugas menggawala perjalanan kendaraan yang dinaiki Bupati dari kantor Bupati sampai lokasi kegiatan. Untuk Polsek menjaga keamanan kendaraan masyarakat dan SKPD supaya tidak parkir disembarang tempat. Tapi kalau proses pelaksanaan program sudah dimulai semua petugas kumpul jadi satu untuk menjaga kelacaran pelaksanaan program”. (BI Maret 2015)

Senada juga yang diungkapkan oleh informan A sebagai berikut;

“Dalam pelaksanaan program dialog solutif satpol PP bertugas mengamankan jalan yang akan dilewati Bupati dan SKPD setelah turun dari kendaraan. Polse menjaga kedaraan dari masyarakat dan SKPD. Polres bertugas menggawal keberangkatan Bupati dan SKPD “. (A Maret 2015)

Berdasarkan Informan ZA, IT, BI dan A diatas bahwa untuk petugas keamanan pada waktu program dialog solutif mempunyai tugas masing-masing seperti Satpol PP yaitu bertugas untuk mengamankan kedatangan Bupati mulai dari kendaraan sampai tenda pelaksanaan kegiatan. Untuk tugas Polres menggawal keberangkatan Bupati dan rombongan menuju lokasi pelaksanaan program. Sedangkan tugas Polsek adalah mengatur kendaraan masyarakat dan SKPD untuk ditempatkan dilokasi yang aman dan nyaman. Jika proses pelaksanaan program diaog solutif dimulai semua keamanan kumpul ditenda untuk menjaga berjalanya pelaksanaan program.

#### **4.2.2 Pelaksanaan**

Pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan mulai pada tahun 2006 yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh Muspida dan masyarakat se-Kabupaten Jember. Untuk meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Sejauh ini pelaksanaan program dialog solutif berjalan mulai 2006 sampai 2014 dan tahun 2015 ini insyallah masih akan dilaksanakan 3 priode 4 bulan sekali”. (ZA Maret 2015)

Pernyataan dikuatkan Informan IT sebagai berikut:

“Pelaksanaan program ini mulai tahun 2006 sampai 2014 dan pada tahun 2015 masih dilaksanakan 3 priode dengan 4 bulan sekali. Untuk proses percepatan dan ketepatan sasaran dulu akselasasinya 60%. dengan adanya program dialog solutif ini bisa mencapai 100% dalam membatu percepatan akselarasi pembangunan”.  
( IT Maret 2015)

Berdasarkan infoman ZA dan IT diatas menjelaskan bahwa pelaksana program dialog solutif dimulai pada tahun 2006 sampai tahun 2014. Sedangkan tahun 2015 ini akan dilakukan 3 priode yang dilaksanakan 4 bulan sekali. Pelaksanaan program dialog solutif ini untuk mempercepat pelaksanaan proses pembangunan daerah. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar : 4.5 Pelaksanaan Program Dialog Solutif



1. Bupati dan SKPD

2. Masyarakat

Sumber : Humas 2015

Berdasarkan Gambar di atas bahwa pelaksanaan program dialog solutif yang diikuti oleh jajaran pemerintah dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat bertemu langsung dengan pemerintah, utamanya bertemu langsung dengan Bupati. Dalam pertemuan tersebut masyarakat dapat bertanya, mengusulkan pendapat dan menunjukkan potensi yang dimiliki di daerahnya masing-masing. Sehingga pemerintah dapat secara langsung melihat dan mendengar keluhan, keinginan dan potensi yang ada di masyarakat. Yang dikemas dalam kegiatan bedah potensi Desa

dan temu karya rakyat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut;

“Tujuan dari kegiatan bedah potensi Desa yaitu sebagai serap aspirasi masyarakat. Yang mana dalam kegiatan tersebut masyarakat banyak mengusulkan permasalahan yang ada didaerahnya masing-masing. Setelah itu pemerintah menanggapi usulan dari masyarakat”. (ZA Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA diatas bahwa tujuan dari bedah potensi Desa merupakan kegiatan serap aspirasi masyarakat, yang mana dalam kegiatan tersebut masyarakat banyak yang mengusulkan permasalahan atau potensensi yang ada didaerahnya masing-masing. Setelah itu pemerintah menanggapi usulan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan IT sebagai berikut;

“Perbedaan pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa dan kegiatan temu karya rakyat adalah dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa berfokus pada usulan atau aspirasi masyarakat. Sedangkan pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat mengevaluasi hasil dari usulan atau aspirasi yang muncul pada saat kegiatan bedah potensi Desa”. (IT Maret 2015)

Berdasarkan informan IT diatas bahwa perbedaan antara pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa dan pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat. Dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa masyarakat banyak yang mengusulka. Sedangkan pada kegiatan temu karya rakyat mengevaluasi hasil kerja dari usulan atau aspirasi yang muncul pada saat kegiatan bedah potensi Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan program dialog solutif. Menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) dalam (Bab 2 hal 26) bahwa Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Program Dialog Solutif ini mengusung dua tema kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan Temu Karya Rakyat.

#### 4.2.2.1 Bedah Potensi Desa

Setiap bulan Bupati Jember berkeliling ke seluruh penjuru Kab. Jember untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Berbagai keinginan, harapan, saran dan usulan disampaikan melalui forum Bedah potensi Desa. Dialog Solutip Bedah Potensi Desa, merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan demi membuka komunikasi secara intim dengan masyarakat. Memotret kondisi riil yang terjadi sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terjalannya komunikasi yang baik melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sumber data (<http://www.korem083.mil.id/berita/kodim-0824-jember/dialog-solutif-Bupati-bersama-forpimda-kab>). Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel : 4.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bedah Potensi Desa tahun 2006-2008

No	Tanggal	Pelaksanaan	Kecamatan	Desa	Audensi /Sasaran
1	21 - 02- 2006	Minggu ke 4	Umbulsari	Desa Paleran	
2	14 -03- 2006	Minggu Ke 2	Jombang	Padomasan	
3	11 -04- 2006	Minggu Ke 2	Kencong	Suko	
4	22 -05- 2006	Minggu ke 4	Patrang	Gebang	
5	10 -06-2006	Minggu Ke 2	Sumbersari	Kranjingan	
6	23 -07-2006	Minggu ke 4	Kaliwates	Sempusari	
7	25 -08-2006	Minggu ke 4	Jelbuk	Panduman	
8	24-09- 2006	Minggu ke 4	Sumberbaru	Sumberbaru	1. Tokoh Masyarakat
9	12 -10-2006	Minggu Ke 2	Sumberjambe	Sumberpakem	
10	23-11- 2006	Minggu ke 4	Ledokombo	Ledokombo	2. Organisasi Masyarakat
11	18-12-2006	Minggu ke 3	Kalisat	Glagahwero	

12	15-01- 2007	Minggu ke 2	Pakusari	Patemon	3. PKK Desa
13	22 -02-2007	Minggu ke 4	Sukorambi	Jubung	4. Pemuda
14	17 -03-2007	Minggu ke 3	Panti	Kemiri	
15	24-04- 2007	Minggu ke 4	Bangsalsari	Sukorejo	5. Istansi Pendidikan
16	13 -05-2007	Minggu ke 2	Tanggul	Manggisan	
17	11 -06-2007	Minggu ke 2	Sukowono	Sukowono	
18	22 -07-2007	Minggu ke 4	Semboro	Rejoagung	
19	14 -08-2007	Minggu ke 2	Balung	Balung Lor	
20	08-09- 2007	Minggu ke 1	Rambipuji	Rowotamtu	
21	15 -10-2007	Minggu ke 2	Jenggawah	Jenggawah	
22	16 -11-2007	Minggu ke 2	Mumbulsari	Lampeji	
23	24 -12-2007	Minggu ke 4	Mayang	Tegalrejo	
24	23 -01-2008	Minggu ke 4	Silo	Sumberjati	
25	10 -02-2008	Minggu ke 2	Puger	Puger	
26	09 -03-2008	Minggu ke 2	Ambulu	Tegalsari	
27	11 -04-2008	Minggu ke 2	Wuluhan	Dukuhdepok	
28	23 -05- 2008	Minggu ke 4	Tempurejo	Sidodadi	
29	10 -06-2008	Minggu ke 2	Gumukmas	Kepanjen	
30	14 -07-2008	Minggu ke 2	Ajung	Ajung	
31	23-08- 2008	Minggu ke 4	Arjasa	Arjasa	

Sumber : Humas Pemda Jember 2015

Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa pada tahun 2006-2008 dilakukan setiap bulan Dan dilaksanakan di setiap kecamatan.

Sedangkan pada tahun 2013-2015 dilakukan gabungan 3 kecamatan. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel: 4.5 Jadwal pelaksanaan Kegiatan Bedah Potensi Desa 2013-2015

No	Tanggal	Pelaksanaan	Kecamatan	Tempat	Audien/ Sasaran
1	10-01- 2013	Minggu ke 2	1. Tanggul 2. Sumberbaru 3. Semboro 4. Bangsalsari	Kec. Semboro	Tokoh Masyarakat  Organisasi Masyarakat
2	06-03- 2013	Minggu ke 1	1. Sukorambi 2. Panti 3. Rambipuji	Kec. Sukorambi	PKK Kecamatan dan Desa
3	23-07- 2013	Minggu ke 4	1. Pakusari 2. Mayang 3. Silo	Kec. Mayang	Petugas kesehatan
4	15-11- 2013	Minggu ke 3	1. Jenggawah 2. Ajung 3. Mumbulsari	Kec. Mumbulsari	
5	19-03- 2014	Minggu ke-3	1. Ledokombo 2. Sukowono 3. Sumberjam be	Kec. Sumberjambe	
6	11-06- 2014	Minggu ke-2	1. Kencong 2. Jombang 3. Umbulsari	Kec. Jombang	
7	14-10- 2014	Minggu ke-3	1. Puger 2. Gumukmas 3. Balung	Kec. Gumukmas	
8	05-01- 2015	Minggu ke 1	1. Wuluhan 2. Ambulu 3. Tempurejo	Kec. Wuluhan	
9	09-03- 2015	Minggu ke 2	1. Arjasa 2. Jelbuk 3. Kalisat	Kec. Arjasa	
10	10-08- 2013	Minggu ke 2	1. Patrang 2. Sumbersari 3. Kaliwates	Kec. Patrang	

Sumber : Bagian Humas 2015

Dalam kegiatan ini masyarakat banyak yang mengusulkan tentang permasalahan yang ada diDesanya dalam hal infrastruktur untuk pembangunan Desa. Pada pelaksanaan kegiatan dengan tema bedah potensi Desa berfokus pada pembangunan Seperti yang di ungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Pada waktu pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa, masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya. Lalu pada saat yang sama Bupati memberikan pertimbangan dan keputusan serta kebijakan. (ZA Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA diatas bahwa pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa ini masyarakat banyak yang mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada diDesanya. Dan pada saat yang sama Bupati memberikan pertimbangan dan keputusan serta kebijakan. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar : 4.6 Kegiatan Bedah Potensi Desa



Pelaksanaan Kegiatan dialog solutif

Sumber : Humas 2015

Berdasarkan gambar diatas bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa. Pembangunan masyarakat Desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau CD ). Menurut Schilippe dalam buku (Adi 2011:204) dalam (Bab 2 hal 18) bahwa pada mulanya teori tentang pembangunan masyarakat Desa ini tidak ada. Perkembangan teori pembangunan Desa itu dimulai dari praktik, yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam

masyarakat terutama pada situasi sosial yang dihadapi di dalam negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat. Dalam kegiatan bedah potensi Desa memiliki tiga poin yaitu penampilan potensi Desa, serap aspirasi dan program Desa.

#### 4.2.2.1.1 Penampilan Potensi-Potensi Desa

Penampilan potensi Desa yaitu pada waktu pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa masyarakat dibuatkan stand untuk memamerkan produk dari Desanya masing-masing. Dalam kegiatan bedah potensi Desa masyarakat yang punya kesenian atau Desa yang punya kesenian bisa di tampilkan untuk menghibur masyarakat dan SKPD yang ikut dalam kegiatan bedah potensi Desa. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar : 4.7 Penampilan potensi-potensi Desa



1. Penampilan Kesenian

2. Pameran Produk

Sumber : Humas 2015

Berdasarkan gambar diatas bahwa penampilan potensi-potensi yang ada di Desa seperti penampilan kesenian dan pameran produk yang sudah disediakan panitia dalam bentuk *stand*. Seperti yang di ungkapkan oleh IT sebagai berikut:

“Penampilan potensi-potensi Desa. Dimana pada waktu kegiatan bedah potensi Desa di dibuatkan *stand* perDesa, disitu masyarakat diminta untuk memamerkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desanya masing-masing.dan ditambahkan pada saat bedah potensi Desa kita biasanya dihibur oleh kesenian perwakilan dari Desa-Desa, dari lembaga pendidikan dan dari komunitas yang mempunyai kesenian”. (IT Mater 2015)

Pernyataan dari informan BI dikuatkan oleh ZA dan A yang mengungkapkan bahwa;

“Dalam kegiatan bedah potensi Desa biasanya menampilkan potensi-potensi yang ada diDesanya dan masyarakat juga bisa memamerkan *home* industrinya karena sudah disediakan *stand* oleh petugas kegiatan bedah potensi Desa. Dan ada juga penampilan kesenian dari lembaga pendidikan atau dari Desa yang mempunyai kesenian untuk menghibur masyarakat dan SKPD yang hadir pada waktu pelaksanaan kegiatan”.(BI Maret 2015)

“Pada saat kegiatan bedah potensi Desa biasa disediakan *stand* pameran karena Bupati dan rombongannya sebelum ke tenda tempat pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa biasanya mampir dulu ke *stand* yang disediakan panitia untuk melihat produk yang dipamerkan oleh Desa dan masyarakat”.( ZA Maret 2015)

Dan diungkapkan juga oleh informan A sebagai berikut;

“Dengan diadakan kegiatan bedah potensi Desa panitia biasanya membuat *stand* untuk pameran yang dibuat untuk memamerkan produk-produk dari Desa masing-masing. Ditambah juga ada penampilan kesenian yang ditampilkan dari perwakilan Desa atau perwakilan lembaga pendidikan”. (A Maret 2015)

Bedasarkan informan IT, ZA, BI dan A diatas bahwa pada waktu kegiatan bedah potensi Desa panitia membuat *stand* pameran untuk memamerkan produk-produk yang ada diDesanya masing-masing maupun *home industry* masyarakat, karena Bupati beserta rombongan sebelum masuk ke tenda pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa biasanya melihat-lihat *stand* yang di buat oleh panitia. Dalam kegiatan bedah potensi Desa juga ada penampilan kesenian perwakilan dari Desa atau kelompok seni yang biasanya di tampilkan didepan SKPD dan masyarakat pada waktu sebelum penutupan pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa.

#### **4.2.2.1.2 Serap Aspirasi**

Pada waktu kegiatan bedah potensi Desa biasanya ada sesi Serap aspirasi, dalam hal ini masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada di Desa yaitu seperti pelayanan administrasi, pembangunan jalan, dan lampu penerangan jalan untuk akses masuk keDesa. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar : 4.8 Serap Aspirasi



1. Masyarakat Menyampaikan Aspirasi

2. Penjelasan Bupati menjawab masukan dari masyarakat

Berdasarkan gambar diatas bahwa pada waktu kegiatan bedah potensi Desa itu ada sesi serap aspirasi yang mana masyarakat yang mengusulkan Bupati yang memberikan kebijakan. Seperti yang di ungkapkan oleh ZA sebagai berikut:

“Pada waktu kegiatan bedah potensi Desa ada sesi serap aspirasi yang mana masyarakat bisa menyampaikan permasalahan yang ada diDesanya. Lalu Bupati langsung memberikan kebijakan”.

(ZA Maret 2015)

Pernyataan dari informan IT dikuatkan oleh BI yang mengungkapkan bahwa; “Dalam kegiatan bedah potensi Desa di sesi serap aspirasi masyarakat bisa mengusulkan dan menyampaikan permasalahan yang ada diDesanya baik itu berupa infra struktur. Setelah itu Bupati memberi kebijakan”.(IT Maret 2015)

“Pada waktu sesi serap aspirasi masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada diDesanya masing-masing baik itu untuk pembangunan atau infra stuktur dan disitu Bupati langsung memberi kebijakan”. (BI Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA, IT dan BI diatas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa ada sesi serap aspirasi dalam hal ini masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat mengusulkan sesuatu yang dapat mempercepat pembangunan daerahnya. Beberapa permasalahan yang di keluhkan diantaranya seperti pelayanan administrasi, pembangunan jalan, dan lampu penerangan jalan untuk akses masuk ke Desa. Setelah itu Bupati lansung memberikan kebijakan tentang usulan masyarakat tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa serap aspirasi pada waktu kegiatan bedah potensi Desa. Menurut Hamijoyo(2005) dalam (Bab 2 hal 14) bahwa komunikasi

partisipatif mengasumsikan adanya proses humanis yang menempatkan individu sebagai aktor aktif dalam merespons setiap stimulus yang muncul dalam lingkungan yang menjadi medan kehidupannya. Individu bukanlah wujud yang pasif yang hanya bergerak jika ada yang menggerakkan. Individu adalah wujud dinamis yang menjadi subyek dalam setiap perilaku yang diperankan termasuk perilaku komunikasi. Proses komunikasi pada dasarnya merupakan salah satu ekspresi dinamis individu dalam merespons setiap symbol yang diterimanya melalui mekanisme psikologis untuk memberikan makna sesuai dengan referensi yang dimilikinya. Melalui proses komunikasi symbol simbol itu kemudian diberi makna. Maka jadilah pesan yang bisa diterima dan digunakan untuk merumuskan pesan baru sehingga melahirkan situasi komunikasi dua arah (*two ways communication*). Dalam situasi interaktif inilah kemudian terbentuk norma sosial yang disepakati, sehingga semakin lama komunikasi itu berlangsung, maka semakin besar pula kesamaan-kesamaan yang terbangun dalam diri seseorang yang akan menjadi mediator penting aktivitas komunikasi.

#### 4.2.2.1.3 Penyampaian Pogram Desa

Program Desa, yaitu program apa saja yang ada di Desa dan disampaikan pada waktu kegiatan bedah potensi Desa. Untuk sesi penyampaian program Desa biasanya dilaksanakan setelah sesi serap aspirasi. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar: 4.9 Penyampaian Program Desa



Kepala Desa menyampaikan program Desa

Sumber : *Diolah dari data primer, 2015*

Berdasarkan gambar diatas bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa ada sesi penyampaian program Desa yang diwakili kepala Desa atau perangkat Desa. Seperti yang di ungkapkan oleh ZA sebagai berikut:

“Penyampaian program Desa saat kegiatan bedah potensi Desa ini bertujuan untuk menyamakan program-program yang ada di Desa-Desa di Kabupaten Jember “. (ZA Maret 2015)

Pernyataan dari informan IT dikuatkan oleh BI yang mengungkapkan bahwa;

“Biasanya penyampaian program Desa ini bertujuan untuk menyamakan program-program yang ada diDesa-Desa di Kabupaten Jember”. (IT Maret 2015)

“Penyampaian Program Desa ini bertujuan untuk menyampaikan program-program yang ada diDesanya masing masing”. (BI Maret 2015)

Berdasarkan informasi ZA, IT, dan BI diatas bahwa dalam kegiatan bedah potensi Desa ada sesi penyampaian program-program Desa yang disampaikan oleh kepala Desa atau diwakili perangkat Desanya. Karena sesi ini bertujuan untuk menyamakan program-program Desa yang ada di Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan kegiatan bedah potensi Desa ini merupakan kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh lapisan masyarakat. pelaksanaan kegiatannya dilakukan setiap bulan. Dalam kegiatan bedah potensi Desa ada stand untuk memamerkan produk dan potensi dari Desanya masing-masing. tujuan dari pameran tersebut untuk menggekos produk dan potensi yang ada diDesanya. untuk menunjukan kepemerintah dan masyarakat yang lain bawah diDesa-Desa juga mempunyai produksi atau potensi masing-masing.

#### **4.2.2.2 Temu Karya Rakyat**

Temu Karya Rakyat merupakan kegiatan lanjutan dari bedah potensi Desa. Yang membedakan kegiatan Bedah Potensi Desa dengan Temu Karya Rakyat adalah jika dalam Bedah Potensi Desa masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai Desanya dan dalam kegiatan tersebut Bupati berperan sebagai narasumber bersama para Kepala SKPD, sedangkan pada temu karya rakyat Bupati berperan sebagai moderator

sedangkan para kepala SKPD menjadi narasumber yang menjelaskan hasil kerja berdasarkan aspirasi yang telah diungkapkan masyarakat pada saat kegiatan bedah potensi Desa. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel : 4.6 Jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Karya Rakyat 2009-2012

No	Tanggal	Pelaksanaan	Kecamatan	Tempat	Audien/ Sasaran
1.	22-01- 2009	Minggu ke 4	1. Umbulsari 2. Tanggul 3. Sumberbaru	Kec. Tanggul	
2	10 -07- 2009	Minggu ke 2	1. Pakusari 2. Mayang 3. Silo	Kec. Pakusari	
3	19 -12- 2009	Minggu ke 3	1. Tempurejo 2. Ambulu 3. Wuluhan	Kec. Ambulu	
4	12-03- 2010	Minggu ke 2	1. Balung 2. Puger 3. Gumukmas	Kec. Puger	Tokoh
5	09-06- 2010	Minggu ke 2	1. kencong 2. Semboro 3. Jombang	Kec. Kencong	Masyarakat
6	15-11- 2010	Minggu ke 3	1. Ledokombo 2. Sukowono 3. Sumberjambe	Kec. Sukowono	Organisasi Masyarakat
7	16-01- 2012	Minggu ke 3	1. Jenggawah 2. Ajung 3. Mumbulsari	Kec. Jenggawah	PKK Desa
8	04 -03- 2012	Minggu ke 1	1. Rambipuji 2. Bangsalsari 3. Panti	Kec. Bangsalsari	Pemuda
9	10-07 2012	Minggu ke 2	1. Kaliwates 2. Sumpalsari 3. Sukorambi	Kec. Kaliwates	
10	20-12- 2012	Minggu ke 3	1. Patrang 2. Arjasa 3. Jelbuk 4. Kalisat	Kec. Jelbuk	Istansi Pendidikan

Sumber : Bagian Humas 2015

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas bahwa pelaksanaan kegiatan Temu Karya Rakyat dilaksanakan gabungan 3 kecamatan. Karena kegiatan temu karya rakyat ini untuk mengevaluasi keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam kegiatan bedah potensi Desa. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar : 4.10 Kegiatan Temu Karya Rakyat



1. Bupati dan SKPD

2. Masyarakat

Sumber : Humas 2015

Berdasarkan gambar diatas bahwa pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat yang mana masyarakat dan SKPD berkumpul jadi satu didalam lokasi. Untuk mengevaluasi hasil kerja berdasarkan serap aspirasi pada waktu kegiatan bedah potensi Desa. Seperti yang diungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Kegiatan temu karya rakyat ini merupakan kelanjutan dari kegiatan bedah potensi Desa. Kalau kegiatan bedah potensi Desa adalah serap aspirasi, penampilan potensi Desa dan program Desa. Sedangkan kegiatan temu karya rakyat adalah sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi Desa ,Pameran potensi yang ada di masyarakat dan Pelayanan umum”.(ZA Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA diatas bahwa pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat ini adalah lanjutan dari kegiatan bedah potensi Desa. Kalau kegiatan bedah potensi Desa adalah serap aspirasi, penampilan potensi Desa program Desa. Sedangkan untuk kegiatan temu karya rakyat adalah sebagai bentuk evaluasi pada

kegiatan bedah potensi Desa, pameran potensi yang ada di masyarakat, dan pelayanan umum.

#### 4.2.2.2.1 Sebagai Bentuk Evaluasi Pada Kegiatan Bedah Potensi Desa

Kegiatan temu karya rakyat ini sebagai bentuk evaluasi kegiatan bedah potensi Desa untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dalam sesi ini Bupati berperan sebagai moderator sedangkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menjadi narasumber yang menjelaskan hasil kerjanya berdasarkan aspirasi pada waktu kegiatan bedah potensi Desa. Seperti yang diungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Kegiatan Temu karya rakyat dengan Sesi sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi Desa yang mana dalam kegiatan tersebut Bupati menjadi moderator antara masyarakat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Untuk membahas keberhasilan usulan dari masyarakat. apakah sudah ditindak lanjuti apa belum sama SKPD terkait”. ( ZA Maret 2015)

Senada juga yang diungkapkan informan IT sebagai berikut:

“Dalam sesi sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi Desa ini untuk melihat usulan-usulan dari masyarakat sudah ditindak lanjuti apa belum sama SKPD terkait untuk meningkatkan pembangunan. maka dari itu di sesi ini Bupati menjadi moderator antara masyarakat dan SKPD. (IT Maret 2015)

Pernyataan dari informan BI dikuatkan oleh A yang mengungkapkan bahwa;

“Sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi Desa ini adalah untuk melihat aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada kegiatan bedah potensi Desa itu apakah benar-benar sudah ditindak lanjuti sama SKPD atau cuma sebuah janji dari SKPD saja. maka dari itu di dalam sesi ini Bupati menggambi posisi sebagai moderator antara masyarakat dan SKPD”.(BI Maret 2015)

“Bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi Desa ini untuk menindak lanjuti usulan-usulan dari masyarakat untuk SKPD terkait. dalam hal ini Bupati memposisikan sebagai moderator antara masyarakat dan SKPD karena usulan dari masyarakat ini untuk meningkatkan pembangunan”. (A Maret 2015)

Berdasarkan Informan ZA, IT, BI dan A diatas bahwa pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat dengan sesi sebagai bentuk evaluasi kegiatan bedah potensi Desa ini untuk mengevaluasi usulan-usulan dari masyarakat untuk SKPD. Apakah aspirasi

yang disampaikan masyarakat sudah dapat dirasakan oleh masyarakat apa belum. Maka dalam sesi sebagai bentuk evaluasi kegiatan bedah potensi Desa ini Bupati menjadi moderator antara masyarakat dan SKPD Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.2.2.2.2 Pameran Potensi Yang Ada Di Masyarakat

Dalam kegiatan temu karya rakyat panitia menyediakan Stand untuk pameran untuk memamerkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar :4.11 Pameran Potensi Yang Ada Di Masyarakat



Bupati dan SKPD melihat pameran

Sumber : Humas 2015

Berdasarkan gambar atas bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat juga ada pameran potensi yang ada dimasyarakat . Sesi ini dilaksanakan ketika Bupati dan rombongan baru datang langsung melihat pameran tersebut. Seperti yang diungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Kegiatan temu karya rakya panitia juga menyediakan lokasi pameran atau *stand* untuk memamerkan produk-produk dari masyarakat. Dalam sesi ini Bupati sebelum memasuki tenda kegiatan. Bupati dan SKPD melihat pameran yang disediakan oleh panitia”. ( ZA Maret 2015)

Pernyataan dari informan BI dikuatkan oleh A yang mengungkapkan bahwa;  
“Dalam pameran ini pemerintah diharapkan bisa tahu bahwa ternyata masyarakat juga banyak yang punya *home industri* kerajinan

jadi layak untuk dikembangkan. Bahkan layak untuk diberdayakan supaya kerajinan mereka bisa lebih berkembang lagi”. (BIMaret 2015)

“Pemeran potensi yang ada di masyarakat ini untuk memperlihatkan potensi-potensi yang ada dimasyarakat kepada pemerintah. Bahwah masyarakat juga punya banyak kerajinan yang perlu dibimbing atau di kasih pelatihan biar produksi-produksi dari masyarakat ini bisa berkualitas”.(A Maret 2015)

Berdasarkan informasi ZA,BI dan A diatas bahwa pada waktu kegiatan temu karya rakyat ada sesi pameran yang ada dimasyarakat ini yang bertujuan untuk mengexpos kerajinan-kerajinan atau potensi-potensi masyarakat supaya pemerintah tahu. Karena masyarakat juga masih banyak membutuhkan bimbingan atau pelatihan dari pemerintah supaya produksi-produksinya bisa berkualitas.

#### **4.2.2.2.3 Pelayanan Umum**

Pada kegiatan temu karya rakyat ada beberapa pelayanan umum gratis untuk masyarakat yang disediakan oleh panitia. Seperti yang diungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Pada waktu kegiatan temu karya rakyat ini banyak pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan gratis, perpanjangan sim, perpustakaan keliling dan pelayanan kependudukan yaitu Pembuatan K K(Kartu Keluarga), pengaktifan KTP (kartu tanda penduduk) dan AKTE kelahiran . ( ZA Maret 2015)

Pernyataan dari informan BI dikuatkan oleh A yang mengungkapkan bahwa;

“Banyaknya pelayanan Umum pada waktu kegiatan temu karya rakyat seperti, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan jadi semua administrasi kependudukan bisa diurus langsung dilokasi kegiatan tersebut, Perpanjang SIM (Surat izin mengemudi) untuk perpanjang SIM tidak usah ke samsat bisa langsung diperpanjang pada waktu kegiatan temu karya rakyat diselenggarakan, Perpustakaan keliling ”. ( IT Maret 2015)

“Pelayanan umum pada waktu kegiatan temu karya rakyat ini biasanya dimanfaatkan sama masyarakat. Pelayanan yang disediakan pada waktu temu karya rakyat ini meliputi Perpanjangan SIM( Surat Izin Mengemudi), Perpustakaan Keliling, Administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan.( BI Maret 2015)

Berdasarkan informasi ZA, BI dan IT diatas bahwa pada waktu kegiatan temu karya rakyat ada pelayanan umum yang meliputi Pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan gratis. Pelayanan Administrasi seperti pengurusan AKTE kelahiran, KK (Kartu Keluarga), dan KTP (kartu Tanda Penduduk. pelayanan Perpanjangan SIM(Surat Izin Mengemudi), dan Perpus Keliling. Semua pelayanan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan–penjelasan diatas dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan dialog solutif dengan menggunakan dua kegiatan yaitu kegiatan bedah potensi Desa dan temu karya rakyat. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai keberhasilan program sebagaimana yang dijelaskan Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000) dalam (bab 2 hal 25) bahwa masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program yang telah ditetapkan.

#### **4.2.3 Evaluasi**

Evaluasi dilakukan sebagai proses pengawasan/*controlling* terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Menurut (Yusuf, 2000 : 3) Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Evaluasi program yang dilakukan Humas Pemda Jember dan untuk evaluasi kegiatan di lakukan oleh masing-masing instansi-

istansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dialog solutif seperti sub bab dibawah ini;

#### 4.2.3.1 Evaluasi Program

Dalam rangka mengkroscek pelaksanaan program dialog solutif, pelaksana kegiatan selalu rutin setiap habis pelaksanaan melakukan evaluasi program. Seperti yang diungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Untuk evaluasi program dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan program dialog solutif karena evaluasi ini melaporan hasil kegiatan dan membahas kendala yang ada seperti proses kerja apa berjalan baik atau tidak, membahas dana, dan sebagainya. Disitu kami bahas bersama untuk mengkroscek dimana letak kekurangan dari pelaksanaan program yang kami laksanakan”.(ZA Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan ZA dikuatkan oleh Infoman IT sebagai berikut:

“Evaluasi program dilakukan setiap habis pelaksanaan program karena untuk melaporan hasil pelaksanaan program. Setelah itu diadakan croscek dan dilihat dimana letak kelemahannya dan dari situbiasanya ada perbaikan kerja”.(IT Maret 2015)

“Pelaporan tiap habis pelaksanaan kegiatan pasti selalu dibahas ketika evaluasi program yang diadakan oleh Humas dimana setiap laporan saya serahkan kepada ketua program dan akan dibahas bersama di dalam rapat evaluasi program” (BI Maret 2015)

Penjelasan Informasi ZA, IT dan BI diatas bahwa evaluasi program dialog solutif ini dilaksanakan setiap habis pelaksanaan program untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan untuk mengetahui kekurangan yang ada di lapangan dan bisa diperbaiki untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Seperti yang diungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Jadi evaluasi yang dilakukan Humas sebagai pelaksana program cuma mengevaluasi pelaksanaan kegiatan saja. Untuk usulan dari masyarakat biasanya langung ke instansi-istansi masing-masing. Tapi kita mengotrol apakah sudah dilakukan apa belum sama isitansi-istansi yang terkait. Biasanya 1 bulan setelah kegiatan kita panggil semua istansi untuk kita tindak lanjuti mengenai usullan dari masyarakat”.

Penjelasan informan ZA diatas, bahwa evaluasi pelaksanaan program dialakukan oleh pihak Humas sedangkan untuk usulan-usulan dari masyarakat biasanya langsung keistansi-istansi masing-masing. Tapi yang mengontrol usulan dari masyarakat sudah dilakukan atau belum itu humas. Biasanya 1 bulan setelah kegiatan Humas memanggil instansi-istansi untuk ditindaklanjuti mengenai usulan-usulan dari masyarakat.

#### 4.2.3.2 Evaluasi Kegiatan

Untuk mengevaluasi usulan-usulan dari masyarakat yang disampaikan pada waktu program dialog solutif karena setiap instansi usulan-usulanya berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan informan AM sebagai berikut:

“Untuk evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustian Dan Perdagangan (DISPRIDAG) setelah pelaksanaan program dialog solutif adalah rapat membahas usulan-usulan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti. Sebelum menindak lanjuti usulan-usulan kita lihat dananya dulu. Karena kadang-kadang masyarakat mintak peralatan–peralatan dan kami belum menganggarkan soalnya juga anggaranya terbatas”. ( AM Maret 2015)

Penjelasan informan AM diatas, bahwa evaluasi yang dilakukan Dinas Perindustian Dan Perdagangan (DISPRINDAG) rapat membahas usulan dari masyarakat untuk ditindak lanjuti. Karena sebelum menindak lanjuti usulan-usulan masyarakat, melihat dana dulu. biasanya masyarakat mengusulkan peralatan dan kami belum menganggarkan. Hal ini Seperti yang diungkapkan informan JS sebagai berikut:

“Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PU cipta karya setelah pelaksanaan dialog solutif adalah rapat sama pimpinan dinas untuk membahas usulan dari masyarakat. kebanyakan masyarakat mengusulkan lampu penerangan jalan dan perbaikan jalan. Jadi sebelum kami tindaklanjuti kami juga lihat anggaran dana di dinas dulu”.(JS Maret 2015)

Berdasarkan informan JS diatas bahwa evaluasi dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya setelah pelaksanaan program dialog solutif adalah rapat sama pimpinan dinas untuk membahas usulan dari masyarakat. Karena masyarakat banyak yang mengusulkan lampu penerangan dan perbaikan jalan. Jadi sebelum di tindak lanjuti melihat anggaran dana yang ada didinas. Begitu juga yang diungkapkan informan S sebagai berikut:

“Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) setelah pelaksanaan dialog solutif yaitu rapat dengan kepala BAPEMAS dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk menindak lanjuti usulan dari masyarakat. Soalnya masyarakat biasanya mengusulkan untuk mintak bantuan rumah yang tidak layak huni jadi kami tidak langsung menindak lanjuti karena kita juga lihat dana di BAPEMAS”.(S Maret 2015)

Berdasarkan informan S diatas bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) setelah pelaksanaan program dialog solutif yaitu rapat dengan kepala dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk menindaklanjuti usulan dari masyarakat. soalnya masyarakat biasanya mengusulkan untuk mintak bantuan rumah yang tidak layak huni jadi kami tidak bisa langsung menindak lanjuti karena juga lihat dana di BAPEMAS. Senada yang diungkapkan oleh informan RS sebagai berikut:

“Untuk evaluasi yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) adalah masyarakat banyak yang mengeluh tentang biaya administrasi padaha dispenduk tidak memungut biaya sama sekali untuk biaya administrasi jika masyarakat itu mau mengurus sendiri mulai dari Desa sampai kecamatan”.(RS Maret 2015)

Berdasarkan informan RS diatas bahwa evaluasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil(DISPENDUK) masyarakat banyak yang mengeluh tentang biaya administrasi padahal Dispenduk sebenarnya tidak usah pakek biaya jika masyarakat mau membuat mengurus sendiri mulai dari Desa sampai kecamatan. Hasil evaluasi dari instansi-istansi biasanya dilaporkan kepada pihak Humas selaku pelaksana

program apakah usulan-usulan masyarakat dapat direalisasikan atau tidak. Hal ini Seperti yang diungkapkan informan AM sebagai berikut:

“Kalau kami setelah rapat dengan kepala dinas biasanya langsung memberikan laporan ke Humas untuk menindak lanjuti usulan dari masyarakat bisa terealisasikan atau tidak. Soalnya kita juga lihat anggaran yang ada di dinas. tapi kalau belum ada kita menggabarkan untuk tahun berikutnya. (AM Maret 2015)

Berdasarkan informan AM diatas bahwa setelah rapat dengan kepala dinas biasanya langsung memberi laporan ke Humas untuk menindak lanjuti usulan dari masyarakat bisa terealisasikan atau tidak. Soalnya kita juga lihat anggaran yang ada didinas. Tapi kalau belum ada kita bisa menggabarkan untuk tahun berikutnya. Begitu juga yang diungkapkan informan JS sebagai berikut:

“Setelah rapat dengan kepala dinas biasanya kita langsung surve lokasi yang diusulkan oleh masyarakat untuk ditindak lanjuti. Tapi sebelum menindak lanjuti usulan kita melaporkan ke Humas dulu biar nanti tidak ada kesimpangsiuran antara dinas PU sama Bagian Humas”.( JS Maret 2015)

Penjelasan informan JS diatas bahwa setelah rapat dengan dinas biasanya kita langsung surve kelokasi yang diusulkan oleh masyarakat untuk ditindak lanjuti. tapi sebelum menindak lanjuti usulan kita melapor ke Humas dulu biar nanti tidak ada kesimpangsiuran antara Dinas PU sama Humas. Senada dengan ungkapkan informan S sebagai berikut:

“Setelah kami rapat dengan kepala dan ternyata usulan dari masyarakat itu masuk dalam program BAPEMAS. Kita biasanya langsung nyuruh masyarakat atau kepala Desa untuk membuat proprosal yang menggusulkan rumah layak huni itu. Tapi kita biasanya komunikasi dulu sama Humas selaku pelaksana program dialog”. (S Maret 2015)

Berdasarkan informan S diatas bahwa setelah kami rapat dengan kepala dan ternyata usulan dari masyarakat itu masuk dalam program BAPEMAS. Kita langsung nyuruh masyarakat atau kepala Desa untuk membuat proposal yang menggusulkan

rumah layak huni itu. Tapi kita biasanya komunikasi dulu sam Humas selaku pelaksana program dialog. Dan diungkapkan juga oleh informan RS sebagai berikut:

“Hasil Kita setelah pelaksanaan program dialog solutif adalah mengevaluasi petugas kecamatan yang bagian administrasi kependudukan biar masyarakat tidak dikenakan biaya lagi. Tapi biasanya masyarakat itu liwat biro jasa jadi kami kesulitan untuk melacaknya karena semua administrasi kependudukan itu yang ngentrin adalah kecamatan masing-masing”. (RS Maret 2015)

Penjelasan informan RS diatas bahwa hasil kita setelah pelaksanaan program dialog solutif adalah mengevaluasi petugas kecamatan yang bagian administrasi kependudukan biar masyarakat tidak dikenakan biaya lagi. Tapi biasanya masyarakat lewat biro jasa jadi kami kesulitan untuk melacak karena semua administrasi kependudukan yang memasukan data adalah kecamatannya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Pelaksana Program yaitu bagian humas pemda Jember dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh dinas-dinas atau instansi-istansi di atas hal ini dapat dimaknai dengan konsep tahapan implementasi oleh Soenarko (2000) terkait pada tahapan evaluasi, bahwa dengan evaluasi maka suatu program atau suatu kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan.

#### **4.2.4 Terminasi**

Terminasi adalah tahapan tindak lanjut yang merupakan akhir dari suatu kegiatan dan relasi perubahan. Untuk terminasi pelaksanaan program dialog solutif masih belum ada karena program ini masih berlangsung dan berjalan sampai sekarang sehingga terminasi untuk program ini belum dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaan program dialog solutif ini terminasi untuk penerima manfaat sudah ada, yang dilakukan oleh implementor dialog solutif kepada penerima manfaat sesuai dengan sasaran kegiatan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program ini

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten duduk bersama membahas permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat dan di sampaikan secara langsung oleh masyarakat. Untuk terminasi program dilakukan oleh Bagian Humas sedangkan terminasi kegiatan dilakukan oleh Istansi-istansi yang ikut dalam pelaksanaan program dialog solutif.

#### 4.2.4.1 Terminasi Program

Terminasi pelaksanaan program dialog solutif di lakukan oleh pihak humas selaku pelaksana program. Seperti yang diutarakan oleh Informan ZA sebagai berikut;

“Dengan adanya program ini yang jelas sudah ada keterpaduan program antara dinas dengan instansi terkait, di dalam program dialog ini terdapat keterpaduan untuk mewujudkan evisiensi dengan evektifitas program dan pelaksana program”.(ZA Maret 2015)

Senada yang diutarakan oleh Informan IT sebagai berikut;

“Kita sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini memfasilitasi di lain pihak kita dapat memonitoring pembanguna diwilayah”. (IT Maret 2015)

Begitu juga yang diutarakan oleh Informan BI sebagai berikut;

“Banyak usulan-usulan masyarakat yang sudah terwujud. Dengan adanya program ini yang jelas sudah ada keterpaduan program antara dinas dengan instansi terkait, di dalam program dialog ini terdapat keterpaduan untuk mewujudkan evisiensi dengan evektifitas program dan pelaksana program”.(BI Maret 2015)

Berdasarkan Informan ZA, IT dan BI diatas bahwa terminasi pelaksanaan program dialog solutif ini dilakukan oleh bagian Humas pemkab Jember sebagai pelaksana program adalah memadukan program dengan antar istansi. Menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dirasakan pemerintah dengan adanya program dialog solutif ini yaitu pemerintah Kabupaten Jember dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, dan pemerintah benar-benar tahu apa pemasalahan dan potensi yang ada di masyarakat. Karena masyarakat

menyampaikan pertanyaan dan SKPD terkait menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Hal diatas senada dengan yang disampaikan oleh informan M dan MN, yaitu :

“Masyarakat ketemu langsung sama Bupati dan SKPD. setelah itu masyarakat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dimasyarakat. Bupati dan SKPD Bisa menampung pertanyaan dari masyarakat dan nanti diproses melewati dinas-dinas atau instansi-instansi yang terkait untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada di Desa atau yang terjadi dimasyarakat”.( M Maret 2015)

“Ketemu langsung Bupati dan SKBD se Kabupaten Jember. Tersampainya keinginan masyarakat. Informasi mengenai program-program pemerintah dapat diketahui atau tersampaikan kepada masyarakat”( MN Maret 2015)

Penjelasan informan M dan MN diatas bahwa masyarakat ketemu langsung sama Bupati dan SKPD. setelah itu masyarakat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dimasyarakat. Bupati dan SKPD bisa menampung pertanyaan dari masyarakat dan nanti diproses melewati dinas-dinas dan instansi-instansi yang terkait untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada di Desa atau yang terjadi di masyarakat. Masyarakat langsung bisa ketemu Bupati dan SKPD se Kabupaten Jember. Dan tersampainya keinginan masyarakat. Informasi mengenai program-program pemerintah dapat diketahui atau tersampainya kepada masyarakat.

#### **4.2.4.2 Terminasi Kegiatan**

Untuk terminasi kegiatan yang dilakukan instansi-instansi terkait dengan usulan-usulan dari masyarakat sebagai berikut. Hal ini Seperti yang diungkapkan oleh informan AM sebagai berikut;

“Masyarakat jadi aktif jemput bola, sebelum kita mensosialisasikanya masyarakat sudah banyak yang tahu, jadi hal tersebut membantu kami untuk pembuatan surat usaha, bahkan pada waktu dialog masyarakat antusias untuk bertanya mengenai hal-hal tersebut”.

( AM Maret 2015)

Berdasarkan informan AM diatas bahwa terminasi pada waktu program dialog solutif yang dilakukan oleh DISPRINDAG adalah masyarakat sudah aktif menayakan program-program yang ada di Disperindag. Seperti pembuatan surat

keterangan usaha yang berfungsi melegalkan usahanya. Jadi sebelum Disperidak mensosialisasikan programnya masyarakat sudah tahu karena sudah di sampaikan pada waktu dialog solutif. Seperti yang di ungkapkan oleh Informan S sebagai berikut:

“Diketahui kalau masih kurang merata dalam pembangunan, jadi kami berusaha dengan adanya program dialog ini bisa mengalokasikan bantuan supaya tepat sasaran”.( S Maret 2015)

Berdasarkan informan S diatas bahwa terminasi program dialog solutif untuk BAPEMAS adalah masyarakat banyak yang menyampaikan aspirasinya, dan pemerintah juga dapat memberikan bantuan dengan tepat sasaran. Begitu juga yang diutarakan oleh Informan JS sebagai berikut:

“Kita bisa tahu daerah mana saja atau Desa mana saja yang masih belum ada PJU atau kalau ada kerusakan pada PJU, jadi kami langsung bisa mengatasi setelah ada program dialog solutif kalau ada dana. Kalau tidak ya kita tunda untuk tahun berikutnya”.  
(JS Maret 2015)

Berdasarkan informan JS diatas bahwa terminasi program dialog solutif untuk PU Cipta Karya adalah kita bisa tahu daerah mana saja atau Desa mana saja yang masih belum ada PJU atau kalau ada kerusakan pada PJU, Jadi kami langsung mengatasi setelah ada program dialog solutif kalau ada dana kalau tidak kita tunda untuk tahun berikutnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan RS dan PM sebagai berikut:

“Kita untuk lebih bisa menata diri lagi dalam memberikan kebijakan-kebijakan agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan”. (RS Maret 2015)  
“Sebagai sarana atau media untuk instropeksi, jadi dengan berbagai permasalahan dari masyarakat yang muncul, berarti Dispenduk balum bisa berbuat sebaik mungkin seperti yang diharapkan oleh masyarakat dimana prioritas dinas adalah untuk mengusahakan pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi”(PM maret 2015)

Berdasarkan informan RS dan PM diatas bawah terminasi program dialog solutif dari Dispenduk adalah dinas dapat mengetahui apa yang terjadi di masyarakat

saat ini tentang masalah kependudukan. Dalam hal ini Dispenduk dapat memberikan semua kemudahan pelayanan tentang administrasi kependudukan dengan gratis.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa terminasi program dilakukan oleh Bagian Humas Pemda Jember dan Terminasi Kegiatan dilakukan oleh Dinas-Dinas atau Instansi-istansi. Hal ini dimaknai sebagaimana konsep tahapan implementasi oleh Soenarko (2000) terkait pada tahapan terminasi, dimana akhir dari suatu relasi perubahan dan dapat terjadi karena waktu bertugas sudah berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri.

### **4.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelaksanaan Program Dialog Solutif**

Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan faktor mendukung dari pelaksanaan program dialog solutif. Faktor tersebut dapat dideskripsikan dalam sub bab dibawah ini;

#### **4.3.1 Faktor Pendorong**

##### **4.3.1.1 Dukungan Penuh Dari Pihak Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jember**

Pelaksanaan program dialog solutif ini sangat didukung oleh pihak Kabupaten Jember karena tujuan program dialog solutif ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti ungkapan informan ZA sebagai berikut :

“Program dialog solutif ini sangat didukung oleh pihak kabupaten bahkan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif MUSPIDA wajib menghadiri pelaksanaan program dialog solutif tersebut. Supaya bisa mendengarkan secara langsung usulan-usulan dari masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat”.  
(ZA Maret 2015)

Senada yang diungkapkan informan IT sebagai berikut:

“Program dialog solutif bisa mempertemukan MUSPIDA dan masyarakat untuk bersilaturahmi jadi pihak Kabupaten pun sangat

mendukung dengan adanya program ini. karena bisa menyerap aspirasi dari masyarakat”. (IT Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan BI dikuatkan oleh Informan A sebagai berikut:

“Dukungan dari pihak pemerintah mengenai program dialog solutif ini sangat mendukung bahkan menganjurkan MUSPIDA untuk meghadiri program dialog solutif ini karena untuk bersilaturahmi dengan masyarakat bahkan untuk menyerap aspirasi dibuat untuk acuan penyusunan peningkatan pembangunan”. ( BI Maret 2015)  
“Masalah dukungan ya sangat mendukung karena program ini kan untuk pembangunan daerah, jadi saya rasa pemerintah kabupaten sangat mendukung budget dengan adanya program ini. bahkan dia mengajak semua MUSPIDA untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program dialog solutif”. (A Maret 2015)

Berdasarkan Informasi ZA, BI ,IT dan A diatas bahwa program dialog solutif ini didukung penuh oleh pihak kabupaten. bahkan untuk menunjukkan partisipasinya sampai mengajak semua MUSPIDA untuk ikut serta dalam program tersebut. Karena dalam program ini bisa mempertemukan MUSPIDA dan masyarakat secara langsung. Karena dalam program ini ada serap aspirasi dari masyarakat untuk dibuat acuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.3.1.2 Sinergitas Antara Lembaga Pemerintah Atau SKPD Terkait**

Dalam pelaksanaan program dialog solutif ini melibatkan SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah), untuk sinergitas antara lembaga pemerintah atau SKPD ini pihak humas sebelum pelaksanaan program dialog solutif ini mengadakan rapat dengan SKPD-SKPD terkkait. Seperti juga yang diungkapkan oleh informan IT sebagai berikut;

“Sebelum pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan kami mengundang seluruh kepala instansi-istansi atau perwakilannya untuk rapat membahas pelaksanaan program dialog solutif dan mengingatkan kepada SKPD tentang tugas masing-masing instansi-istansi.(ZA Maret 2015)

Seperti juga yang diungkapkan oleh informan IT sebagai berikut;

“Kita sebelum melaksanakan program dialog solutif biasanya menginformasikan kepada Kepala instansi-istans dan kepala dinas-dinas atau perwakilanya, untuk kita ajak rapat membahas tentang teknis pelaksanaan program dialog solutif ini, supaya nanti kalau udah dilokasi pelaksanaan bisa tahu tugas masing-masing SKPD tersebut”. (IT Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan BI dikuatkan oleh Infoman A sebagai berikut:

“Sebelum pelaksanaan program biasanya saya beserta anggota sub bagian informasi dan dokumentasi menginformasikan kepada seluruh instansi-istansi dan dinas-dinas atau perwakilanya untuk mengikuti rapat supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif tahu apa tugas dan fungsi SKPD masing-masing”. (BI Maret 2015)

“Biasanya untuk mensinergitaskan antara lembaga pemerintah dan SKPD kami mengadakan rapat dengan instansi-istansi dan dinas-dinas yang akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program dialog solutif tersebut. Jadi pada waktu pelaksanaan program semua SKPD sudah tahu apa tugasnya masing-masing”. (A Maret 2015)

Dan juga yang diungkapkan informan AM sebagai berikut:

“Kita biasanya sebelum pelaksanaan program dialog solutif itu diundang rapat dulu sama humas untuk membagi tugas dalam pelaksanaan program dialog solutif. Supaya kita bisa memposisikan diri kita masing-masing sebagai SKPD”. (AM Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA, IT, BI, dan A diatas bahwa dalam pelaksanaan program dialog solutif itu sangat penting untuk sinergitas antara pemerintah dan SKPD terkait demi untuk kelancaran pelaksanaan program dialog solutif. Sedangkan menurut informan AM diatas bahwa sebelum pelaksanaan program dialog solutif dilakukan jajaran SKPD rapat bersama SKPD bagian Humas untuk membahas tugas dan fungsi masing-masing saat pelaksanaan program.

#### **4.3.1.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat yaitu dukungan dari masyarakat untuk tidak hanya hadir di program dialog solutif tetapi juga menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan program pembangunan. Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian

potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berjalanya program dialog solutif ini karena adanya partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi dalam kegiatan dialog solutif ini diantaranya penyampaian aspirasi. Seperti ungkapan informan M dan MN sebagai berikut :

“Pernah Dek, kebetulan program dialog solutif dilaksanakan di Kecamatan Ambulu dan kebetulan juga Desa kami yang ketempatan yakni Desa Tegalsari. Pelasanaan kegiatannya dilaksanakan diLapangan Tegalsari”. ( M Maret 2015)

“Pernah, kegiatannya semacam kunjungan ke masyarakat dalam sebuah forum besar.Ya besarnya karena masyarakat dari beberapa kecamatan dijadikan dalam satu tempat”.(MN Maret 2015)

Penjelasan informan M dan MN diatas yang menyebutkan bahwa pernah berpartisipasi dalam kegiatan dialog solutif dan kebetulan juga dilakukan di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu. Yang mana pelaksanaan kegiatannya dialog solutif dilaksanakan dilapangan Tegalsari. Dalam kegiatan tersebut masyarakat dan Bupati duduk berhadapan. Kegiatan tersebut dikemas dalam sebuah forum besar karena di ikuti beberapa kecamatan di Kabupaten Jember. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini;

Gambar : 4.12 Partisipasi Masyarakat



Sumber : Humas 2015

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengikuti program dialog solutif. Masyarakat juga menyampaikan aspirasi

mengenai permasalahan yang ada di Desanya masing-masing. Seperti yang di ungkapkan oleh informan M dan MN sebagai berikut;

“Dalam kegiatan ini masyarakat dan perangkat Desa dapat menyapaikan permasalahan- permasalahan yang ada di Desa.tapi tidak semua pertanyaan bisa tersampaikan karena terbatasnya waktu dialog”(M Maret 2015)

“Penyampaian aspirasi masyarakat dalam kegiatan tersebut di bagi beberapa sesi oleh pembawa acara. Dimana dalam sesi tanya jawab, masyarakat menayakan, mengusulkan, dan menyarankan beberapa hal yang menjadi kendala-kendala dalam pembangunan lingkunganya”.(MN Maret 2015)

Berdasarkan penjelasan informan M dan MN di atas bahwa penyampaian aspirasi masyarakat melalui program dialog solutif seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan pada instansi-instansi terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Memberikan usulan- usulan potensi yang ada di Desa, dan menyarankan tentang kendala- kendala pembangunan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh MN sebagai berikut:

“Mengikuti proses kegiatan dan melakukan pengamatan serta mencatat segala informasi yang telah disampaikan Bupati beserta SKPD mengenai program – program yang telah di programkan pemerintah kabupaten”. (MN Maret 2015)

Penjelasan informan MN diatas menggambarkan bahwa bentuk aspirasi yang diberikan pada waktu kegiatan dialog solutif yaitu mengikuti proses kegiatan dan melakukan pengamatan serta mencatat informasi yang telah disampaikan Bupati beserta SKPD mengenai program-program yang telah di programkan pe merintah Kabupaten Jember untuk masyarakat dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dialog solutif dalam (Bab 2 hal 11-12) . Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam konteks pembangunan

Adisasmita (2006:38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana dan program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 4.3.1.4 Anggaran yang Tepat Waktu

Program dialog solutif ini tergantung sama anggaran dana jika anggaran dana turunnya tepat waktu maka pelaksanaan program dialog solutif langsung dilaksanakan. Seperti yang di ungkapkan oleh informan ZA berikut;

“Kalau anggaran yang kita ajukan itu turunnya tepat waktunya kita langsung bisa melaksanakan program dialog solutif. karena seluruh biayaya program dialog solutif ini memakai anggaran uang APBD bagian Humas. (ZA Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan IT dikuatkan oleh Infoman BI sebagai berikut;

“Jika anggaranya cair tepat waktu ya kita langsung melaksanakan program dialog solutif sesuai dengan yang kita jadwalkan. (IT Maret 2015)

“Anggaran yang diangkan oleh bagian humas turun kita langsung melaksanakan program dialog solutif. karena kita biasanya sebelum mengajukan anggaran kita sudah menentukan pelaksanaan program dialog solutif”.(BI Maret 2015)

Seperti juga yang diungkapkan informan A sebagai berikut:

“Bagian humas itu biasanya sudah membuat jadwal pelaksanaan program dialog solutif jadi kalau anggarnya turun kami langsung melaksanakan program tersebut”.(A Maret 2015)

Berdasarkan informasi ZA, IT, BI dan A diatas bahwa pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan tepat waktu jika anggaran yang di ajukan sudah turun.

Karena pihak humas biasanya menjadwalkan pelaksanaan program dialog solutif tersebut sebelum mengajukan uang APBD.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas bahwa faktor pendukung dari berhasilnya implementasi program dialog solutif yaitu sebagaimana dimaknai dengan konsep Edwards III (2009) dalam (bab 2 hal 27-28) bahwasanya syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksanaan dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.

### **4.3.2 Faktor Penghambat**

#### **4.3.2.1 Hambatan Teknis**

Hambatan teknis yang terjadi pada pelaksanaan program dialog seperti yang diungkapkan oleh informan IT sebagai berikut;

“Hambatan teknis itu hambatan yang bersifat teknis contohnya cuaca yang kurang mendukung, perlengkapan yang tidak bisa berkerja sesuai fungsinya, akses yang kurang memadai dan lain-lain”.(IT Maret 2015)

Berdasarkan informan IT diatas bahwa hambatan teknis merupakan hambatan yang bersifat teknis seperti cuaca yang tidak mendukung , perlengkapan yang tidak bisa berkerja sesuai fungsinya dan akses yang kurang memadai. Untuk itu untuk meminimalisir adanya hambatan tersebut perlu adanya perencanaan yang matang. Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Dialog Solutif seperti yang diungkapkan oleh informan RS yaitu :

“Kendalanya masyarakat masih kurang menyadari proses pembuatanya, sediri yang bersangkutan itu biasanya data pendukungnya kurang akhirnya itu terhambat, karena prosesnya itu tidak langsung ke Dispenduk tapi kekecamatan, mulai 2013 itu semua proses tidak langsung ke Dispenduk tapi kita lewat dari kecamatan bukan pemohon yang kesini”.(RS Maret 2015)

Berdasarkan informan RS mengungkapkan kendala yang dihadapi yakni permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat adalah karena masyarakat sendiri yang kurang faham tentang pengurusan data kependudukan, akhirnya banyak

persyaratan yang kurang lengkap dan mengurus sendiri ke Dispenduk. Padahal mulai tahun 2013 pengurusan data kependudukan melewati kecamatan sehingga pemohon cukup mengurus di Kecamatan bukan datang langsung ke Dispenduk. Dalam hal ini informan RS juga menambahkan yakni :

“Biasanya kalau saya begini, kalau yang saya harapkan di Kecamatan itu kalau sudah ada data yang tidak lengkap saya harapkan untuk langsung dikembalikan, karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat di Kecamatan, karena orang itu akan datang setelah 14 hari ngambil sudah jadinya jadi saya harapkan sebelum di bawah ke Dispenduk dikembalikan dulu kalau bermasalah. karena itu saya harap pihak kecamatan harus lebih teliti. Prosesnya lama dan ditarik biaya untuk pengurusan KK dan KTP. Mulai bulan November 2011 dengan Perbub No 21 tahun 2011 retribusi pembuatan KK dan KTP itu gratis apa bila masyarakat itu mengurus sendiri, akan tetapi kalau lewat biro jasa pasti membayar, kalau ingin gratis harus diurus sampai kecamatan, nanti pihak kecamatan yang bawah kesini. Untuk pihak kecamatan sudah ada biayanya sendiri”. (RS Maret 2015)

Hal yang serupa ditambahkan oleh informan PM sebagai berikut :

“Berarti kita harus lebih selektif lebih memperhatikan petugas apa merasa honorinya kurang atau gimana, sehingga kita bisa meminimalisasi penyalahgunaan wewenang pengurusan akte sehingga tidak menarik kepada masyarakat, kalau masyarakat itu ngasih sebagai uang transport itu gak masalah, kalau petugas sampai meminta itu yang kita hindari. Intinya pengurusan Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran itu sebenarnya sederhana selagi masyarakat biasa memenuhi persyaratan yang di butuhkan, tapi kadang-kadang tidak mau mengurus sendiri. Kita harus lebih selektif dalam memilih petugas pengantar dari kecamatan, sehingga kita bisa meminimalisasi penyalahgunaan wewenang pengurusan akte sehingga tidak menarik biaya kepada masyarakat, kalau masyarakat itu member sebagai uang transport itu tidak masalah, tapi kalau petugas sampai meminta biaya itu yang kita hindari”. (PM Maret 2015)

Dalam hal yang di tambahkan oleh informan RS dan PM yaitu mengenai pengurusan data kependudukan yang menuntut kelengkapan dokumen sebelum dokumen tersebut sampai di Dispenduk. Jadi ketika dokumenya tidak lengkap agar

langsung dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu. Untuk itu RS menghimbau kepada pihak kecamatan untuk lebih teliti. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PM mengenai biaya pengurusan data kependudukan, pihak kecamatan diminta tidak meminta kepada pemohon, walaupun pemohon memberi untuk sekedar uang transport masih bisa untuk dimaklumi. Karena menurut RS berdasarkan Perbub No 21 tahun 2011 retribusi pembuatan Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) itu gratis dan untuk pihak kecamatan sudah ada anggarannya sendiri. Untuk itu pihak kecamatan di himbau tidak menyalahgunakan wewenang dengan menarik dana pengurusan data kependudukan kepada pemohon. Dalam hal tersebut informan PM menyarankan untuk lebih selektif dalam memilih petugas pengantar data kependudukan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Hal lain disampaikan oleh AM sebagai berikut :

“Tentang pembuatan surat usaha, tentang pelatihan dan memintak bantuan peralatan. Biasanya masyarakat masih salah faham dengan surat usaha, menurut mereka dengan surat usaha bisa dapat bantuan langsung dari pemerintah, untuk pelatihan kami memberi pelatihan anak-anak muda yang punya potensi usaha. Kami biasanya juga menyediakan peralatan, jadi yang membutuhkan peralatan bisa langsung ke kantor dengan membawa proposal, kalau memang ada peralatannya kita bisa langsung kasih, kalau tidak ada ya nunggu anggaran tahun berikutnya.(AM Maret 2015)

Berdasarkan penjelasan informan AM perwakilan dari Disperindag bahwa masyarakat masih bingung dengan fungsi surat usaha, bahkan masyarakat juga masih salah faham dengan adanya surat usaha tersebut, menurut mereka dengan adanya surat usaha mereka secara langsung akan dapat bantuan dari pemerintah. Dengan adanya permasalahan tersebut SKPD-SKPD perwakilan dari Instansi masing-masing langsung memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh AM sebagai berikut :

“Kita memberikan sosialisai kepada masyarakat yang mempunyai usaha tentang fungsi Surat Keterangan Usaha (SKU) dan SIUP agar masyarakat tidak salah faham. Biasanya kalau SKU itu pembuatannya

Dinas Koprasi dan UMKM sedang SIUP itu Disperindag.”( AM Maret 2014 )

Setiap permasalahan dari masyarakat yang muncul di program dialog solutif biasanya langsung di kasihkan kepada instansi-instansi terkait. Karena yang tahu solusinya adalah istansinya masing-masing, seperti yang diungkapkan AM tentang solusi dari Disperindang tentang pembuatan SKU dan SIUP, solusi yang akan diberikan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil atau besar.

#### **4.3.2.2 Hambatan Politis**

Dalam pelaksanaan Program Dialog Solutif terdapat juga hambatan yang bersifat politis, penjelasan tentang hambatan politis diungkapkan oleh informan IT sebagai berikut;

“Hambatan politis itu dek, yaitu hambatan yang terjadi karena adanya momen-momen politik, seperti Pilpres, Pileg, Pilbub dan yang lainnya. Lhaa, kenapa hal ini menjadi hambatan, itu karena ketika ada momen politik seperti itu maka kita harus menunda pelaksanaan kegiatan dialog solutif. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya persepsi negative yang muncul dari masyarakat”. (IT Maret 2015)

Berdasarkan informan It diatsa bahwa hambatan politis itu hambatan yang terjadi ketika adanya momen politik seperi pilpres, pileg dan pilbub. Dengan adanya kegiatan tersebut pelaksanaan program dialog solutif harus ditunda. Hal ini yang mengatasi munculnya persepsi negative yang muncul dari masyarakat. Senada dengan yang di ungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Jadi hambatan itu terkadang tidak sesuai dengan agenda yang telah kita buat. Misalnya, seperti tahun kemarin karena adanya Pileg dan Pilpres ya kita menghindari karena adanya opini dari bawah yaitu adanya unsur titipan kanpanye dan lain sebagainya. Kita tunda karena kendala itu sampai hari tenang. Hambatan lain yaitu karena faktor alam, danjuga adanya kegiatan pimpinan yang tidak biasa ditinggalkan. Karena dialog solutif itu Bupati harus hadir, jadi kata kuncinya memang koordinasi”. ( ZA Maret 2015)

Penjelasan dari informan pelaksana program dialog solutif bagian Humas ZA bahwa hambatan kegiatan dialog adalah tidak sesuainya jadwal atau agenda yang di buat oleh Humas. Contohnya seperti tahun kemarin karena adanya Pileg dan Pilpres, dialog solutif sempat ditunda karena takut adanya opini titipan kampanye. Selain itu adanya hambatan yang berhubungan dengan cuaca. Pastinya kalau cuaca sedang tidak baik kegiatan tersebut tidak akan terlaksana maksimal. Faktor lain adalah kegiatan atau jadwal dari Bupati sendiri, karena program ini bisa berjalan ketika Bupati bisa hadir, ketika Bupati tidak bisa hadir karena masalah yang tidak dapat di tinggalkan atau diwakilkan maka kegiatan ini tidak akan terlaksana. Jadi koordinasi yang baiklah yang dapat meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan program ini.

#### **4.3.2.3 Anggaran Yang tidak Tepat Waktu**

Pelaksanaan program dialog solutif bisa terhambat karena anggaran yang dianggarkan pemerintah bagian Humas Pemda Jember belum turun. Seperti yang di ungkapkan informan IT sebagai berikut:

“Terlambatnya turun anggaran bisa menghambat pelaksanaan program dialog solutif karena kita sudah menjadwalkan pelaksanaan program dialog solutif ini sebelum mengajukan anggaran. Jadi kadang-kadang bisa berbenturan sama program lain”(IT Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan BI dikuatkan oleh Informan ZA sebagai berikut;

“Anggaran yang tidak tepat waktu ini bisa menghambat pelaksanaan program dialog solutif. karena kita sudah menetapkan jadwal pelaksanaan program dan ternyata uang APBD belum cair”.

(BI Mater 2015)

“Keterlambatan pencairan anggaran pelaksanaan program dialog solutif ini sangat menghambat pelaksanaan program. karena kami sudah menentukan jadwal pelaksanaan program dialog solutif tersebut.( ZA Maret 2015)

Seperti juga yang di ungkapkan informan ZA sebagai berikut:

“Pencairan anggaran yang tidak tepat waktu ini biasanya yang menghambat pelaksanaan program dialog solutif karena bagian humas sudah menentukan jadwal pelaksanaan program”.  
(A Maret 2015)

Berdasarkan informan IT, ZA, BI dan A diatas bahwa pada waktu pelaksanaan program dialog solutif sangat terhambat ketika anggaran dana yang di ajukan belum cair atau turun. Karena jadwal pelaksanaan program dialog solutif ini sudah ditentukan ketika sebelum mengajukan anggaran oleh Bagian Humas Pemda Jember.

Berdasarkan penjelasan keseluruhan diatas bahwa hambatan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif adalah hambatan teknis, hambatan politis dan anggaran yang tgrun tidak tepat waktu. Hal ini dimaknai dengan konsep P.Warwieck, (1988;17) dimana implemetasi program mempunya factor penghambat yaitu Banyaknya pemain (*actor*) yang terlibat, Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda, Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilakukan berarti makin banyak waktu yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan proyek yang pengesahan design harus ditetapkan ditingkat nasional terlalu banyak menyita waktu. dan Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, maka makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan.

#### **4.4 Dampak Pelaksanaan Program Dialog Solutif**

Dampak dari pelaksanaan program dialog solutif ini adalah dapat dijadikan pedoman dalam mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan untuk pembangunan Desa dan bisa menampung keinginan-keinginan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat ikut aktif dalam pelaksanaan program maka dampak program dialog solutif akan lebih bagus seperti yang di ungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut:

“Kalau peningkatannya itu hanya berdasar pada lapopran-laporan dari serap aspirasi masyarakat hasil Musrembang, itu pasti ada wilayah yang belum terjangkau, tapi kalau dengan dialog solutif semua dapat terjangkau, seperti adanya jalan yang rusak, Pak Bupati dalam dialog solutif akan menugaskan instansi terkait untuk mengkoscek semua padukuan-padukuhan yang belum tersentuh.” (ZA Maret 2015)

Seperti juga yang di ungkapkan oleh Informan IT sebagai berikut;

“Mempercepat pembangunan di wilayah dan tepat sasaran, ada monitoring dari SKPD bagian Humas, SKPD terkait akan merespon adanya usulan dari masyarakat, hingga program ini sesuai dengan keinginan masyarakat”. (IT Maret 2015)

Dan juga yang di ungkapkan oleh Informan BI sebagai berikut;

“Kalau peningkatannya itu hanya berdasar pada lapopran-laporan dari serap aspirasi masyarakat hasil Musrembang, itu pasti ada wilayah yang belum terjangkau”. (BI Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA, IT dan BI di atas menerangkan bahwa dampak peningkatan pembangunan dengan adanya program dialog solutif bisa mempercepat pembangunan di seluruh wilayah dan tepat sasaran. Di iringi adanya monitoring dari SKBD bagian Humas Pemda Jember terkait dengan usulan-usulan dan masukan-masukan dari masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Korten (dalam Tarigan, 2000:19) di (bab 2 hal 29) bahwa Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

#### 4.4.1 Meningkatkan Forum Silaturahmi Antara Pemerintah Kabupaten Dan Masyarakat

Program dialog solutif ini untuk meningkatkan forum silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Informan ZA sebagai berikut;

“Dengan adanya program dialog solutif ini pemerintah bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. karena pemerintah sibuk dengan kerjanya, jadi kalau dikantor sulit untuk ditemui maka dalam pelaksanaan program dialog solutif ini Humas memfasilitasi masyarakat dan pemerintah bertemu dalam satu lokasi dan duduk bersama”. (ZA Maret 2015)

Seperti juga yang di ungkapkan oleh Informan IT sebagai berikut;

“Untuk meningkatkan forum silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat humas memfasilitasi dengan program dialog solutif. Yang nantinya dalam program tersebut masyarakat dan pemerintah bertatap muka dan berdialog dalam satu lokasi”. (IT Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan BI dikuatkan oleh Infoman A sebagai berikut;

“Dalam pelaksanaan program dialog solutif ini sebagai sarana untuk meningkatkan forum silaturahmi antara masyarakat dan pemerinta. karena masyarakat dan pemerintah bisa bertemu secara langsung di lokasi yang sama”.(BI Maret 2015)

“Sebagai sarana untuk silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten. Bagian Humas Pemda Jember memfasilitasi dengan program dialog solutif yang mana masyarakat bisa bersilaturahmi atau bertemu sekaligus bisa berdialog secara langsung dengan pemerintah kabupaten Jember”. (A Maret 2015)

Berdasarkan informasi ZA, IT, BI dan A diatas bahwa pelaksanaan program dialog solutif ini sebagai sarana silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah kabupaten. dengan duduk didalam satu lokasi dan berdialog bersama yang difasilitasi oleh Bagian Humas Pemda Jember.

#### **4.4.2 Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Untuk Kebutuhan Pembangunan Yang Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pada Tahun Berikutnya**

Pelaksanaan program dialog solutif ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk kebutuhan pembanguna yang dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan program pembangunan pada tahun berikutnya dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang di ungkapkan oleh Informan ZA sebagai berikut;

“Program dialog solutif ini menjaring aspirasi untuk kebutuhan pembangunan yang dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Serap aspirasi ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan kegiatan bedah potensi Desa dan temu karya rakyat. yang mana masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan sarana yang ada di Desanya”.(ZA Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan IT dikuatkan oleh Infoman BA sebagai berikut;

“Serap aspirasi dalam program dialog solutif ini dikemas dalam kegiatan bedah potensi Desa dan Temu karya rakyat yang mana masyarakat banyak yang mengusulkan potensi-potensi atau permasalahan yang ada diDesa. Tapi bisanya masyarakat ini lebih banyak mengusulkan permasalahan yang ada diDesanya.maka dari itu usulan-usulan dari masyarakat ini bisa dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya”.(IT Maret 2015)

“Program dialog solutif yang dikemas dalam kegiatan bedah potensi Desa dan Temu Karya Rakyat yaitu untuk menjaring aspirasi untuk kebutuhan pembangunan yang dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. dalam kegiatan tersebut masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan yang ada diDesanya”. (BI Maret 2015)

Seperti yang di ungkapkan oleh Informan ZA sebagai berikut;

“Dalam serap aspirasi pemerintah kabupaten jember difasilitasi Humas Pemda Jember yang di kemas dalam program dialog solutif yang dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu temu karya rakyat dan Bedah Potensi Desa. Dalam kegiatan tersebut masyarakat bisa

menyampaikan aspirasinya untuk dijadikan bahan penyusunan perencanaan untuk tahun berikutnya”.(A Maret 2015)

Berdasarkan informasi ZA, BI, IT dan A diatas bahwa pemerintah Kabupaten Jember yang difasilitasi Humas Pemda melalui serap aspirasi yang dikemas dalam program dialog solutif dengan dua kegiatan yaitu bedah potensi Desa dan temu karya rakyat. Program dialog solutif ini untuk menyerap aspirasi untuk peningkatan pembangunan dan dijadikan untuk bahan perencanaan pada tahun berikutnya .

Ketika semua komponen yang ada di dalam sebuah pemerintahan bisa berjalan searah pastinya kesejahteraan masyarakat akan segera tercapai. Dalam pelaksanaan program dialog solutif ini pemerintah berusaha untuk mensinergikan semua komponen atau aspek yang ada di Kabupaten Jember. Dengan harapan jika semua bisa bersinegi maka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember bisa tercapai. Menurut teori G. Shabbir Cheema dan dennis A. Rondinelli dalam Wahab (2004) di (bab 2 hal 24) bahwa ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak keberhasilan suatu program yaitu Kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Artinya bahwa dampak dari keberhasilan implementasi program dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil.

#### **4.4.3 Dampak Pembangunan Infra Struktur Dan Sarana Prasarana Dari Aspirasi Masyarakat**

Program Dialog Solutif menjadi salah satu program pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program ini berupa serap aspirasi, untuk pembangunan infra stuktur dan sarana prasarana masyarakat. Dengan harapan jika pemerintah Kabupaten Jember mengetahui secara jelas kondisi di masyarakat akan dapat mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten Jember. Seperti yang diungkapkan oleh informan ZA sebagai berikut;

“Ya pasti ada dampak pembangunan bagi masyarakat, yang jelas tujuan dari program pemerintah itu kan tidak lain adalah mensejahterakan masyarakatnya, jadi harus dikawal. Pengawasan itu melewati koordinasi, silaturahmi, komunikasi dan publikasi. Karena banyak potensi di wilayah yang tidak terekspos, jadi dengan adanya program dialog solutif ini semua bisa terexpos ke semua masyarakat”. (ZA Maret 2015)

Berdasarkan informan ZA diatas bahwa dampak pembangunan bagi masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. dengan melalui koordinasi, silaturahmi, komunikasi dan publikasi. Karena banyak potensi-potensi yang ada diwilayah yang belum bisa terekpos jadi pada waktu pelaksanaan program dialog solutif bisa terexpos kesemua masyarakat. Senada juga diungkapkan oleh informan JS sebagai berikut;

“Dampak pembangunan melalui dari serap aspirasi masyarakat pada waktu pelaksanaan program dialog solutif seperti sarana penerangan jalan. Masyarakat bisa beraktifitas di malam hari setelah adanya lampu penerangan di daerah- daerah yang gelap karena dapat bantuan dari PJU, bahkan keluar dari Desanya ke Desa lain pun berani karena sudah tidak gelap lagi” (JS Maret 2015)

Penjelasan informan JS diatas bahwa dampak pembangunan melalui serap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program dialog solutif seperti sarana penerangan jalan. Jadi masyarakat bisa beraktifitas atau keluar malam setelah adanya lampu penerangan jalan di dearhah-daerah yang gelap karena dapat bantuan lampu dari PJU. Hal ini juga diungkapkan oleh informan RS sebagai berikut;

“Kita memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dikecamatan supaya masyarakat tidak jauh-jauh mengurus administrasi ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Jember. Meskipun pengurusan administrasi kependudukan gratis tapi kalau masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sendiri memerlukan biaya transportasi jadi kami menyerahkan semua pe ngurusan dokumen pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil dikecamatan masing-masing”.(RS Maret 2015)

Berdasarkan penjelasan dari informan RS diatas bahwa dispenduk memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan masing-masing. Soalnya kalau masyarakat mengurus ke dispenduk langsung bisa mengeluarkan biaya untuk transportasi padahal pengurusan dokumen kependudukan itu pengurusanya tanpa dipungut biaya. Dan diungkapkan juga oleh informan AM dan M sebagai berikut;

“Berdasarkan saran atau usulan dari masyarakat melalui pelaksanaan program dialog solutif. Disprindag mengeluarkan program atau pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat. (AM Maret 2015)

“Kalau sarana kita kemarin itu dapat mbak. tapi mungkin semua Desa juga insallah dapat mbak, sarana yang saya maksud seperti timbangan untuk balita yang dimintak ibuk-ibuk PKK pada waktu dialog, terus yang ke dua itu tentang penggerukan DAM dan perbaikan jembatan jurusan Tegalsari dan Ambulu” .(M Maret 2015)

Penjelasan informan AM diatas bahwa Disprindag mengeluarkan program atau pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat. Sedangkan informan M diatas bahwa pada waktu pelaksanaan program dialog solutif perwakilan Desa tegalsari ambulu mendapatkan bantuan berupa alat timbang PKK dan perbaikan jembatan yang menghubungkan jurusan Desa Tegalsari dan Ambulu.

Kesejahteraan masyarakat pastinya menjadi dampak bagi setiap kepala pemerintahan dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan Desa. Semua kepala pemerintahan berpacu untuk menemukan konsep, cara dan strategi yang tepat agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program Dialog Solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Dimana implementasi program dialog solutif mempunyai dua kegiatan yaitu bedah potensi desa dan temu karya rakyat. Kegiatan bedah potensi desa dimulai pada tahun 2006 yang diawali dari Kecamatan Umbulsari dan kegiatan temu karya rakyat dimulai pada tahun 2009 yang diawali dari Kecamatan Tanggul. Untuk melihat dari implementasi program ini, adapun tahapan yang dimulai dari tahap persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Terminasi yang disimpulkan sebagai berikut;

#### a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan suatu program. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan program. sehingga program dapat berjalan lancar dan tujuan dari pelaksanaan program dapat tercapai maksimal. Tahap persiapan meliputi persiapan petugas dan persiapan dilapangan yang disimpulkan sebagai berikut;

##### 1. Persiapan Petugas

Persipan petugas dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Bagian Humas yang meliputi rapat koordinasi bagian Bagian Humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program dialog solutif.

##### 2. Persiapan Dilapangan

Persiapan lapangan yang dimaksud adalah penentuan lokasi kegiatan dan keamanan pelaksanaan.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program dialog solutif dibagi menjadi dua kegiatan yaitu Bedah Potensi Desa dan temu karya rakyat yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Kegiatan Bedah Potensi Desa

Pelaksanaan kegiatan bedah potensi desa meliputi penampilan potensi Desa, serap aspirasi dan program Desa.

2. Kegiatan Temu Karya Rakyat

Pelaksanaan kegiatan temu karya rakyat sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi Desa, pameran potensi yang ada di masyarakat, dan pelayanan umum.

- c. Evaluasi

Evaluasi program dilakukan oleh Humas Pemda Jember dan untuk evaluasi kegiatan dilakukan oleh instansi-instansi atau dinas-dinas masing-masing.

- d. Terminasi

Terminasi pelaksanaan program dilakukan oleh bagian Humas Pemda Jember sedangkan terminasi kegiatan dilaksanakan oleh instansi-instansi dan dinas-dinas yang terkait.

Dalam pelaksanaan program dialog solutif terdapat faktor pendukung dan faktor penghamabat dari pelaksanaan program seperti yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dialog solutif seperti yang disimpulkan sebagai berikut;

- a. Dukungan Penuh Dari Pihak Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Jember

Pelaksanaan program dialog solutif ini sangat didukung oleh pihak Kabupaten Jember karena tujuan program dialog solutif ini adalah untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Sinergitas Antara Lembaga Pemerintah Dan SKPD Terkait

Dalam pelaksanaan program dialog solutif ini melibatkan SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah), untuk sinergitas antara lembaga pemerintah atau SKPD ini pihak humas sebelum pelaksanaan

program dialog solutif ini mengadakan rapat dengan SKPD-SKPD terkait.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yaitu dukungan dari masyarakat untuk tidak hanya hadir di program dialog solutif tetapi juga menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan program pembangunan.

d. Anggaran Yang Tepat Waktu

Jadi ketika anggaran yang digunakan pada waktu pelaksanaan program cair tepat waktu, maka program diaog solutif langsung dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program dialog solutif seperti yang disimpulkan sebagai berikut;

a. Hambatan Teknis

Hambatan teknis yang terjadi pada pelaksanaan program dialog solutif seperti cuaca yang tidak mendukung, perlengkapan yang tidak fungsi sesuai dengan fungsinya, dan akses jalannya yang kurang memadai.

b. Hambatan Politis

Dalam pelaksanaan Program Dialog Solutif terdapat juga hambatan yang bersifat politis seperti Pilpres, Pileg, Pilbub dan yang lainnya.

c. Anggaran Yang Tidak Tepat Waktu.

Pelaksanaan program dialog solutif bisa terhambat dilaksanakan karena anggaran yang dianggarkan pemerintah bagian Humas Pemda Jember belum turun atau turunnya tidak tepat waktu.

Dampak dari pelaksanaan program dialog solutif ini adalah dapat dijadikan pedoman dalam mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan untuk pembangunan Desa dan bisa menampung keinginan-keinginan yang diinginkan oleh masyarakat. seperti yang disimpulkan sebagai berikut;

1. Meningkatkan Forum Silaturahmi Antara Pemerintah Kabupaten Dan Masyarakat

Program dialog solutif ini untuk meningkatkan forum silaturahmi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat.

2. Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Untuk Kebutuhan Pembangunan Yang Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pada Tahun Berikutnya.

Pelaksanaan program dialog solutif ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk kebutuhan pembanguna yang dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan program pembangunan pada tahun berikutnya dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Dampak Pembangunan Infra Struktur Dan Sarana Prasarana Dari Aspirasi Masyarakat

Program Dialog Solutif menjadi salah satu program pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program ini berupa serap aspirasi, untuk pembangunan infra stuktur dan sarana prasarana masyarakat. Dengan harapan jika pemerintah Kabupaten Jember mengetahui secara jelas kondisi di masyarakat akan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kabupaten Jember.

## 5.2 SARAN

Beberapa hal yang coba penulis rumuskan dalam saran merupakan salah satu wujud kepedulian penulis tentang pelaksanaan program ini. Dimana rumusan saran ini penulis ambil berdasarkan observasi dan wawancara langsung kepada pelaksana dan sasaran program. Rumusan saran tersebutdiantaranya :

1. Pada waktu pelaksanaan Kegiatan Temu Karya Rakyat, Bupati tidak hanya sebagai moderator antara masyarakat dan pemerintah, karena Bupati juga berhak untuk memberikan jawaban dari pertanyaan masyarakat, sekaligus

sebagai penentu keputusan terkait dengan program-program yang di usulkan oleh warga.

2. Program dialog solutif seharusnya dilaksanakan di tiap kecamatan agar tidak terlalu banyak masyarakat yang hadir dan kegiatan dapat lebih kondusif.
3. Program dialog solutif adalah untuk silaturahmi antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi program ini hendaknya dilanjutkan dengan kemasan yang baru yang lebih menarik dan lebih kondusif.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2012). *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat :Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Bagian humas kabupaten jember ,2013, *pedoman pelaksanaan PPID pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berserta dasar-dasar hukum*
- Budi Winarno. (2002). *Kebijakan Publik:Teori Dan Proses* .Yogyakarta :Media Pressindo
- Bungin, B. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindoPersada: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edi Suharto. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung :CV .Alfabeta
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasa-dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP Malang.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian KualitatifdankuantitatifuntukIlmu-ilmuSosial*. Jakarta :DepartemenIlmuAdministrasi FISIP UI.
- Jim Ife Frank Tesoriero. (2008). *Community Development*(Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pusat Pelajar
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

- Moleong, J. L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narbuko, Cholid. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Cetak kesepuluh. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Riant Nugroho D. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media komputido
- Sembodo, Heru. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Barawijaya. Malang.
- Soenarko. 2000. *Public Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, B dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Yohanes Da Masenus Arus, Damairin Pakpahan, Sabastian E. Saragih, Ima Susilowati, Mohammad Thonthowi, Ahmad Syakur, Nurharsono. (2011) *Panduan Pelatihan Advokasi Berorientasi Dampak*. Yogyakarta :INSIST Press

## **Internet**

- <http://www.keterbukaaninformasi.com> , diakses pada tanggal 28 september 2014
- <http://www.ppid.kominfo.go.id>, diakses pada tanggal 30 september 2014
- <http://www.jemberpost.com/berita-utama/bupati-jember-terima-kasih-atas-dukungan-semua-pihak/> diakses pada tanggal 21 mei 2015

(<http://www.korem083.mil.id/berita/kodim-0824-jember/dialog-solutif-bupati-bersama-forpimda-kab>) diakses pada tanggal 21 mei 2015

<http://kominfo.jatimprov.go.id/watch/28330> diakses pada tanggal 21 mei 2015

## **Peraturan Perundang-undangan**

Pemerintah Republik Indonesia.2008. *Undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang kererbukaan informasi publik* . Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah republik Indonesia . 2010 . *nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik* . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan komisi informasi. 2010 . *nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi pada publik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan menteri dalam negeri. 2010. *nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah* . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan komisi informasi. 2013. *nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

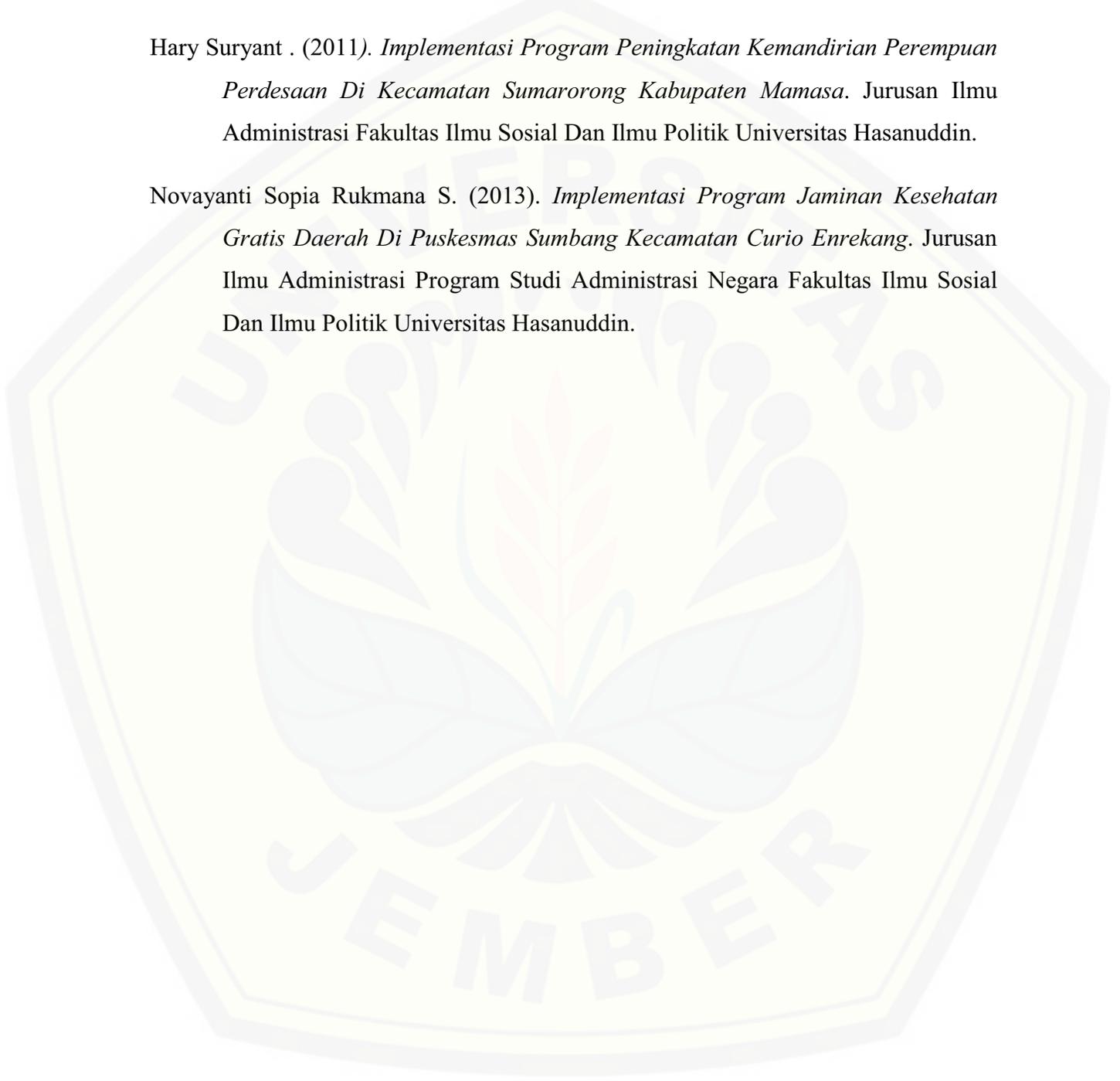
## **Skripsi**

Ajeng Anggi Yulianti. (2010). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang*

*Priode tahun 2009. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.*

Hary Suryant . (2011). *Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa*. Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Novayanti Sopia Rukmana S. (2013). *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang*. Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.



**KAJIAN TERHADAP PENELITIAN TERDAHULU**

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah		
	1	2	3
Judul Penelitian	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang Priode tahun 2009	Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang	Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa
Tahun Penelitian	2010	2013	2011
Keluaran Lembaga	Universitas Sultan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ageng Tirtayasa Serang	Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara	Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi
Pertanyaan penelitian	Seberapa Besar Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang Priode tahun 2009	1. Bagaimana implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ? 2. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Jaminan	1. Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa ? 2. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan di Kecamatan

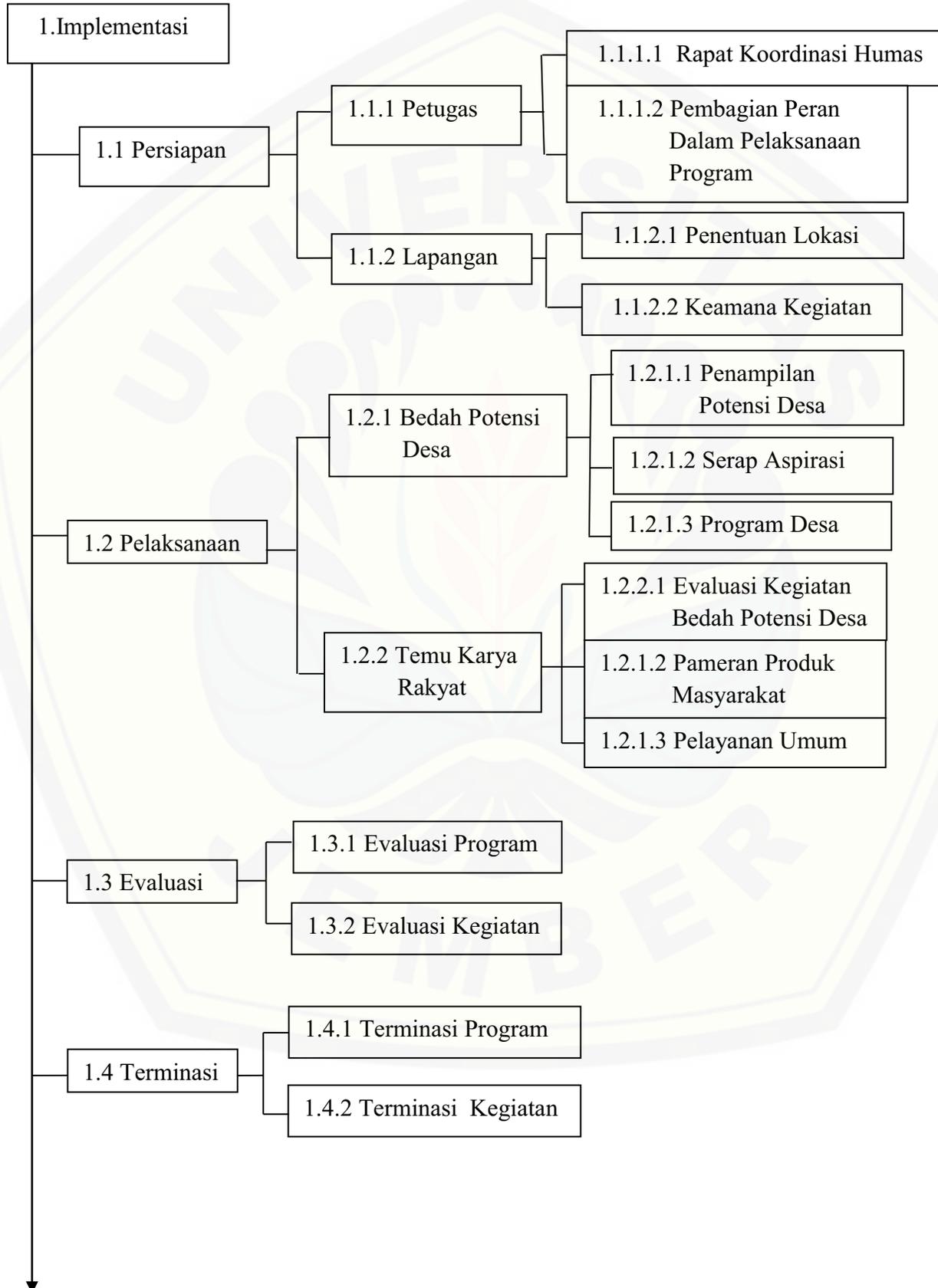
		Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ?	Sumarorong Kabupaten Mamasa ?
Temuan	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang Priode tahun 2009 belum maksimal, hal ini dikarenakan factor penghambat yaitu dana, kualitas sumber daya manusia yang tidak merata.	Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah yang diterapkan di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaanya	Implementasi program peningkatan kemandirian perempuan di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa terkhusus di Desa Rantekamase berjalan dengan baik dan cukup berhasil
Metode	Kuantitatif Deskriptif	kualitatif deskriptif	kualitatif deskriptif.
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
Keunggulan penelitian	Mengambarkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kecamatan Candasari Kabupaten Pandeglang Priode tahun 2009	Mengambarkan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Enrekang	Mengambarkan Implementasi Program Peningkatan Kemandirian Perempuan Perdesaan Di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa

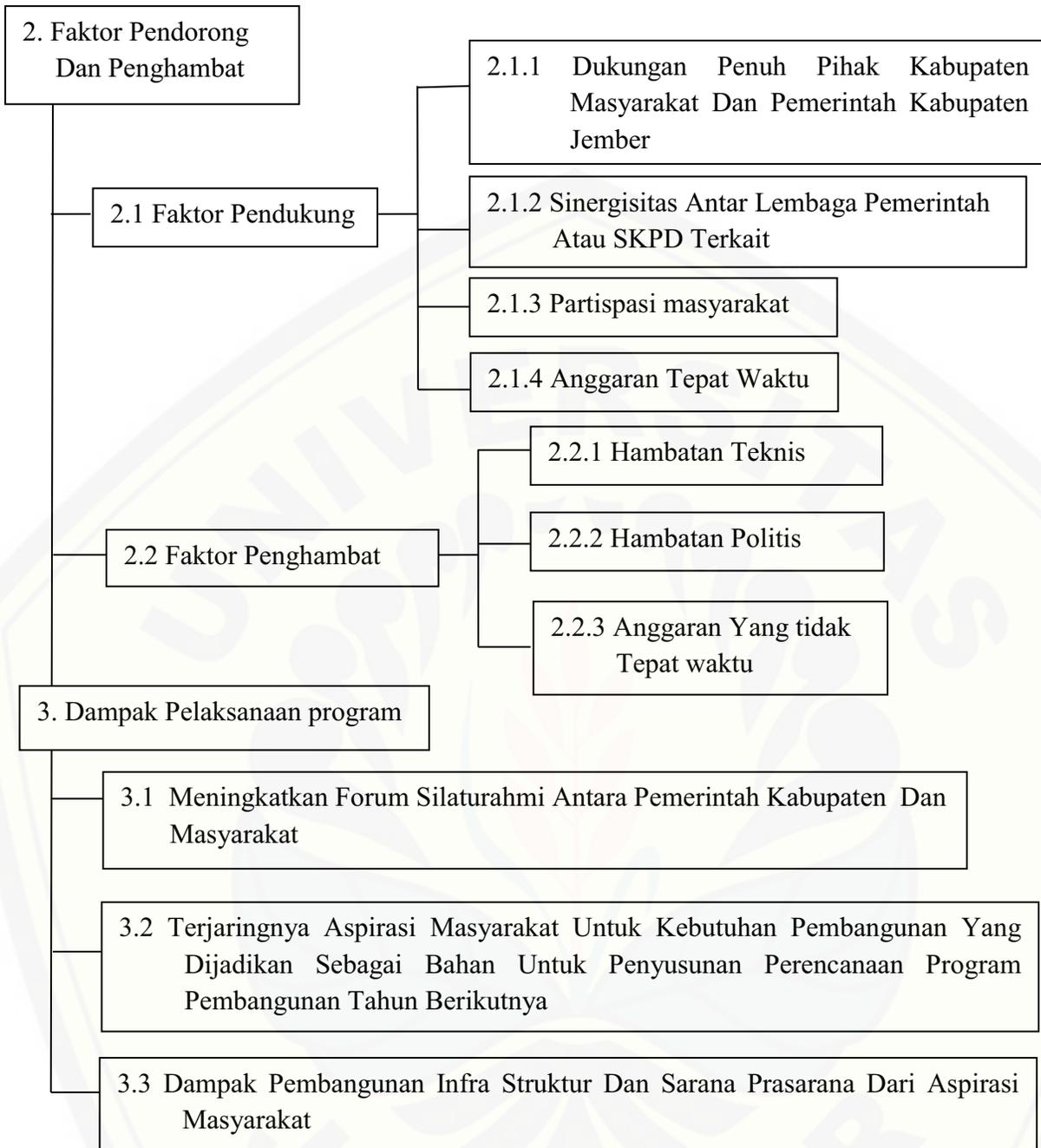
Persamaan dengan penelitian ini	Mengambarkan Implementasi Program	Mengambarkan Implementasi Program dan menggunakan metode kualitatif deskriptif	Mengambarkan Implementasi Program menggunakan metode kualitatif deskriptif
Perbedaan dengan penelitian ini	Menggunakan Kuantitatif Deskriptif	Memfokuskan pada Program Jaminan	Terfokus pada program Peningkatan Kemandirian Perempuan

Sumber: Diolah berdasarkan penelusuran pustaka, 2014



**TAKSONOMI PENELITIAN**  
**Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**





Pedoman Wawancara

*(Interview Guide)*

Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  
Kabupaten Jember

Kode: 1

Hari/Tanggal:

Tempat:....

**Identitas Informan:**

- a. Nama:
- b. Jenis kelamin:
- c. Kedudukan informan;
- d. Pekerjaan:
- e. Lama menjabat:

1. apa yang melatar belakangi munculnya program ini?
2. Apa harapan bapak tentang program ini?
3. Seperti apa gambaran awal program ini?
4. Apa peran bapak dalam pelaksanaan program ini?
5. Pelaksana kegiatan tersebut terakait dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing peran yang dijalankan ?
6. Sampai saat ini sejauh mana pelaksanaan program ini?
7. Apakah ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program ini?
8. Upaya yang telah dilaksanakan terkait dengan hambatan yang ada ?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang program ini?
10. Hal apa saja yang sudah dicapai dengan adanya program ini?
11. Dampak nyata program bagi kesejahteraan masyarakat ? (dengan dokumentasi yang terkait)
12. Dampak program bagi peningkatan pembangunan ?

## Pedoman Wawancara

### *(Interview Guide)*

Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember

Kode: 2

Hari/Tanggal:

Tempat:....

#### **Identitas Informan:**

- f. Nama:
- g. Jenis kelamin:
- h. Kedudukan informan;
- i. Pekerjaan:
- j. Lama menjabat:

1. Apa peran bapak dalam pelaksanaan program dialog ini?
2. Pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan dinas ?
3. Apa saja solusi yang sudah dilakukan?
4. Menurut bapak kendala apa saja yang ada pada saat pelaksanaan dialog solutif?
5. Menurut pendapat saudara solusi apa yang bisa ditawarkan terkait dengan kendala yang ada dalam pelaksanaan dialog?
6. Dalam proses dialog permasalahan apa saja yang muncul di masyarakat?
7. Menurut bapak manfaat apa saja yang dapat dirasakan oleh lembaga pemerintahan terkait dengan pelaksanaan program dialog?
8. Dampak pelaksanaan program dialog solutif bagi lembaga dan kesejahteraan masyarakat?
9. Rencana kerja yang mendasari program dialog

## Pedoman Wawancara

### *(Interview Guide)*

Implementasi Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember

Kode : 3

Hari/Tanggal:

Tempat:

#### **Identitas Informan:**

- a. Nama:
- b. Jenis kelamin:
- c. Kedudukan informan;
- d. Pekerjaan:
- e. Lama menjabat:

1. Bapak pernah atau tahu dengar program dialog solutif?
2. Bapak pernah ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan program tersebut?
3. Bentuk partisipasi yang diberikan ?
4. Bagaimana proses penyampaian partisipasi ?
5. Bagaimana menurut bapak pelaksanaan program dialog solutif?
6. Hambatan pada saat pelaksanaan tsb ?
7. Manfaat kegiatan tsb ?
8. Dampak kegiatan tsb ?
9. Sudah sesuai dengan keinginan bapak apa belum?
10. Apa Harapan bapak dengan adanya program ini?
11. Apakah program ini benar-bener bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyapaikan aspirasi bapak?
12. Saran perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan yang dapat diberikan ?

TRANSKRIP REDUKSI

	Implementasi Program	Transkrip
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingin mempercepat proses penyerapan informasi ke masyarakat langsung, oleh bapak Bupati karena ingin mengetahui aspirasi tentang pembangunan daerah, mensinkronisasi informasi dari masyarakat dan jajaran pemerintah apakah benar informasi tersebut. Menyelaraskan informasi antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun masyarakat dan kebutuhan masyarakat dalam arti membangun masyarakat. (IT Maret 2015)</li> <li>• Bupati dan SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah) duduk bersama untuk mendengarkan apa yang diinspirasi masyarakat. Dan memberikan solusi terkait dengan beberapa permasalahan yang berkembang di masyarakat.(ZA Maret 2015)</li> </ul>
1.1 Persiapan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelum pelaksanaan program dialog solutif kita biasanya mempersiapkan petugas dan mempersiapkan dilapangan. Untuk persiapan petugas biasa kita mengadakan rapat koordinasi bagian Humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Untuk persipaaan lapangan yang dipersiapkan biasanya itu lokasi kegiatan dan keamanan pada waktu pelaksanaan program. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Untuk persiapan pelaksanaan program dialog solutif ini pihak humas mempersiapkan petugas dan</li> </ul>

	<p>1.1.1 Petugas</p>	<p>1.1.1.1 Rapat Koordinasi</p>	<p>mempersiapkan dilapangan supaya pelaksanaan program berjalan dengan lancar. karena kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat dan SKPD(Satuan Kerja Pemerintah Daerah)di Kabupaten Jember”. (IT Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan program dialog solutif biasanya mempersiapkan petugas dan mempersiapkan dilapangan supaya pelaksanaan program dialog solutif ini bisa berjalan dengan lancar”. (BI Maret 2015)</li> <li>• Dalam persiapan petugas biasanya kami mengadakan rapat koordinasi bagian humas dan pembagian peran dalam pelaksanaan program. Supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif bisa mempersiapkan tugasnya masing-masing.(ZA Maret 2015)</li> <li>• Persiapan yang dilakukan oleh petugas sebelum dilaksanakan program dialog solutif biasanya rapat koordinasi dan pembagian peran dalam pelaksanaan program.Supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif sudah tahu tugas masing-masing dan dalam pelaksanaan program berjalan dengan lancar. ( BI Maret 2015)</li> <li>• Sebelum pelaksanaan program kami diajak kepala bagian Humas rapat dan pembagian peran dalam pelaksanaan program dialog solutif. Supaya pada waktu pelaksanaan program bisa berjalan dengan lancar dan semua petugas bisa memposisikan tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan program dialog solutif. (A maret 2015)</li> <li>• Dari pihak Humas mengadakan rapat koordinasi</li> </ul>
--	----------------------	---------------------------------	--

dengan Kasubbag (kepala Sub Bagian) yang ada di Humas. Setelah diadakannya rapat saya selaku kepala Humas memberikan mandat kepada Bidang dokumentasi dan informasi untuk menginformasikan kepada kepala dinas-dinas supaya mendukung pelaksanaan program dialog solutif“(ZA Maret 2015)

- Jadi sebelum pelaksanaan program dialog solutif kami bagian Humas melakukan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. Dan untuk menginformasikan bahwa pelaksanaan program dialog solutif akan segera dilaksanakan karena anggaran yang kita tetapkan sudah turun. Setelah itu kasubbag dokumentasi dan Informasi Humas memberikan informasi kepada pihak dinas-dinas untuk persiapan petugas yang nantinya akan ikut atau berpartisipasi dalam program dialog solutif kalau kepala instansi tidak bisa mengikuti. (IT Maret 2015)
- Biasanya sebelum pelaksanaan program saya mewakili kasubbag dokumentasi dan informasi mengikuti rapat persiapan program dialog solutif. Setelah itu saya memberi tahu kepada anggota saya untuk menginformasikan kepada kepala dinas-dinas dan kepala instansi-istansi bahwa pelaksanaan program dialog solutif akan segera dilaksanakan. Jadi semua pihak yang terkait mempersiapkan diri baik itu kepala dinas dan kepala instansi ataupun perwakilannya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat”. (BI MARET 2015)
- Sebelum pelaksanaan program dialog solutif biasanya diadakan rapat koordinasi di Humas dan saya mewakili Kasubbag kerjasama media. Setelah saya mengikuti rapat koordinasi tersebut

			<p>biasanyalangsung memberi tahu kepada anggota saya bahwa akan ada pelaksanaan program dialog solutif jadi kami langsung mempersiapkan untuk menghubungkan kemedi-media atau berita yang ada di kabupaten Jember untuk memberitahu masyarakat kalau akan diadakan pelaksanaan program dialog solutif sekaligus untuk meliput”.(A Maret 2015)</p>
		<p>1.1.1.2 Pembagian Peran Dalam Pelaksanaan Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peran Humas yaitu karena anggaran itu ada di Humas, jadi Humas sebagai penyedia fasilitas penyelenggaraan dan apa saja yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan harus disediakan oleh Humas, termasuk masalah penjadwalan dan penggabungan tempat untuk program dialog Solutif Bupati. Maka dari itu bagian humas menjadwalkan pertemuan koordinator kecamatan bahwa akan di adakanya kegiatan dialog solutif gabungan antara kecamatan Ledokombo, Sukowono, dan Sumberjambe. ( ZA Maret 2015)</li> <li>● Pelaksanaan program dialog solutif tersebut sesuai yang di mandatkan atau yang direkomendasi kepada Kabag Humas,yaitu sebagai koordinator program dialog solutif. (JT Maret 2015)</li> <li>● Peran saya pribadi dan sub bagian saya, yaitu ikut mensosialisasikan program dialog solutif agar lebih dikenal sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan Bupati dan Muspida. ( BI Maret 2015)</li> <li>● Peran saya pribadi dan sub bagian saya adalah menyalurkan ke media-media dan membuat berita”. (A Maret 2015)</li> <li>● Peran kepala Disperidag atau perakilannya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu, menjawab pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakat yang mengarah atau yang berhubungan</li> </ul>

<p>tentang Disperdag. Itu menghimpun atau memfasilitasi semua kepentingan masyarakat. (AM Maret 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peran kepala Dinas PU Cipta Karya atau yang mewakili pada waktu pelaksanaan program dialog solutif. Kami aktif dalam menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tugas kami. Biasanya dalam program dialog itu di hadiri Kepala Dinas atau perwakilanya secara langsung. Jadi kalau saya sebatas mendampingi Kepala Dinas, tetapi jawaban dari Kepala Dinas itu sudah sesuai dengan fungsi kami yang di dinas PU Cipta Karya.(JS maret 2015)</li> <li>● Peran Kepala Bidang Kependudukan pada waktu program dialog solutif yaitu, menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai tentang administrasi kependudukan”(RS Maret 2015)</li> <li>● Peran kepala bidang pencatatan sipil pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu, Menampung atau menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai permasalahan tentang administrasi pencatatan sipil.(PM Maret 2015)</li> <li>● Peran Kepala BAPEMAS atau perwakilanya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu, Menjawab pertanyaan dari masyarakat yang berhubungan dengan BAPEMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat).(S Maret 2015)</li> <li>● Pelaksanaan Program dialog solutif pernah di laksanakan di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu dan kebetulan saya pada waktu itu jadi panitia bagian pelaksanaan program dialog solutif perwakilan dari Desa.(M Maret 2015)</li> <li>● Pada waktu program dialog solutif saya menjadi panitia bagian perlengkapan yang ditunjuk dari</li> </ul>		
---	---	--	--

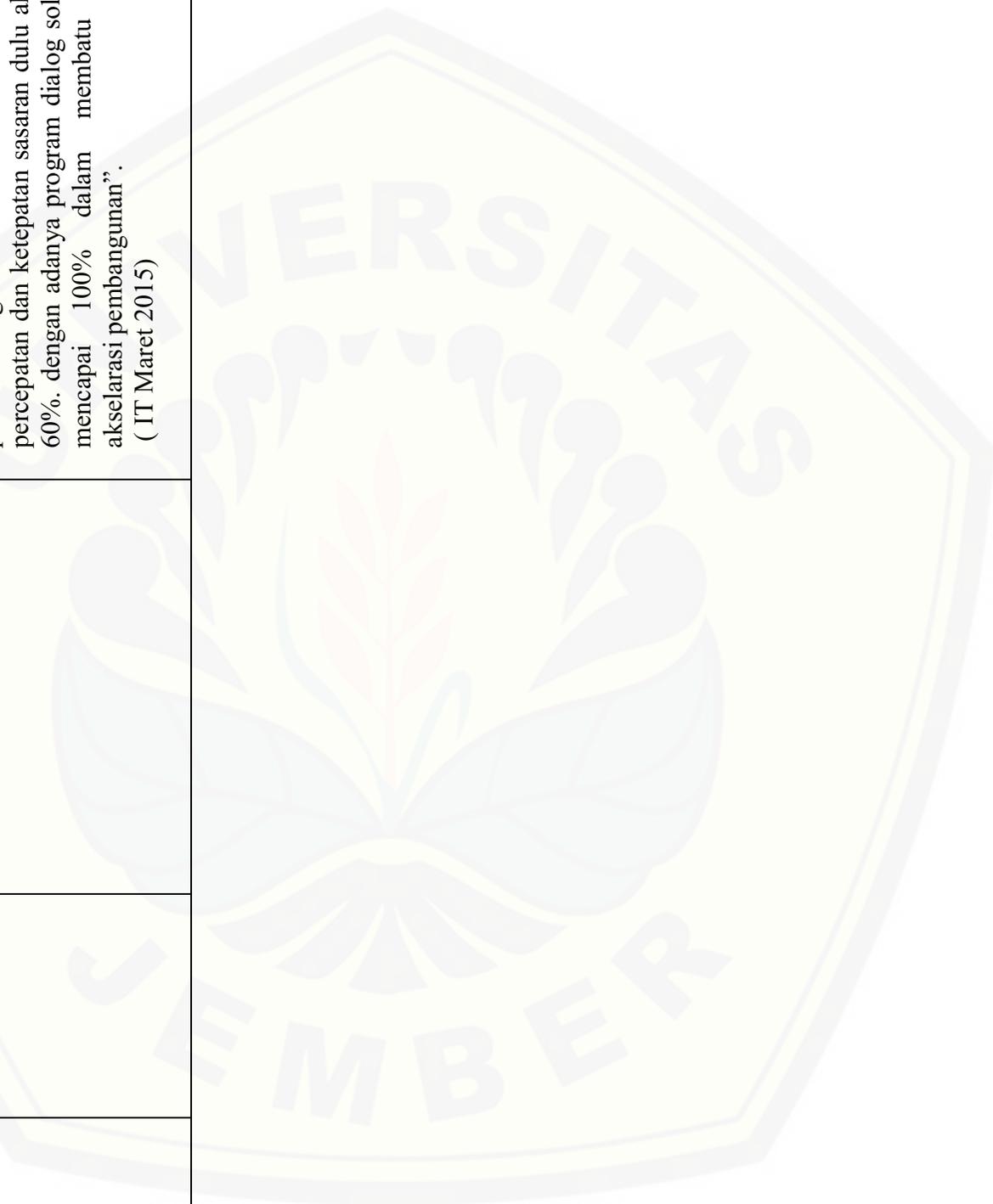
	1.1.2 Lapangan	1.1.2.1 Lokasi Kegiatan	Desa". (S Maret 2015)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk melaksanakan program dialog solutif kita biasanya melaksanakan ditempat yang strategis dan aksesnya mudah untuk dijangkau. Karena pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu pasti diadakan ditempat yang terbuka supaya bupati bisa bertatap muka muka secara langsung sama masyarakat". (ZA Maret 2015)</li> <li>• Pada waktu pelaksanaan program dialog solutif biasanya kita menentukan lokasi yang sangat strategis, karena kegiatan ini melibatkan Bupati berseta Satua Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan masyarakat berkumpul. Contohnya kegiatan gabungan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Wuluhun, Ambulu dan Tempurejo yang ditempati kegiatan adalah Kecamatan Ambulu karena aksesnya terjangkau". (IT Maret 2015)</li> <li>• Pelaksanaan program dialog solutif biasanya dilakukan dilapangan atau tempat terbuka. Karena kegiatan ini melibatkan masyarakat dan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)".(BI Maret 2015)</li> </ul>
	1.1.2.2 Keamanan pelaksanaan kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keamanan pelaksanaan program dialog solutif sangat penting karena kegiatan dilaksanakan di lapangan atau tempat terbuka. Karena kegiatan diikuti oleh Bupati, SKPD dan masyarakat. Keamanan kegiatan melibatkan Polres, polsek dan Satpol PP untuk menjaga keamanannya. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Dalam program dialog solutif sangat memerlukan keamanan karena dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan ditempat terbuka. Dalam kegiatan</li> </ul>

tersebut Bupati bertemu langsung sama masyarakat. Maka dari itu menjaga keamanan kegiatan melibatkan jajaran Polres, Polsek dan Satpol PP untuk menjaga lokasi kegiatan”. (IT Maret 2015)

- Biasanya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif itu keamanannya sangat ketat. karean kegiatan dilaksanakan dilapangan. untuk keamanan lokasi petugas melibatkan Polres, Polsek dan Satpol PP untuk menjaga lokasi. Karena acara dialog solutif ini dihadiri Bupati”.  
( BI Maret 2015)
- Pada waktu pelaksanaan program dialog solutif biasanya banyak keamanan karena program ini melibatkan masyarakat dan SKPD se Kabupaten Jember yang duduk bersama dalam satu lokasi. Keamanan yang dilibatkan dalam pelaksanaan program dialog solutif yaitu Polres, Polsek dan Satpol PP. (A Maret 2015)
- Untuk tugas kemanan masing-masing yaitu Satpol PP menjaga keamanan bagian turunya bupati dari kendaraan yang dinaiki bupati beserta robonganya untuk memasuki lokasi kegiatan. Serta mengamankan *stand* pada saat bupati dan rombongan akan menggujungi *stand-stand* yang dipamerkan oleh masyarakat. Untuk Porles bertugas menggiringi kemanan kendaran yang dinaiki Bupati dan SKPD mulai dari kantor Bupati sampai lokasi kegiatan. Dan Polsek mengarahkan kendaraan yang datang untuk parkir yang rapi. Dan saat berjalanya kegiatan semua jajaran keamanan mengambil posisi disamping kanan, kiri dan belakang masyarakat untuk mengamankan pelaksanaan program dialog solutif”.(ZA Maret 2015)

	<p>• Tugas Satpol PP pada waktu pelaksanaan program dialog solutif yaitu mengamankan Bupati dan rombongan setelah turun dari kendaraan yang dinaiki dan mengantarkan menuju tenda tempat pelaksanaan program. Untuk Polres mengawal perjalanan Bupati dan Rombongannya kelokasi kegiatan. Sedangkan Polsek bertugas mengamankan kendaraan masyarakat dan SKPD yang berpartisipasi dalam kprogram dialog solutif. Tapi kalau pelaksanaan program dialog solutif dimulai semuanya petugas mendampingi proses pelaksanaan program”. (IT Maret 2015)</p> <p>• Pada waktu pelaksanaan program dialog solutif Satpol PP bertugas mengamankan jalan akan dilewati bupati pada saat turun dari kendaraanya. sedangkan Polres bertugas mengawala perjalanan kendaraan yang dinaiki bupati dari kantor bupati sampai lokasi kegiatan. Untuk Polsek menjaga keamanan kendaraan masyarakat dan SKPD supaya tidak parkir disembarang tempat. Tapi kalau proses pelaksanaan program sudah dimulai semua petugas kumpul jadi satu untuk menjaga kelacaran pelaksanaan program”. (BI Maret 2015)</p> <p>• Dalam pelaksanaan program dialog solutif satpol PP bertugas mengamankan jalan yang akan dileati bupati dan SKPD setelah turun dari kendaraan. Polse menjaga kendaraan dari masyarakat dan SKPD. Polres bertugas mengawal keberangkatan bupati dan SKPD “. (A Maret 2015)</p>		<p>1.2</p>
	<p>• Se jauh ini pelaksanaan program dialog solutif berjalan mulai 2006 sampai 2014 dan tahun 2015 ini</p>		

Pelaksanaan			<p>insyallah masih akan dilaksanakan 3 priode 4 bulan sekali. (ZA Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Pelaksanaan program ini mulai tahun 2006 sampai 2014 dan pada tahun 2015 masih dilaksanakan 3 priode dengan 4 bulan sekali. Untuk proses percepatan dan ketepatan sasaran dulu akselasinya 60%. dengan adanya program dialog solutif ini bisa mencapai 100% dalam membatu percepatan akselarasi pembangunan” . ( IT Maret 2015)</li></ul>
-------------	--	--	--



	<p>1.2.1 Bedah Potensi Desa</p>	<p>1.2.1.1 Penampilan Potensi Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada waktu pelaksanaan kegiatan bedah potensi desa, masyarakat banyak mengusulkan dan memberikan paparan tentang persoalan-persoalan pembangunan yang ada di berbagai desanya. Lalu pada saat yang sama Bupati memberikan pertimbangan dan keputusan serta kebijakan. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Penampilan potensi-potensi desa. Dimana pada waktu kegiatan bedah potensi desa di buatkan <i>stand</i> perdesa, disitu masyarakat diminta untuk memamerkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desanya masing-masing.dan ditambahkan pada saat bedah potensi desa kita biasanya dihibur oleh kesenian perwakilan dari desa-desa, dari lembaga pendidikan dan dari komunitas yang mempunyai kesenian”. (IT Mater 2015)</li> <li>• Dalam kegiatan bedah potensi desa biasanya menampilkan potensi-potensi yang ada didesanya dan mayarakat juga bisa memamerkan <i>home</i> industrinya karena sudah disediakan <i>stand</i> oleh petugas kegiatan bedah potensi desa. Dan ada juga penampilan kesenian dari lembaga pendidikan atau dari desa yang mempunyai kesenian untuk menghibur masyarakat dan SKPD yang hadir pada waktu pelaksanaan kegiatan”.(BIMaret 2015)</li> <li>• Pada saat kegiatan bedah potensi desa biasa disediakan <i>stand</i> pameran karena bupati dan rombonganya sebelum ke tenda tempat pelaksanaan kegiatan bedah potensi desa biasanya mampir dulu ke <i>stand</i> yang disediakan panitia untuk melihat produk yang dipamerkan oleh desa dan masyarakat”. ( ZA Maret 2015)</li> <li>• Dengan diadakan kegiatan bedah potensi desa panitia</li> </ul>
--	---------------------------------	--	---

<p>biasanya membuatkan <i>stand</i> untuk pameran yang dibuat untuk memamerkan produk-produk dari desa masing-masing. Ditambah juga ada penampilan kesenian yang ditampilkan dari perwakilan desa atau perwakilan lembaga pendidikan”. (A Maret 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada waktu kegiatan bedah potensi desa ada sesi serap aspirasi yang mana masyarakat bisa menyampaikan permasalahan yang ada didesanya. Lalu bupati langsung memberikan kebijakan”. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Dalam kegiatan bedah potensi desa di sesi serap aspirasi masyarakat bisa menggusulkan dan menyampaikan permasalahan yang ada didesanya baik itu berupa infra struktur. Setelah itu bupati memberi kebijakan”.(IT Maret 2015)</li> <li>• Pada waktu sesi serap aspirasi masyarakat menyampaikan permasalahan yang ada didesanya masing-masing baik itu untuk pembangunan atau infra stuktur dan disitu bupati langsung memberi kebijakan”. (BI Maret 2015)</li> <li>• Penyampaian program desa saat kegiatan bedah potensi desa ini bertujuan untuk menyamakan program-program yang ada di desa-desa di Kabupaten.Jember “. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Biasanya penyampaian program desa ini bertujuan untuk menyamakan program-program yang ada didesa-desa di Kabupaten.Jember”. (IT Maret 2015)</li> <li>• Penyampaian Program desa ini bertujuan untuk menyampaikan program-program yang ada didesanya masing masing”. (BI Maret 2015)</li> </ul>
<p>1.2.1.2 Serap Aspirasi</p>	<p>1.2.1.3 Program Desa</p>

<p>1.2.2 Temu Karya Rakyat</p>	<p>1.2.2.1 Sebagai Bentuk Evaluasi Pada Kegiatan Bedah Potensi Desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan temu karya rakyat ini merupakan kelanjutan dari kegiatan bedah potensi desa. Kalau kegiatan bedah potensi desa adalah serap aspirasi, penampilan potensi desa dan program desa. Sedangkan kegiatan temu karya rakyat adalah sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi desa „Pameran potensi yang ada di masyarakat dan Pelayanan umum”. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Kegiatan Temu karya rakyat dengan Sesi sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi desa yang mana dalam kegiatan tersebut bupati menjadi moderator antara masyarakat dan SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Untuk membahas keberhasilan usulan dari masyarakat. apakah sudah ditindak lanjuti apa belum sama SKPD terkait”. ( ZA Maret 2015)</li> <li>• Dalam sesi sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi desa ini untuk melihat usulan-usulan dari masyarakat sudah ditindak lanjuti apa belum sama SKPD terkait untuk meningkatkan pembangunan. maka dari itu di sesi ini Bupati menjadi moderator antara masyarakat dan SKPD. (IT Maret 2015)</li> <li>• Sebagai bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi desa ini adalah untuk melihat aspirasi dari masyarakat yang disampaikan pada kegiatan bedah potensi desa itu apakah benar-bener sudah ditindak lanjuti sama SKPD atau cuma sebuah janji dari SKPD saja. maka dari itu di dalam sesi ini bupati menggambi posisi sebagai moderator antara masyarakat dan SKPD”.(BI Maret 2015)</li> <li>• Bentuk evaluasi pada kegiatan bedah potensi desa ini</li> </ul>
--------------------------------	---	--

		<p>1.2.2.2 Pameran Produk Masyarakat</p> <p>untuk menindak lanjuti usulan-usulan dari masyarakat untuk SKPD terkaid. dalam hal ini bupati memposisikan sebagai moderator antra masyarakat dan SKPD karean usulan dari masyarakat ini untuk meningkatkan pembangunan”. (A Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan temu karya karya panitia juga menyediakan lokasi pameran atau <i>stand</i> untuk memamerkan produk-produk dari masyarakat. Dalam sesi ini bupati sebelum memasuki tenda kegiatan. Bupati dan SKPD melihat pameran yang disediakan oleh panitia. ( ZA Maret 2015)</li> <li>• Dalam pameran ini pemerintah diharapkan bisa tahu bahwa ternyata masyarakat juga banyak yang punya <i>home industri</i> kerajinan jadi layak untuk dikembangkan. Bahkan layak untuk diberdayakan supaya kerajinan mereka bisa lebih berkembang lagi. (BI Maret 2015)</li> <li>• Pameran potensi yang ada di masyarakat ini untuk memperlihatkan potensi-potensi yang ada dimasyarakat kepada pemerintah. Bahwah masyarakat juga punya banyak kerajinan yang perlu dibimbing atau di kasih pelatihan biar produksi-produksi dari masyarakat ini bisa berkualitas”.(A Maret 2015)</li> <li>• Pada waktu kegiatan temu karya rakyat ini banyak pelayanan umum seperti pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan gratis, perpanjangan sim, perpus keliling dan pelayanan kependudukan yaitu Pembuatan KK(Kartu Keluarga), pengaktifan KTP (kartu tanda penduduk) dan AKTE kelahiran . ( ZA Maret 2015)</li> </ul>	<p>1.2.2.3 Pelayanan Umum</p>
--	--	--	-------------------------------

<p>1.3 Evaluasi</p>	<p>1.3.1 Evaluasi Program</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya pelayanan Umum pada waktu kegiatan temu karya rakyat seperti, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan jadi semua administrasi kependudukan bisa diurus langsung dilokasi kegiatan tersebut, Perpanjang SIM (Surat izin mengemudi) untuk perpanjang SIM tidak usah ke samsat bisa langsung diperpanjang pada waktu kegiatan temu karya rakyat diselenggarakan, Perpus keliling. ( IT Maret 2015)</li> <li>• Pelayanan umum pada waktu kegiatan temu karya rakyat ini biasanya dimanfaatkan sama masyarakat. Pelayanan yang disediakan pada waktu temu karya rakyat ini meliputi Perpanjangan SIM( Surat Izin Mengemudi), Perpustakaan Keliling, Administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan.( BI Maret 2015)</li> </ul>
<p>1.3 Evaluasi</p>	<p>1.3.1 Evaluasi Program</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk evaluasi program dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan program dialog solutif karena evaluasi ini melaporan hasil kegiatan dan membahas kendala yang ada seperti proses kerja apa berjalan baik atau tidak, membahas dana, dan sebagainya. Disitu kami bahas bersama untuk mengkrecek dimana letak kekurangan dari pelaksanaan program yang kami laksanakan”.(ZA Maret 2015)</li> <li>• Evaluasi program dilakukan setiap habis pelaksanaan program karena untuk melaporan hasil pelaksanaan</li> </ul>

	<p>program. Setelah itu diadakan croccek dan dilihat dimana letak kelemahannya dan dari situbiasanya ada perbaikan kerja”.(IT Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan tiap habis pelaksanaan kegiatan pasti selalu dibahas ketika evaluasi program yang diadakan oleh Humas dimana setiap laporan saya serahkan kepada ketua program dan akan dibahas bersama di dalam rapat evaluasi program” (BI Maret 2015)</li> <li>• Jadi evaluasi yang dilakukan Humas sebagai pelaksana program cuma mengevaluasi pelaksanaan kegiatan saja. Untuk usulan dari masyarakat biasanya langung ke instansi-istansi masing-masing. Tapi kita mengotrol apakah sudah dilakukan apa belum sama istansi-istansi yang terkait. Biasanya 1 bulan setelah kegiatan kita panggil semua istansi untuk kita tindak lanjut mengenai usullan dari masyarakat”. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Untuk evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (DISPRIDAG) setelah pelaksanaan program dialog solutif adalah rapat membahas usulan-usulan dari masyarakat untuk ditindak lanjut. Sebelum menindak lanjut usulan-usulan kita lihat dananya dulu. Karena kadang-kadang masyarakat mintak peralatan-peralatan dan kami belum mengangarkan soalnya juga anggaranya terbatas”. (AM Maret 2015)</li> <li>• Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PU cipta karya setelah pelaksanaan dialog solutif adalah rapat sama pimpinan dinas untuk membahas usulan dari masyarakat. kebanyakan masyarakat mengusulkan lampu penerangan jalan dan perbaikan jalan. Jadi</li> </ul>
	<p>1.3.2 Evaluasi Kegiatan</p>

sebelum kami tindaklanjuti kami juga lihat anggaran dana di dinas dulu".(JS Maret 2015)

- Evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) setelah pelaksanaan dialog solutif yaitu rapat dengan kepala BAPEMAS dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk menindak lanjuti usulan dari masyarakat. Soalnya masyarakat biasanya mengusulkan untuk minta bantuan rumah yang tidak layak huni jadi kami tidak langsung menindak lanjuti karena kita juga lihat dana di BAPEMAS".(S Maret 2015)
- Untuk evaluasi yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) adalah masyarakat banyak yang mengeluh tentang biaya administrasi padahal dispenduk tidak memungut biaya sama sekali untuk biaya administrasi jika masyarakat itu mau mengurus sendiri mulai dari desa sampai kecamatan".(RS Maret 2015)
- Kalau kami setelah rapat dengan kepala dinas biasanya langsung memberikan laporan ke Humas untuk menindak lanjuti usulan dari masyarakat bisa terealisasikan atau tidak. Soalnya kita juga lihat anggaran yang ada di dinas. tapi kalau belum ada kita mengganggu untuk tahun berikutnya. (AM Maret 2015)
- Setelah rapat dengan kepala dinas biasanya kita langsung survei lokasi yang diusulkan oleh masyarakat untuk ditindak lanjuti. Tapi sebelum menindak lanjuti usulan kita melaporkn ke Humas dulu biamanti tidak ada kesimpangsiuran antara dinas PU sama Bagian Humas".(JS Maret 2015)
- Setelah kami rapat dengan kepala dan ternyata usulan dari masyarakat itu masuk dalam program

<p>1.4 Teminasi</p>			<p>BAPEMAS. Kita biasanya langsung nyuruh masyarakat atau kepala desa untuk membuat proosal yang mengusulkan rumah layak huni itu. Tapi kita biasanya komunikasi dulu sama Humas selaku pelaksana program dialog”.(S Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Kita setelah pelaksanaan program dialog solutif adalah mengevaluasi petugas kecamatan yang bagian administrasi kependudukan biar masyarakat tidak dikenakan biaya lagi. Tapi biasanya masyarakat itu liwat biro jasa jadi kami kesulitan untuk melacaknya karena semua administrasi kependudukan itu yang ngentrin adalah kecamatan masing-masing”. (RS Maret 2015)</li> </ul>
<p>1.4.1 Terminasi Program</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan adanya program ini yang jelas sudah ada keterpaduan program antara dinas dengan instansi terkait, di dalam program dialog ini terdapat keterpaduan untuk mewujudkan evisiensi dengan evektifitas program dan pelaksana program”.(ZA Maret 2015)</li> <li>• Kita sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah, dalam hal ini memfasilitasi di lain pihak kita dapat memonitoring pembanguana diwilayah”. (IT Maret 2015)</li> <li>• Banyak usulan-usulan masyarakat yang sudah terwujud. Dengan adanya program ini yang jelas sudah ada keterpaduan program antara dinas dengan instansi terkait, di dalam program dialog ini terdapat keterpaduan untuk mewujudkan evisiensi dengan evektifitas program dan pelaksana program”.(BI Maret 2015)</li> <li>• Masyarakat ketemu lansung sama Bupati dan SKPD. setelah itu masyarakat menyampaikan pertanyaan-</li> </ul>

	<p>1.4.2 Terminasi Kegiatan</p>	<p>pertanyaan yang ada dimasyarakat. Bupati dan SKPD Bisa menampung pertanyaan dari masyarakat dan nanti diproses melewati dinas-dinas atau instansi- instansi yang terkait untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada di desa atau yang terjadi dimasyarakat”.( M Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketemu langsung Bupati dan SKBD se Kabupaten Jember.Tersampaikanya keinginan masyarakat. Informasi mengenai program-program pemerintah dapat diketahui atau tersampaikan kepada masyarakat”( MN Maret 2015)</li> <li>• Masyarakat jadi aktif jemput bola, sebelum kita mensosialisasikanya masyarakat sudah banyak yang tahu, jadi hal tersebut membantu kami untuk pembuatan surat usaha, bahkan pada waktu dialog masyarakat antusias untuk bertanya mengenai hal-hal tersebut”. ( AM Maret 2015)</li> <li>• Diketahui kalau masih kurang merata dalam pembangunan, jadi kami berusaha dengan adanya program dialog ini bisa mengalokasikan bantuan supaya tepat sasaran”.( S Maret 2015)</li> <li>• Kita bisa tahu daerah mana saja atau desa mana saja yang masih belum ada PJU atau kalau ada kerusakan pada PJU, jadi kami langsung bisa mengatasi setelah ada program dialog solutif kalau ada dana. Kalau tidak ya kita tunda untuk tahun berikutnya”.( JS Maret 2015)</li> <li>• Kita untuk lebih bisa menata diri lagi dalam memberikan kebijakan-kebijakan agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan”. (RS Maret 2015)</li> <li>• Sebagai sarana atau media untuk instropeksi, jadi</li> </ul>
--	---------------------------------	--

			<p>dengan berbagai permasalahan dari masyarakat yang muncul, berarti Dispenduk belum bisa berbuat sebaik mungkin seperti yang diharapkan oleh masyarakat dimana prioritas dinas adalah untuk mengusahakan pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi”(PM maret 2015)</p>
<p><b>2. Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelaksanaan Program Dialog Solutif</b></p>			
<p>2.1 Faktor Pendukung</p>	<p>2.1.1 Dukungan Penuh Dari Pihak Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jember</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program dialog solutif ini sangat didukung oleh pihak kabupaten bahkan pada waktu pelaksanaan program dialog solutif MUSPIDA wajib menghadiri pelaksanaan program dialog solutif tersebut. Supaya bisa mendengarkan secara langsung usulan-usulan dari masyarakat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat”. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Program dialog solutif bisa mempertemukan MUSPIDA dan masyarakat untuk bersilaturahmi jadi pihak Kabupaten pun sangat mendukung dengan adanya program ini. karena bisa menyerap aspirasi dari masyarakat”. (IT Maret 2015)</li> <li>• Dukungan dari pihak pemerintah mengenai program dialog solutif ini sangat mendukung bahkan menganjurkan MUSPIDA untuk menghadiri program dialog solutif ini karena untuk bersilaturahmi dengan masyarakat bahkan untuk menyerap aspirasi dibuat untuk acuan penyusunan peningkatan pembangunan”. ( BI Maret 2015)</li> <li>• Masalah dukungan ya sangat mendukung karena program ini kan untuk pembangunan daerah, jadi saya rasa pemerintah kabupaten sangat mendukung baget dengan adanya program ini. bahkan dia mengajak semua MUSPIDA untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program dialog solutif”. (A Maret 2015)</li> </ul>	

2.1.2 Sinergitas Antara Lembaga Pemerintah Atau SKPD Terkait

- Sebelum pelaksanaan program dialog solutif dilaksanakan kami mengundang seluruh kepala instansi-istansi atau perwakilannya untuk rapat membahas pelaksanaan program dialog solutif dan mengingatkan kepada SKPD tentang tugas masing-masing instansi-istansi. (ZA Maret 2015)
- Kita sebelum melaksanakan program dialog solutif biasanya menginformasikan kepada Kepala instansi-istans dan kepala dinas-dinas atau perwakilannya, untuk kita ajak rapat membahas tentang teknis pelaksanaan program dialog solutif ini, supaya nanti kalau udah dilokasi pelaksanaan bisa tahu tugas masing-masing SKPD tersebut". (IT Maret 2015)
- Sebelum pelaksanaan program biasanya saya beserta anggota sub bagian informasi dan dokumentasi menginformasikan kepada seluruh instansi-istansi dan dinas-dinas atau perwakilannya untuk mengikuti rapat supaya pada waktu pelaksanaan program dialog solutif tahu apa tugas dan fungsi SKPD masing-masing". (BI Maret 2015)
- Biasanya untuk mensinergitaskan antara lembaga pemerintah dan SKPD kami mengadakan rapat dengan instansi-istansi dan dinas-dinas yang akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program dialog solutif tersebut. Jadi pada waktu pelaksanaan program semua SKPD sudah tahu apa tugasnya masing-masing". (A Maret 2015)
- Kita biasanya sebelum pelaksanaan program dialog solutif itu diundang rapat dulu sama humas untuk membagi tugas dalam pelaksanaan program dialog solutif. Supaya kita bisa memposisikan diri kita masing-masing sebagai SKPD". (AM Maret 2015)

	<p>2.1.3 Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pernah Dek, kebetulan program dialog solutif dilaksanakan di Kecamatan Ambulu dan kebetulan juga desa kami yang ketempatan yakni Desa Tegalsari. Pelasanaan kegiatannya dilaksanakan diLapangan Tegalsari”. ( M Maret 2015)</li> <li>● Pernah, kegiatannya semacam kunjungan ke masyarakat dalam sebuah forum besar.Ya besarnya karena masyarakat dari beberapa kecamatan dijadikan dalam satu tempat”.(MN Maret 2015)</li> <li>● Dalam kegiatan ini masyarakat dan perangkat desa dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang ada di Desa.tapi tidak semua pertanyaan bisa tersampaikan karena terbatasnya waktu dialog”(M Maret 2015)</li> <li>● Penyampaian aspirasi masyarakat dalam kegiatan tersebut di bagi beberapa sesi oleh pembawa acara. Dimana dalam sesi tanya jawab, masyarakat menayakan, mengusulkan, dan menyarankan beberapa hal yang menjadi kendala-kendala dalam pembangunan lingkungannya”.(MN Maret 2015)</li> <li>● Mengikuti proses kegiatan dan melakukan pengamatan serta mencatat segala informasi yang telah disampaikan Bupati beserta SKPD mengenai program-program yang telah di programkan pemerintah kabupaten”. (MN Maret 2015)</li> </ul>
	<p>2.1.4 Anggaran yang Tepat Waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kalau anggaran yang kita ajukan itu turunnya tepat waktunya kita langsung bisa melaksanakan program dialog solutif. karena seluruh biaya program dialog solutif ini memakai anggaran uang APBD bagian Humas. (ZA Maret 2015)</li> <li>● Jika anggaranya cair tepat waktu ya kita langsung melaksanakan program dialog solutif sesuai dengan yang kita jadwalkan.(IT Maret 2015)</li> <li>● Anggaran yang diangkan oleh bagian humas turun kita</li> </ul>

	<p>langsung melaksanakan program dialog solutif. karena kita biasanya sebelum mengajukan anggaran kita sudah menentukan pelaksanaan program dialog solutif”.(BI Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagian humas itu biasanya sudah membuat jadwal pelaksanaan program dialog solutif jadi kalau anggaranya turun kami langsung melaksanakan program tersebut”.(A Maret 2015)</li> </ul>
<p><b>3. Dampak Pelaksanaan Program Dialog Solutif</b></p>	
<p>3.1 Meningkatkan Forum Silaturahmi Antara Pemerintah Kabupaten Dan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalau peningkatannya itu hanya berdasar pada lapopran-laporan dari serap aspirasi masyarakat hasil Musrembang, itu pasti ada wilayah yang belum terjangkau, tapi kalau dengan dialog solutif semua dapat terjangkau, seperti adanya jalan yang rusak, Pak Bupati dalam dialog solutif akan menugaskan instansi terkait untuk mengkoscek semua padukuhan-padukuhan yang belum tersentuh.” (ZA Maret 2015)</li> <li>• Mempercepat pembangunan di wilayah dan tepat sasaran, ada monitoring dari SKPD bagian Humas, SKPD terkait akan merespon adanya usulan dari masyarakat, hingga program ini sesuai dengan keinginan masyarakat”. (IT Maret 2015)</li> <li>• Kalau peningkatannya itu hanya berdasar pada lapopran-laporan dari serap aspirasi masyarakat hasil Musrembang, itu pasti ada wilayah yang belum terjangkau”. (BI Maret 2015)</li> <li>• Dengan adanya program dialog solutif ini pemerintah bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. karena pemerintah sibuk dengan kerjanya, jadi kalau dikantor sulit untuk ditemui maka dalam pelaksanaan program dialog solutif ini Humas memfasilitasi masyarakat dan pemerintah</li> </ul>

<p>3.2 Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Untuk Kebutuhan Pembangunan Yang Dijadikan Sebagai Bahan Untuk Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pada Tahun Berikutnya</p>	<p>bertemu dalam satu lokasi dan duduk bersama”. (ZA Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk meningkatkan forum silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat humas memfasilitasi dengan program dialog solutif. Yang nantinya dalam program tersebut masyarakat dan pemerintah bertatap muka dan berdialog dalam satu lokasi”. (IT Maret 2015)</li> <li>• Sebagai sarana untuk silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten. Bagian Humas Pemda Jember memfasilitasi dengan program dialog solutif yang mana masyarakat bisa bersilaturahmi atau bertemu sekaligus bisa berdialog secara langsung dengan pemerintah kabupaten Jember”. (A Maret 2015)</li> <li>• Program dialog solutif ini menjangkir aspirasi untuk kebutuhan pembangunan yang dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Serap aspirasi ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan kegiatan bedah potensi desa dan temu karya rakyat. yang mana masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan sarana yang ada didesanya”. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Serap aspirasi dalam program dialog solutif ini dikemas dalam kegiatan bedah potensi desa dan Temu karya rakyat yang mana masyarakat banyak yang mengusulkan potensi-potensi atau permasalahan yang ada didesa. Tapi bisanya masyarakat ini lebih banyak mengusulkan permasalahan yang ada didesanya.maka dari itu usulan-usulan dari masyarakat ini bisa dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya”.(IT Maret 2015)</li> <li>• Program dialog solutif yang dikemas dalam kegiatan bedah potensi desa dan Temu Karya Rakyat yaitu untuk</li> </ul>
---	---

<p>3.3 Dampak Pembangunan Infra Struktur Dan Sarana Prasarana Dari Aspirasi Masyarakat</p>	<p>menjaring aspirasi untuk kebutuhan pembangunan yang dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. dalam kegiatan tersebut masyarakat banyak yang mengusulkan tentang pembangunan yang ada didesanya”. (BI Maret 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam serap aspirasi pemerintah kabupaten jember difasilitasi Humas Pemda Jember yang di kemas dalam program dialog solutif yang dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu temu karya rakyat dan Bedah Potensi desa. Dalam kegiatan tersebut masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya untuk dijadikan bahan penyusunan perencanaan untuk tahun berikutnya”.(A Maret 2015)</li> <li>• Ya pasti ada dampak pembangunan bagi masyarakat, yang jelas tujuan dari program pemerintah itu kan tidak lain adalah menjahterakan masyarakatnya, jadi harus dikawal. Pengawalan itu melewati koordinasi, silaturahmi, komunikasi dan publikasi. Karena banyak potensi di wilayah yang tidak terekspos, jadi dengan adanya program dialog solutif ini semua bisa terekspos ke semua masyarakat”. (ZA Maret 2015)</li> <li>• Dampak pembangunan melalui dari serap aspirasi masyarakat pada waktu pelaksanaan program dialog solutif seperti sarana penerangan jalan. Masyarakat bisa beraktifitas di malam hari setelah adanya lampu penerangan di daerah- daerah yang gelap karena dapat bantuan dari PJU, bahkan keluar dari desanya ke desa lain pun berani karena sudah tidak gelap lagi” (JS Maret 2015)</li> <li>• Kita memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dikecamatan supaya masyarakat tidak jauh-jauh menggurus administrasi ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Jember. Meskipun pengurusan administrasi kependudukan</li> </ul>
--	--

gratis tapi kalau masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sendiri memerlukan biaya yang mahal jadi kami menyerahkan semua pe ngurusan dokumen pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil dikecamatan masing-masing". (RS Maret 2015)

- Berdasarkan saran atau usulan dari masyarakat melalui pelaksanaan program dialog solutif. Disprindak mengeluarkan program atau pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada dimasyarakat. (AM Maret 2015)
- Kalau sarana kita kemarin itu dapat mbak. tapi mungkin semua desa juga insallah dapat mbak, sarana yang saya maksud seperti timbangan untuk balita yang dimintak ibu-ibu PKK pada waktu dialog, terus yang ke dua itu tentang pengerukan DAM dan perbaikan jembatan jurusan Tegalsari dan Ambulu". (M Maret 2015)

Dokumentasi



Wawancara pada waktu observasi dikantor Bagian Humas Pemda Jember bersama informan ZA dan IT selaku kepala bagian humas dan koordinator program dialog solutif



Dokumentasi wawancara dengan informan PM Kabit Pencatatan Sipil Dispenduk



Wawancara dengan JS Kepala bagian Kebersihan dan PJU



Dokumentasi wawancara dengan M kepala desa Tegalsari Ambulu



Informan AM mewakili disprindag selaku Sekertaris Disprindag



Informan A mewakili Subag kerjasama Media Bagian Humas PemdaJember

**DAFTAR PERTANYAAN / USULAN DAN JAWABAN  
BEDAH POTENSI DESA DI KECAMATAN SUMBERJAMBE  
TANGGAL 19 MARET 2014**

NO	NAMA / ALAMAT	PERTANYAAN / USULAN	JAWABAN BUPATI	UNIT KERJA TERKAIT
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Ky. H Anmar, M.Pd / Ust. Sudip (Pengasuh Ponpes Nurul Islam Al Hamidi Sumberjambe)</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>1. Kalau dulu kami jajaran para alim ulama' para kiyai sangat semangat kampanye sehingga masyarakat seolah – olah datang ke TPS itu rukun islam yang ke 5. Untuk pemilu 2014 ini mungkin tidak seperti itu slentingan, seperti pemilu 2014 ini katanya tak ada anggaran Linmas, padahal adanya linmas itu sangat besar kontribusinya, khususnya dalam meningkatkan kehadiran para hak pilih, di tambah lagi di pedesaan, yang dulu –dulunya linmasnya kurang faham azas pemilu rakyatnya juga sehingga adu otot. pertanyaan saya bapak, dengan stakeholder yang sudah mengurangi elemen – elemen linmas selain pada dialog solutif ini, langkah – langkah apa yang sudah dan mungkin mau karena masih ada waktu dilakukan oleh birokrasi dari level tertinggi sampai level bawah?.</p> <p>2. Yang kedua, kami mewakili dunia pendidikan, mohon ma'af kami masih ingat 6 tahun yang lalu bapak pernah menyumbang yayasan kami Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidi Jambiarum, guna dibukanya pendidikan setara SLTA, kemudian dengan rangsangan dari</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>1. Terkait dengan honor linmas sebenarnya menjadi pemikiran kita bersama baik dari jajaran birokrasi maupun legislatif. Karena ada beberapa surat edaran kepada bapak Bupati Jember. Pertama surat dari menteri dalam negeri, intinya bahwa pemerintah kabupaten Jember punya kewajiban menganggarka baju linmas. Sedangkan untuk kebutuhan operasional linmas, termasuk di dalamnya Honor adalah kewajiban pemerintah pusat. Kemudian ditindak lanjuti juga oleh surat Gubernur kepada Pak Bupati intinya sama, kami dengan DPRD sedikit punya konsep yang sama. Akhirnya baju Linmas sekabupaten Jember kita alokasikan di APBD 2014, sedangkan untuk honor Linmas petunjuk Pak Bupati “lek pancene iso anggarno honor Linmas”, saya takut pak bupati, kalau ada apa-apa kami yang kena. Kita coba konsultasikan dulu dengan kementerian</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>1. BAKESBANG 2. DIKNAS</p>

	<p>bapak itu, telah kami buka Madrasah Aliyah Nurul Islam Al Hamidi yang sampel santri kami sedang ada di hadapan bapak. Alhamdulillah animo dan kesadaran masyarakat semakin hari semakin bulan meningkat namun dari minimum yang bapak kasihkan senilai ± 20 juta telah di bangun 3 lokal yang dimanfaatkan sebagai ruang belajar, namun demikian, dunia pendidikan semakin tahun semakin maju, maka di tuntut pula kami memikirkan mutu peserta didik kami, sehingga manakala ada program mungkin pengadaan sarana dan prasarana berupa perpustakaan, berupa kantor, bahkan mungkin tambahan lokal, mohon bapak berkenan dimasukkan dalam anggaran itu oleh karena 3 lokal itu plus swadaya hanya satu lokal kecil keseluruhan ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan dan seterusnya.</p> <p>3. terkait dengan masalah kesenian pak, barusan rombongan datang di sebelah timur jamiyah hadrah yang menyambut, mereka sudah pulang ke undangan tapi nitip sama saya, mereka bisik-bisik “giman kiyai kalau Jam’iyah Hadrah Nurul Islam Al Hamidi sebentar lagi kita rubah”. Rubah apa? Saya bilang, rubah aja Jamiyah Hadrah Nurul Islam Al Jalali. Saya bilang, entar dulu nanti liat saran, masukan serta bimbingan bapak, kira-kira pantas gak Jamiyah Hadrah sebegitu jelek di beri nama Nurul Islam Al Jalali,</p>	<p>dalam negeri. Informasi sementara honor Linmas akan di kaver oleh KPU pusat , tapi sampai sekarang kami belum menjamin apakah itu benar. Tapi kami akan konsultasi itu biar temen – temen linmas merasa tenang saat melaksanakan tugas di TPS.</p> <p>2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran dan sebagainya adalah atensi yang cukup besar. Sehingga baik yang SMK yang swasta, maupun SMP, SMA /SMK di bawah kementerian ketika mengajukan kepusat merupakan atensi yang sangat besar.</p> <p>3. ----</p>	
<p>2. Khasadi (Sukowono)</p>	<p>1. Kami mewakili dari unsur pendidikan. Kepada yang terhormat bapak bupati MZA Zalal. Yang</p>	<p>1. Terkait yang di sampaikan dari sukowono saya juga lebih seneng pak,</p>	<p>DIKNAS</p>

	<p>pertama saya mengucapkan terima kasih telah menjadikan pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas program kabupaten Jember. Ini terbukti di kecamatan kami dari segi fisik sudah hampir kesemuanya tidak ada yang rusak berat, Cuma kepala sekolah sekolah kalau seumpama ada semacam bantuan, tolong jangan di satu arahan pak takut berhubungan dengan pak jaksa dengan pak polisi, jadi mintanya tu kalau ada di kontraktualkan aja karena beban kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak, jangan di bebani lagi dengan untuk membangun dan sebagainya.</p> <p>2. Sesuai dengan ikon kita bedah potensi desa, kami mohon muatan lokal yang ada di sekolah karena jam nya itu sangat banyak dan Saya lihat belum dioptimalkan dengan baik, saya mohon ada semacam perda atau SK agar sekolah mengharuskan mengangkat potensi yang ada di desa entah itu kerajinan, maupun yang lain – lain, kesenian untuk diangkat di sekolah formal yang ada di desa itu atau di kecamatan itu. Contohnya di Sukowono, terkenalnya sangkar burung, mungkin bisa dioptimalkan di sekolah formal. Karena siapa yang meneruskan bapak – bapanya nanti kalau itu tidak di mulai dari usia dini di Sumberjambe ada batik dan sebagainya.</p> <p>3. Kaitanya denga BSM pak (bantuan siswa miskin) saya juga mengucapkan terima kasih, tapi untuk tahun ini temen-temen itu banyak yang kecawa karena datanya itu banyak yang keliru. BSM yang sekarang ini bukan usulan</p>	<p>kalau itu namanya pembangunan yang dari pusat itu lewat kontraktual saya lebih seneng, tetapi itu kita emang ada Juklak / Juknis yang kaitanya dengan pembangunan, atau pun bantuan dari pusat baik itu untuk Sekolah Dasar, SMP maupun SMA memang Juklak/Juknis yang dikeluarkan oleh pihak kementerian itu adalah swakelola, kalau itu, swakelola itu di kontraktualkan, saya yang di panggil oleh pak kapolres atau kejaksanaan atau mungkin panjenengan juga yang akan di panggil oleh kejaksanaan, jadi itulah yang memang harus kita laksanakan. Mungkin kami akan mencoba ke pihak kementerian entah nanti itu persero dan sebagainya, karena ini merupakan sebuah proses daripada masalah dan itu semua seluruh indonesia adalah bantuan dari pusat bentuknya adalah swakelola yang itu sesuai dengan petunjuk kementerian.</p> <p>2. Mengenai Muatan lokal sudah tertanam di kurikulum 2013, hanya saja nanti implemetasinya yang harus kita tegaskan, yang harus kita maksimalkan, isyaallah nanti masalah muatan lokal akan berbeda –beda dari tiap – tiap daerah seperti yang Sukowono dan Sumberjambe.</p> <p>3. Kaitanyan dengan BSM mungkin saya juga sependapat, karena BSM yang sekarang adalah memang hasil rapat</p>
--	---	--

	<p>sekolah tapi berdasarkan kartu BLSM. Jadi yang tidak punya kartu itu, meskipun dia anaknya tukang mantab tidak punya, ini mohon untuk selanjutnya hal-hal yang kemarin sudah baik ini jangan keliru lagi.</p> <p>4. Sekolah ini sudah baik, tapi statusnya masih ngambang. Dengan kata lain belum ada sertifikat karena merupakan HGU / HGP karena tanah RTU dan tanah kas desa. Untuk itu Mohon ini ada semacam program atau diprogramkan di daerah agar ststus tanah itu betul-betul milik sekolah, tidak milik desa atau tidak milik RTU dan lainnya. Saya tidak ingi kejadian di Arjasa terjadi, yang setelah kepala desanya tidak menjabat kepala desa. Sekolahnya diambil lagi sampai sekarang.</p>	<p>yang juklak / juknisnya seperti itu, kalau kami menyimpang seperti sebelumnya itu Justru adalah menyalahi aturan.</p> <p>4. -----</p>	
<p>3. Itnah Murjiwati (Sumberlesung Ledokombo)</p>	<p>1. Puskesmas ledokombo saat ini sudah naik statusnya menjadi rawat inap, skali lagi trima kasih beribu-ribu terima kasih. Akan tetapi bapak, dengan naiknya status menjadi rawat inap, tidak diimbangi pula dengan fasilitas yang berarti, khususnya kamar untuk pasien. Nah dalam kesempatan kali ini, di acara dialog solutif ini, Dengan segala kerendahan hati mohon keikhlasanya hati bapak untuk menjadi bahan pemikiran di carikan solusi yang baik demi meningkatkan kesehatan masyarakat Ledokombo dan supaya para pasien tidak dilarikan ke rumah sakit Sumberjambe maupun Kalisat</p> <p>2. seiring dengan di tariknya atau di tiadaknya Jampersal timbul rasa hawatir dan kemasani di hati kami para kader,khawatir angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian balita.</p>	<p>1. Untuk Ledokombo memang baru dinyatakan sebagai rawat inab untuk sarana secara bertahap akan kita cukupi, ya tidak mungkin karena untuk puskesmas rawat inab yang baru ada 10 jadi kita bertahap akan dilengkapi, insyaallah mungkin tahun depan semuanya bisa tercukupi semuanya.</p> <p>2. Untuk jampersal, memang jampersal dulu sebenarnya kurang sampai ke sasaran, tujuan utamanya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, tapi disana semua orang yang melahirkan bisa gratis baik itu mampu maupun tidak mampu, sebenarnya yang harus di bantu kan yang tidak mampu. Mungkin dengan adanya</p>	<p>DINKES</p>

		<p>Karena masyarakat kami adalah masyarakat menengah ke bawah, kami para kader khawatir para ibu bersalin tidak mampu membiayai persalinan mereka pada Nakes (Tenaga kesehatan) akan tetapi mereka kembali lagi lari untuk melahirkan ke dukun, dan mohon hal ini dijadikan pertimbangan dan pemikiran bapak dan ibu</p>	<p>program baru (Program BPJS) yang tidak mampu yang dahulu Jamkesmas tetap langsung otomatis menjadi anggota BPJS jadi bisa tetap dilayani dengan gratis, tapi yang mampu ya harus menjadi anggota BPJS dahulu yang satu bulan hanya membayar Rp. 22.500 kemudian untuk tindakan sampe operasi pun gratis.</p>	
<p>4.</p>	<p>Musrifah (Siswa kela XII MA Nurul Islam Al Hamidi Sumberjambe)</p>	<p>Kami merupakan Pemilih pemula pada pemilu Legislatif 2014, yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Kami sebagai pemilih pemula merasa sangat kebingungan, menyinggung kurangnya bahkan tidak adanya sosialisasi tentang hal pemilu legislatif itu. Pertanyaan kami, apa saran bapak bupati kepada kami yang masi berada di tahap pemilih pemula.</p>	<p>Untuk santrinya Ust. Sudib Besok pagi saya akan datang ke sekolahnya Ust. Sudib untuk sosialisai kepada pemilih pemula</p>	<p>BAKESBANG</p>
<p>5</p>	<p>Suryaningsih (Desa Gunung Malang Kec. Sumberjambe)</p>	<p>1. Kami mewakili dari organisasi Podaya Desa Gunung Malang yang membidangi 4 bidang yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pendidikan, kita punya taman baca meskipun masih kecil</li> <li>- Bidang Kesehatan, disini kita mengangkat persalinan Nakes, karena kedepan persalinan Nakes kita terancam menurun.</li> <li>- Bidang Pertanian, kami membentuk Himpunan petani wanita, disana kita sedang mengadakan kegiatan membuat pupuk buatan yang gak kalah dengan laki-lakinya / bapak – bapaknya.</li> <li>- Bidang Perekonomian, kita punya kerajinan tas tali kur juga semut</li> </ul> <p>Berkaita dengan itu semua posdaya kami tidak</p>	<p>1. ---- 2. Kami tunggu proposalnya yang dari TK Gunung Malang</p>	<p>TP PKK DIKNAS</p>

		<p>berdaya karena terkendala di pendanaan dan pemasaran. Pertanyaan kami langkah apa yang bisa kami lakukan agar posdaya kami bisa berjalan sesuai dengan harapan kami?</p> <p>2. titipan dari Lembaga TK Gunung Malang yang sudah berdiri sejak 2006, hidupnya masih numpang atas belas kasihan SD, numpang dari lokal yang satu ke lokal yang lain. Sudah tiap tahun kita mengajukan proposal tapi tidak tembus-tembus, kalau posyandu kita numpang ke rumah masyarakat itu masih biasa karena ketemunya 1 bulan sekali, tapi ini TK, yang anak-anak kita ketemunya setiap hari. Coba bayangkan kita yang hidupnya masih numpang selama ± 8 th betapa Ngenesnya kita</p>		
--	--	--	--	--

**DAFTAR PERTANYAAN / USULAN  
BEDAH POTENSI DESA DI KECAMATAN SUMBERJAMBE  
TANGGAL 19 MARET 2014**

NO	NAMA / ALAMAT	PERTANYAAN / USULAN	JAWABAN BUPATI	UNIT KERJA TERKAIT
1.	Andreas Kateno (KS. SDN Sumberjambe 04)	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <p>1. Mohon penyaluran BSM 2014 kembali melalui kantor POS, jangan melalui Bank Jatim. (Penyaluran BSM 2013 lewat bang sampe sekarang masih belum selesai. Telalu ruwet..)</p> <p>2. Mohon perbaikan jalan di kecamatan Sumberjambe, banyak jalan rusak, terutama Randu Agung, cumedak, Gunung Malang, Sumberjambe, Sumberpakem, Rowosari, Pringgondani, Jambearum, Plerean.</p> <p>3. Di kecamatan Sumberjambe setiap hari lampu padam, meskipun tidak ada hujan.</p> <p>4. Perwakilan BPD Sumberjambe, Sukowono, Ledokombo ingin menanyakan mengapa honor BPD setiap ada kenaikan berkisar antara 25 – 50 ribu. Bukankan peranan BPD adalah urat nadi dari permasalahan yang ada di desa tersebut, dengan maksud apa-apa harus dengan persetujuan BPD. Mohon di pertimbangkan.</p> <p>5. Mohon perbaikan jalan Sukowono, Sumberjambe, dan ledokombo segera di realisasikan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>4</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>5</b></p>
2.	Nur Imamah (Guru Honorer K2 Kec. Sumberjambe)	<p>Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember menanggapi tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi CPNS 2013?. Sedangkan yang lulus seleksi bayang yang palsu SK awalnya khususnya di Kab. Jember ini.</p>		

3	Atas nama Masyarakat Pakem	Setiap kali surat – surat selalu di pungut biaya oleh perangkat.	
4.	Agung Pitono Ketua PGRI Ledokombo	<p>1. Teman - teman guru Ledokombo telah mengusahakan Sertifikat Tanah RFO seluas ± 3.625 M2 dengan biaya swadaya dari guru – guru sekecamatan Ledokombo. Tanah tersebut menjadi aset daerah khususnya Dinas Pendidikan karena sudah resmi milik Diknas Jember. Selanjutnya tanah tersebut telah kami bangun gedung PKG dengan biaya sampai hari ini Rp. 420.000.000, juga swadaya para guru / anggota PGRI Rp. 1850.000/guru. Gedung tersebut berukuran 24 M x 14 M akan di jadikan gedung serba guna. Mohon tambahan dana untuk menyelesaikan gedung tersebut.</p> <p>2. Mohon kecamatan Ledokombo bisa mendapatkan lembaga lembaga SMK karena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 3 SMP N di Ledokombo dengan Kelulusan rata –rata 250 siswa.</li> <li>• Ada 3 Tsanawiyah rata – rata kelulusan 100 siswa</li> <li>• Tujuan agar semua lulusan dapat melanjutkan ke SMK.</li> </ul>	
5.		Tiang listrik tidak masuk ke krajan II Sumberjambe. Sudah 10 tahun belum masuk.	
6.	Haryono (Perangkat Desa Randu Agung)	<p>1. Tentang jalan raya seputar Sumberjambe arah ke Sukowono, Sumberjambe arah Sukosari, Sumberjambe arah Sukosari, Sumberjambe arah ke Ledokombo. Menginginkan cepat diatasi karena kondisinya sangat parah.</p> <p>2. Gaji Perangkat Desa mohon di berikan kemudahan untuk realisasinya dari 3 bulan sekali menjadi perbulan.</p>	
7.		Tolong di pikirkan tentang nasib Guru PAUD dan (Honor)	

		<p>Pos PAUD dan Guru Wiyata Bakti yang sudah mengabdikan puluhan tahun. (tingkatkan Honor Guru PAUD dan Kader POS PAUD)</p>		
<p>8.</p>	<p>Gapoktan Al Barokah Ledokombo</p>	<p>1. Alokasi Pupuk di kecamatan Ledokombo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2013                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urea = 3.072,5 ton</li> <li>- NPK = 646 ton</li> <li>- Organik = 371 ton</li> <li>- ZA = 896 ton</li> </ul> </li> <li>• Tahun 2014                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urea = 2.909,2 ton</li> <li>- NPK = 446 ton</li> <li>- Organik = 239 ton</li> <li>- ZA = 700 ton</li> </ul> </li> </ul> <p>Kami mohon alokasi tersebut jangan dikurangi, paling tidak harus tetap seperti tahun 2013, supaya produksi padi tidak turun</p> <p>2. Mohon Bantuan Alsinta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Power thresher</li> <li>- Hand traktor</li> </ul> <p>3. Pagupon beserta 2 pasang Burung Hantu</p>		
<p>9.</p>	<p>Rike Widiastutik (RA Al-Hasan Dusun Sbr Nangko Ledokombo)</p>	<p>1. Kapan NUPTK milik semua guru, baik TK, SD, SMP, SMA ataupun RA, MI, MTs, dll. Karena itu merupakan legalitas kami sebagai guru.</p> <p>2. NPSM kami juga belum keluar pak</p>		
<p>10.</p>	<p>Abd. Aziz (Sumberwringin )</p>	<p>1. Untuk bangunan MTs / MA Raudlotus Syabab Sumberwringin Sukowono dengan anggaran 2,5 T. Kami pengurus yayasan mohon bantuannya demi suksesnya bangunan dan pendidikan yang ada bertempat di gedung Aula Ponpes Raudlotul Ulum Sumberwringin Sukowono</p> <p>2. Mohon secepatnya memperbaiki jalan desa di depan kantor desa Sumberwringin panjangnya 1000 M</p>		

11.	Hariyanto (Dusun Slangah desa Sumberjambe )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaspalan jalan Sumberjambe ke jalan pringgondani</li> <li>2. Pengaspalan Jalan Desa dari lapangan sekitar jalan –jalan Plercan kira – kira 4 KM</li> <li>3. Pengaspalan jalan Sumberjambe masuk perkebunan kayu karena belum di sentuh pembangunan jalan</li> <li>4. Dari lingkungan Slangah, lapangan sampai pertigaan jalan sumberjambe plengsengan karena lidah pembuangan air akhir RT.3 air menggenang.</li> </ol>		
12	(Sumberdanti, Dawuhan Mangli, Sukorejo)	<p>Pada saat musim tanan pengolahan tanah tertunda disebabkan ketersediaan alat pengolahan tanah kurang. Diharapkan agar pengolahan tanah lancar dan tanam dapat sesuai rencana kami mohon bantuannya alat pengolahan tanah (traktor)</p>		
13	(Bidang pertanian kecamatan Sukowono)	<p>Banyak terjadi kehilangan hasil saat panen, hal ini disebabkan karena alas yang di gunakan sebagian besar petani untuk perontoknya ukuranya sempit (4 M x % 5 M) dan sebagian kecil petani belum menggunakan trassel (10%). Agar tidak banyak kehilangan hasil pada saat panen maka kami mohon bantuannya peralatan alat pasca panen Trassel dan Terpal.</p>		
14	Sudiono (Kelompok Tani Sri Sedono)	<p>Kami telah memproduksi pupuk Organik 20 ton/bulan. Kedala YANG di hadapi, mohon bantuan gudang dan alat transportasi yang sederhana.</p>		
15	Bu Ilmi (Sumber pakem)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami punya usaha peternakan Domba Etawa. Bagaimana usaha saya bisa maju dan mensejahterakan masyarakat Sumberjambe khususnya Desa Sumberpakem?</li> <li>2. Bagaimana cara saya mendapat bantuan dari dinas Peternakan karena kami sudah mempunyai domba Etawa 25 ekor.</li> </ol>		
16	Perangkat desa Kecamatan Sumberjambe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terima kasih bahwasanya (PT) penghasilan kami tahun 2014 terdapat kenaikan dan dipermudah pencairannya. Namun di kecamatan Sumberjambe</li> </ol>		

		<p>Terdapat kekosongan kasi khususnya tempat konsultasi kami di bidang pemerintahan. Mohon dengan hormat bidang tersebut diatas di tempatkan / diadakan pengisian sehingga koordinasi perangkat berjalan dengan baik.</p> <p>2. Sosialisasi tentang cara pencoblosan lebih banyak lagi sehingga warga masyarakat tidak kesulitan pada waktu pemilihan tanggal 9 april 2014</p>		
<p>17</p> <p>Nisful Laila (cemedak Sumberjambe)</p>		<p>1. Mohon ada penyebaran program LM3 dari dinas peternakan di wilayah Sumberjambe.</p> <p>2. Ada hadiah berdirinya SMA / SMK Negri di kecamatan Sumberjambe. Kami sudah usul 2 x -3x nya sekarang.</p> <p>3. Mohon ada analisa dampak gelombang mikro wnoe dari tower-tower dengan timbulnya penyakit tumor.</p> <p>4. Sebulan lalu hampir 2 bulan listrik di wilayah cemedak mati dari pagi sampai sore. Kami masyarakat memiliki perangkat elektronik yang peka perubahan listrik dan / atau dari PCN ke desel, jadi mudah rusak.</p> <p>5. Untuk ritel pasar modern di cemedak untuk di cakupkan 1 saja dulu, ngeman pasar tradisionalnya (orangnya sudah cukup lama)</p>		
<p>18</p>		<p>1. Dengan adanya tunjangan – tunjangan guru TK yang terhapus kami mohon kebijakan bagaimana solusi terbaiknya.</p> <p>2. Untuk TK sementara ini kegiatan di lapangan di bawah PNFI sementara untuk kedinasan seperti penilaian kinerja kita masih lewat Diknas. Harapan kami untuk kenyamanan kerja kami ada kejelasan yang pasti kami berada di mana, di bawah PNFI atau Diknas?</p> <p>3. Untuk sertifikasi Paud kel. Bermain di lapangan, teman – teman di beri harapan bahwa bisa</p>		

		sertifikasi, sementara UU jelas hanya untuk guru dan dosen, dengan ijazah minimal S1 dan jam mengajar minimal 24 jam per minggu, mohon penjelasan.		
19.	Abdurrafik (dari unsur Madrasah Diniyah Cumedak Sumberjambe)	<p>4. Mohon pemerataan bantuan antara TK dan Kelompok Bermain.</p> <p>Memohon tahun anggaran 2014 dana Sering BOSDA MADIN karena Madrasah Diniyah sangat membutuhkan untuk operasional, harapan kami sangat berharap sebagaimana madin – madin di kabupaten lain mengingat Jember termasuk Kabupaten yang Religi. Sekali lagi mohon diperhatikan dan dikabulkan.</p>		
20.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah pembuatan KK + KTP + Akte Kelahiran pelayanannya dengan cepat/sulit. Selama 1 bulan.</li> <li>2. BPJS saya minta dijelaskan dengan jelas seperti contoh : Masalah pembayaran / iuran perbulan apabila tidak bayar apa ada denda atau tidak.</li> <li>3. Pelayanan di puskesmas / admin apa bisa melayani Surat Keterangan Miskin (SKM). Jangan di buat sulit.</li> </ol>		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 214 /UN25.3.1/LT/2015  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan  
Penelitian

24 Februari 2015

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor :  
613/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 18 Februari 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Farikhatul Mardiyah/110910301008  
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember  
Alamat / HP : Jl. Jawa VI No. 17 Jember/HP. 081515505824  
Judul Penelitian : Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan  
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Deskriptif  
di Pemda Bagian Humas Kabupaten Jember)  
Lokasi Penelitian : Kantor Pemerintah Daerah Bagian Humas Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Dua bulan (24 Februari 2015 – 24 April 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa  
yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua  
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si  
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

303  
361  
2 br

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Bagian Humas Setkab. Jember  
di -  
JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/278/314/2015

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 214/UN25.3.1/LT/2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Farikhatul Mardhiyah 110910301008  
Instansi : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial / FISIP / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang :  
"Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Deskriptif di Pemda Bagian Humas kabupaten Jember)".  
Lokasi : Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Jember  
Tanggal : 26-02-2015 s/d 26-04-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 26-02-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris



Dr. MOH. HASYIM, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
19590213 198211 1 001

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

K e p a d a

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember  
3. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kab. Jember  
4. Kepala Dispenduk dan Capil Kab. Jember  
5. Kabag. Perekonomian Setkab Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/303/314/2015

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 214/UN25.3.1/LT/2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Farikhatul Mardhiyah 110910301008  
Instansi : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial / FISIP / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang :  
"Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Deskriptif di Pemda Bagian Humas kabupaten Jember)".  
Lokasi : Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU Cipta Karya, Dispenduk & Capil dan Bagian Perekonomian Setkab. Jember  
Tanggal : 04-03-2015 s/d 04-06-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 04-03-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris



Dr. MOH. HASYIM, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
195902131982111001

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Bapemas Kab. Jember  
2. Kepala Dinas Pertanian Kab. Jember  
3. Kepala Dinas PU Bina Marga Kab. Jember  
4. Kepala Disperindag dan ESDM Kab Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/361/314/2015

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 214/UN25.3.1/LT/2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Farikhatul Mardhiyah 110910301008  
Instansi : Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial / FISIP / Universitas Jember  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang :  
"Program Dialog Solutif Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jember (Studi Deskriptif di Pemda Bagian Humas kabupaten Jember)".  
Lokasi : Bapemas, Dinas Pertanian, Dinas PU Bina Marga, Disperindag dan ESDM Kab. Jember  
Tanggal : 13-03-2015 s/d 13-05-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 13-03-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Sekretaris



- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember  
2. Ybs.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
SEKRETRIAT KABUPATEN  
BAGIAN HUMAS**

**Jl. SUDARMAN No. 1 JEMBER Telp. (0331)428824 Fax.(0331) 425644**

Nomor : 072/303/314/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

Jember, 12 Agustus 2015  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Jember  
Di-  
Jember

Memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember pada Tertanggal 26 Februari 2015 Nomor: 072/303/314/2015 Perihal Izin Penelitian, Maka Dengan ini Kami memberitahukan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Farikhatul Mardiyah  
Nim : 110910301008  
Alamat : Jalan jawa 6 No 17 Jember  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember

Telah selesai mengadakan penelitian tentang "Program Dialog solutif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember". Waktu pelaksanaan 26 Februari 2015 s/d 26 April 2015.

**KEPALA BAGIAN HUMAS  
SEKRETARIAT KABUPATEN JEMBER**

  
**Ir. ZAINAL ABIDIN, MM**  
NIP. 19620505 198602 1 007